



# BAB I P E N D A H U L U A N

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang yang lalu lebih difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat, ternyata di kemudian hari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut. Menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan good governance, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 telah diterbitkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689/JX/6/Y/1 999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pada tahun 2002 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

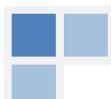


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan/kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan stratejik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana Stratejik yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana Stratejik ditetapkan sejumlah Sasaran Stratejik. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima. Alur pikinya adalah apabila tujuan stratejik organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersiapkan telah memenuhi visi dan misinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. UU No.28/1999: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;



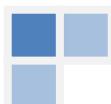
5. Inpres No. 5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
Inpres ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  
Peraturan ini wajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Peraturan ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2013 disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam tahun 2013. Disamping sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:



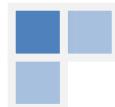
1. Menjadikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### 1.3. RUANG LINGKUP

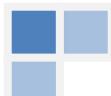
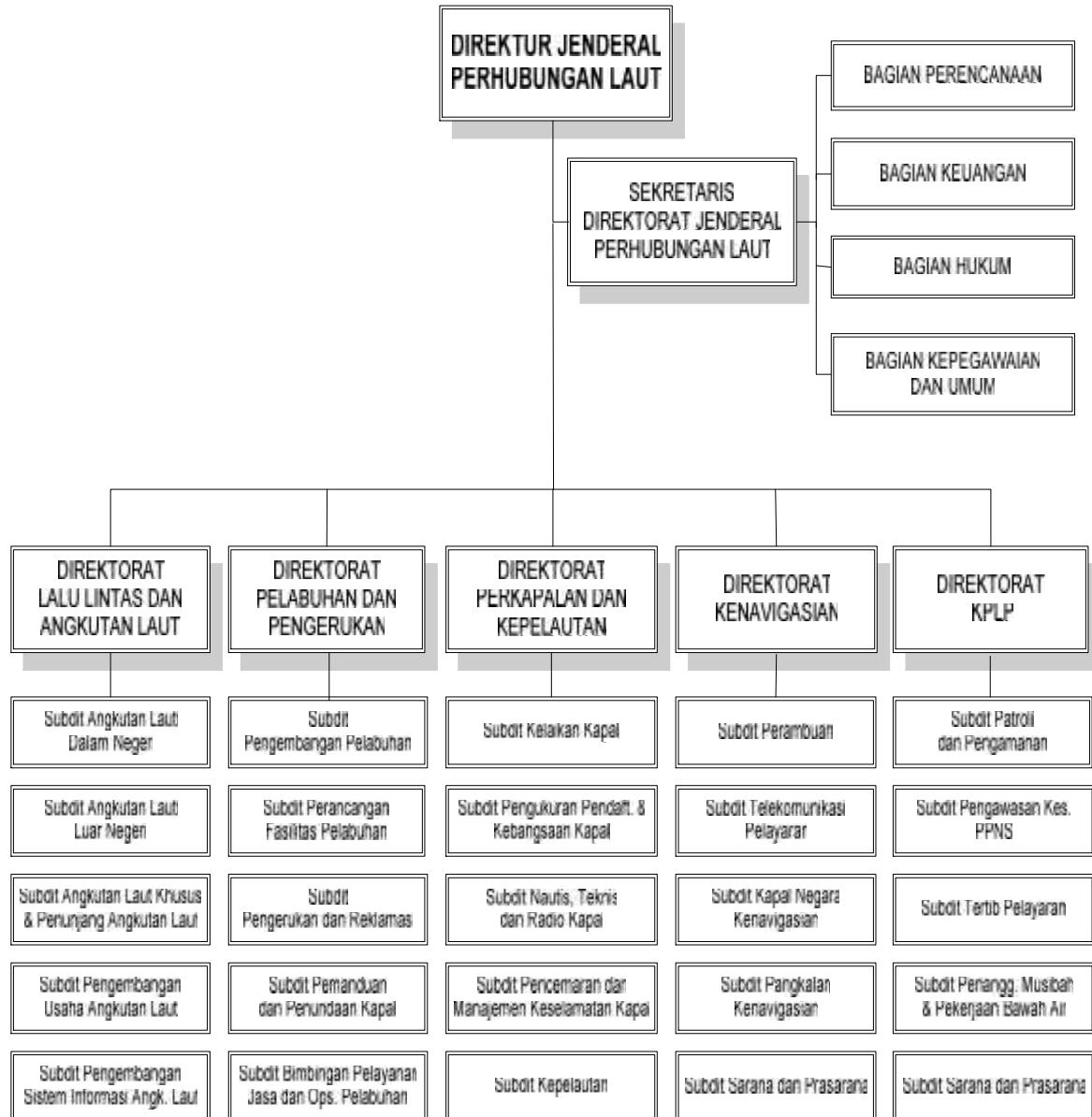
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mencakup pelaksanaan tugas administrasi dan teknis penyelenggaraan transportasi laut selama periode tahun anggaran 2013 yaitu sampai dengan posisi 31 Desember 2013.

#### 1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBLA

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:



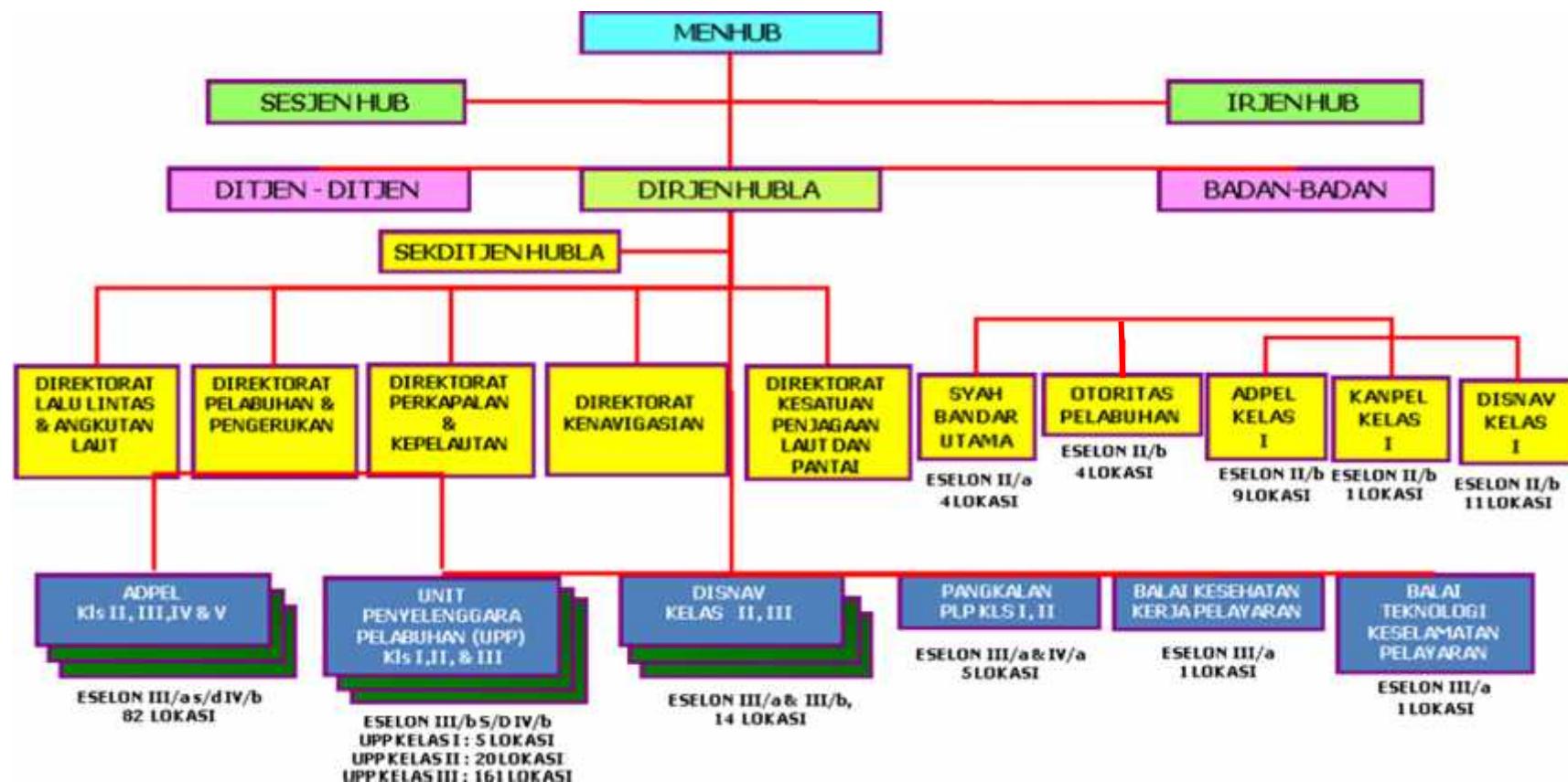
**STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
(KM. 60 TAHUN 2010)**



#### 1.4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah Reformasi Kelembagaan

#### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan



## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



### 1.4.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Ditjen Hubla

#### a. Tugas Pokok Ditjen Hubla

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



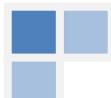
b. Fungsi Ditjen Hubla

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan penggerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan penggerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
- 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c. Susunan Organisasi Ditjen Hubla

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
  - 3) Direktorat Pelabuhan dan Penggerukan;
  - 4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
  - 5) Direktorat Kenavigasian;
  - 6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

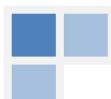


- b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
  - 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, statistik serta bimbingan pelaksanaan program organisasi, sistem dan prosedur kerja;
  - 2) Pengelolaan urusan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara;
  - 3) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unit serta pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat;
  - 4) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
  - 5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

- c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 
- a. Bagian Perencanaan
    - 1) Tugas Bagian Perencanaan  
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri.
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

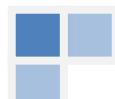
b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

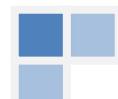
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a. Pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;



- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas;
  - c. Pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).
- c. Bagian Hukum
- 1) Tugas Bagian Hukum
- Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.
- 2) Fungsi Bagian Hukum
- a. Penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum;
  - c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perhubungan laut.



d. Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Tugas Bagian Kepegawaian dan Umu

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Kepegawaian dan Umum

- a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

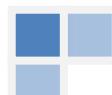
2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

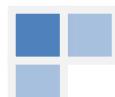


- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- d. Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan ijin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

### 3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

#### a) Tugas Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

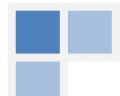


- b) Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
  - b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
  - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
  - d. Penyiapan pemberian perijinan dan standarisasi penyelenggaraan pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

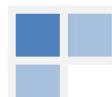
a) Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan



prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

- b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (Flooding and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
  - b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (Flooding and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
  - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (Flooding and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
  - d. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (ISM Code), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (Continuous Synopsis Record);



- e. Pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. Penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat penetapan, tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kapal dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

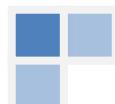
## 5) Direktorat Kenavigasian

### a) Tugas Direktorat Kenavigasian

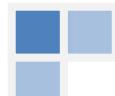
Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

### b) Fungsi Direktorat Kenavigasian

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;



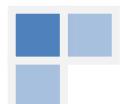
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
  - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
  - d. Penyiapan pemberian perijinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
- 6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai  
Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.
  - b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;



- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
  - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
  - d. Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
  - e. Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
  - g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
- 7) Tugas dan Fungsi kelembagaan baru di lingkungan Ditjen Hubla

a) Otoritas Pelabuhan

Otoritas Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dengan beberapa tugas sebagai berikut:



b) Syahbandar

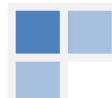
Syahbandar mempunyai Fungsi sebagai pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dengan beberapa tugas sebagai berikut:

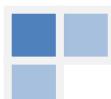
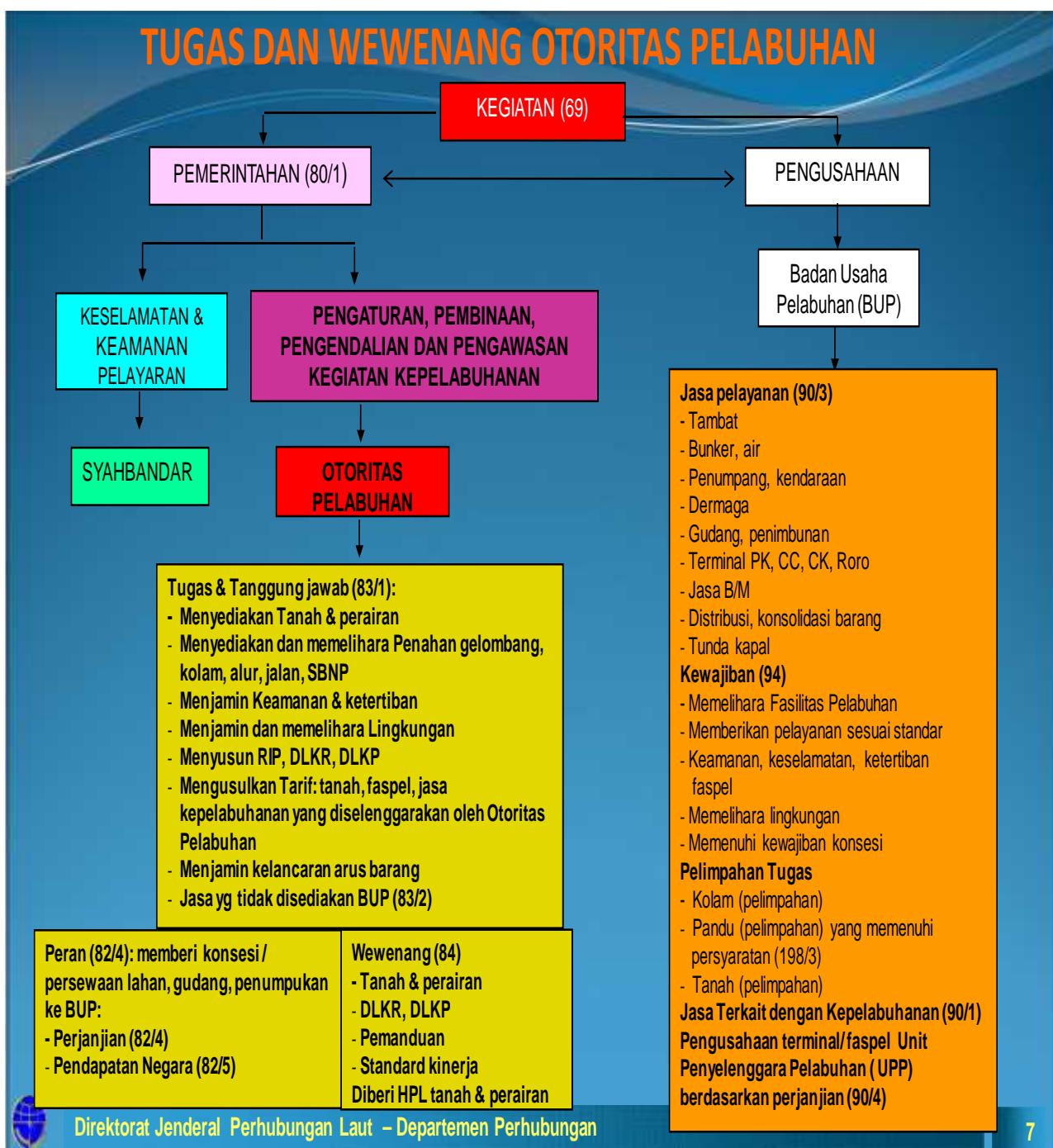
c) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai Pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial

d) Sea and Coast Guard

Sea and Coast Guard mempunyai Fungsi sebagai Penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai







## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

## **DITJEN HUBLA TAHUN 2013**

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### 2.1.1 REVIEW RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 – 2014

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2012, Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.

Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 memberikan gambaran tentang Visi, misi, tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010 – 2014. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun



2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

**Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”**

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya perusahaan masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 misi Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;



3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi perlu disesuaikan kembali misi Kementerian Perhubungan menjadi :

- 1.1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pemberian regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

- 1.2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.



### 1.3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbang ketidakpastian situasi keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

### 1.4. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.



- 1.5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten

Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi.

- 1.6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi kedepan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

Melalui misi tersebut Kementerian Perhubungan harus mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang saling terintegrasi ke seluruh wilayah dalam rangka mewujudkan konektivitas wilayah Indonesia.



Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan [Tujuan Kementerian Perhubungan](#) yaitu :

“Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis”.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan peningkatan peran Daerah, BUMN, Swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi, termasuk peningkatan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi maupun peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada optimalisasi dayaguna tanpa pembebanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

Sasaran Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;
4. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;



5. Peningkatan kualitas SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
6. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

Kebijakan Kementerian Perhubungan yaitu:

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, kebijakan pembangunan dan penyelenggara transportasi meliputi:

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.



Memperhatikan kebijakan yang terus menerus mengalami perubahan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, menjadi:

1. Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional;
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender;
3. Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi;
4. Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
5. Mendorong pembangunan transporasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan yaitu:

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan



kegagalan dalam mengimplementasikan visi, misi dan strategi Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Indikator yang terkait dokumen tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 adalah indikator keluaran (output), untuk kegiatan serta indikator hasil (outcome) untuk sasaran.

Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada prakiraan yang realistik dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maupun data pendukung indikator kinerja kegiatan.

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 dengan tambahan Indikator kegiatan yang bersifat strategis sebagai berikut:

Sasaran Kementerian Perhubungan yang pertama "Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal" diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;
2. Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;
3. Rata-rata Persentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi;
4. Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi;
5. Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi.



Sasaran Kementerian Perhubungan kedua "Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah" diukur dengan indikator kinerja utama yaitu :

1. Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi.

Sasaran Kementerian Perhubungan ketiga "Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi" adalah:

1. Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Total produksi angkutan penumpang;
3. Total produksi angkutan barang.

Sasaran Kementerian Perhubungan keempat "Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi" diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta.

Sasaran Kementerian Perhubungan kelima "Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi" diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Nilai Akuntabilitas Kementerian Perhubungan;
2. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
3. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN;
4. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat;
5. Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan;



6. Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;
7. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan.

Sasaran Kementerian Perhubungan keenam “Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta teknologi transportasi yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim” diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional;
2. Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional;
3. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi;
4. Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.

#### 2.1.2 REVIEW RENSTRA DITJEN HUBLA TAHUN 2010 - 2014

Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla.

RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Adapun penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla terdapat pada tabel berikut.



Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Berbagai upaya sedang dan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, agar fungsi pengawasan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta dapat menegakkan supremasi hukum yang konsisten dan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peran Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan atau kewenangan pejabat/unit kerja aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pengembangan sistem informasi pengawasan secara transparan dan akuntabel terdiri dari ketersediaaan informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu juga dilakukan pendayagunaan sistem pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terwujudnya akuntabilitas publik pemerintah dan terciptanya pemerintah yang baik, serta terwujudnya sinergi pengawasan di lingkungan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### 1) Visi Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, adalah:

terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.



---

2) Misi Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah menetapkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi 5 (lima) misi utama pembangunan yang harus ditempuh sebagai berikut:

- 
1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
  2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
  3. Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan;
  4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
  5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan;

---

3) Tujuan Ditjen Hubla

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

---

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
2. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.



3. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
  4. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan penegakan hukum;
  5. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
- 
- 4) Sasaran
- Sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2010 – 2014 yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut;
  2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut
  3. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan;
  4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta administrasi negara di sektor transportasi laut;
  5. Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut
- 
- Sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2010 – 2014 setelah direview yaitu sebagai berikut :
- 



1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi laut;
4. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi laut sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi laut;
5. Peningkatan kualitas SDM transportasi laut dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
6. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi laut yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

---

## 5) Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan transportasi laut sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi laut yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional;



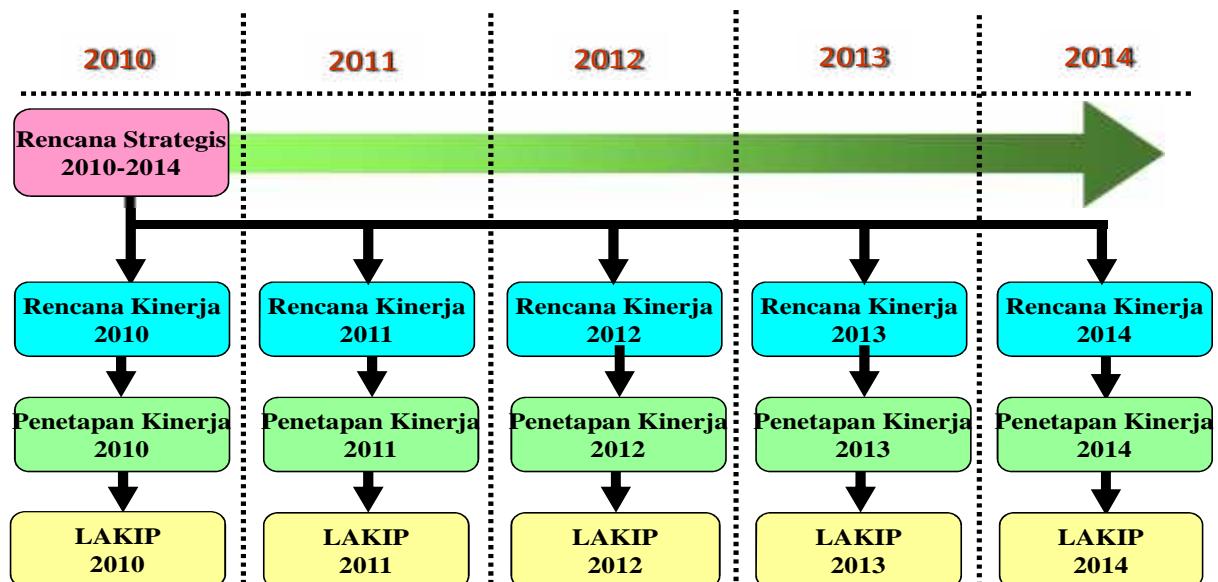
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender;
3. Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi laut termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai upaya peningkatan efisiensi;
4. Meningkatkan kualitas SDM transportasi laut guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
5. Mendorong pembangunan transporasi laut berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi laut yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim

## 2.2 Perencanaan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010 – 2014, yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Hubla melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja 2013 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2013 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Ditjen Hubla untuk mencapainya dalam tahun 2013. Hubungan antara rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan LAKIP dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Dokumen yang Digunakan dalam Sistem AKIP**



Dengan demikian, Rencana Kinerja 2013 Ditjen Hubla merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2013 sedangkan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013 merupakan bentuk komitmen penuh Ditjen Hubla untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi Ditjen Hubla.

#### 2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi laut sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan visi, misi dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tk. Eselon I di lingkungan kementerian Perhubungan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 28 Desember 2013.

Sesuai PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran tersebut mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) 1:

Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia;
2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

Sasaran Strategis (SS) 2:

Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:



3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelautan kapal;

Sasaran 2:

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran tersebut mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) 3:

Meningkatnya AKSESIBILITAS masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

4. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut;
5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Sasaran 3:

Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut

Sasaran tersebut mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) 4:

Meningkatnya KAPASITAS pelayanan transportasi laut nasional

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;
7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis;
8. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional;



9. Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional;
10. Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;
11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Sasaran Strategis (SS) 5:

Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

12. Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan

Sasaran Strategis (SS) 6:

Meningkatnya PELAYANAN pelayaran transportasi laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian waiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;
14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan'
15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Sasaran 4:

Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut



Sasaran Strategis (SS) 7:

Melanjutkan restrukturisasi KELEMBAGAAN di sub sektor transportasi laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

16. Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut;

Sasaran 5:

Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi

Sasaran Strategis (SS) 8 :

Meningkatnya kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

17. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A;
18. Jumlah kebutuhantena marine inspector B;
19. Jumlah kebutuhan tenaga PPNS;
20. Jumlah tenaga PPNS;
21. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A;
22. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B;
23. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran;
24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;
25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam

Sasaran Strategis (SS) 9 :

Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;



27. Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
28. Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
29. Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Sasaran Strategis (SS) 10 :

Penataan peraturan perundang-undangan dan melanjutkan REFORMASI REGULASI di bidang transportasi laut

30. Jumlah penyelesaian regulasi

Sasaran 6:

Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

Sasaran Strategis (SS) 11 :

Menurunnya dampak sub sektor transportasi laut terhadap LINGKUNGAN melalui pengurangan emisi gas buang

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

31. Jumlah penurunan emisi gas buang (CO<sub>2</sub>) transportasi laut

Sasaran Strategis (SS) 12 :

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di bidang transportasi laut

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut:

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan);
33. Jumlah-pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention);
34. Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran);
35. Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxious Liquid Substance);
36. Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)



## 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PENETAPAN KINERJA (PK) DITJEN HUBLA TAHUN 2013

### 2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Hubla Tahun 2013

Pada RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebelum direview, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 5 (lima) sasaran dan 33 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2010 - 2014) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla tahun 2010 – 2014, maka telah disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi serangkaian target yang hendak dicapai seperti pada table berikut.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
<b>S A S A R A N ( 1 )</b>		
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal		
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan
	2) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 2 )		
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3) Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat
S A S A R A N ( II )		
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah		
Sasaran Strategis ( 3 )		
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	4) Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis
	5) Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan
S A S A R A N ( III )		
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut		



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 4 )		
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional	6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6.660.000 Orang
	7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang
	8) Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton
	9) Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,10 %
	10) Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton
	11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %
Sasaran Strategis ( 5 )		
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12) Penurunan Turn-Around Time (TR) di pelabuhan yang diusahakan	60 Menit



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
<b>Sasaran Strategis ( 6 )</b>		
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
	14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
	15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
<b>S A S A R A N ( IV )</b>		
Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut		
<b>Sasaran Strategis ( 7 )</b>		
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16) Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelelangan</li><li>- Perizinan</li><li>- Konstruksi</li><li>- Operasional</li></ul>	2 - - -



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
<b>SASARAN ( V )</b>		
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi		
<b>Sasaran Strategis ( 8 )</b>		
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17) Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang
	18) Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang
	19) Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang
	20) Jumlah tenaga PPNS	427 Orang
	21) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	367 Orang
	22) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	60 Orang
	23) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	120 Orang
	24) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang
25) Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	
<b>Sasaran Strategis ( 9 )</b>		
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
	27)Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000
	28)Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000
	29)Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.010.412.564.824
Sasaran Strategis ( 10 )		
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	30)Jumlah penyelesaian regulasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPP</li> <li>- RPM</li> <li>- Keputusan Dirjen</li> </ul>	3
<b>S A S A R A N ( VI )</b>		
<p>Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut serta teknologi transportasi laut yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim</p>		
Sasaran Strategis ( 11 )		
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31)Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,5252 Mega Ton



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 12 )		
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32)Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan
	33)Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.123 Sertifikat
	34)Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.679 Sertifikat
	35)Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat
	36)Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat

## 2.2.2 Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Hubla Tahun 2013

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis setiap tahunnya Perencanaan Stratejik dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja Tahunan (Performance Contract). Rencana Kinerja tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.



Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2010-2014. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut . Beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Secara lebih rinci, Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2013 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada table berikut yaitu Penetapan Kinerja Ditjen Hubla yang mengacu pada Usulan Revisi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013 disusun setelah DIPA Tahun 2013 ditetapkan. Dokumen Penetapan Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013 .

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
<b>S A S A R A N ( I )</b>		
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal		
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan
	2) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan
<b>Sasaran Strategis ( 2 )</b>		
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3) Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat
<b>S A S A R A N ( II )</b>		
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah		
<b>Sasaran Strategis ( 3 )</b>		
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	4) Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
	5) Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan
<b>S A S A R A N ( III )</b>		
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut		
<b>Sasaran Strategis ( 4 )</b>		
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional	6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6.660.000 Orang
	7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang
	8) Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton
	9) Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %
	10) Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton
	11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 5 )		
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12) Penurunan Turn-Around Time (TR) di pelabuhan yang diusahakan	60 Menit
Sasaran Strategis ( 6 )		
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
	14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
	15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
S A S A R A N ( IV )		
Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut		



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 7 )		
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16) Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelelangan</li> <li>- Perizinan</li> <li>- Konstruksi</li> <li>- Operasional</li> </ul>	2 - - - -
S A S A R A N ( V )		
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi		
Sasaran Strategis ( 8 )		
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17) Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang
	18) Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang
	19) Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	427 Orang
	20) Jumlah tenaga PPNS	367 Orang
	21) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	60 Orang
	22) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	120 Orang
	23) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
	24) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang
	25) Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang
Sasaran Strategis ( 9 )		
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82
	27) Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000
	28) Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000
	29) Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824
Sasaran Strategis ( 10 )		
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	30) Jumlah penyelesaian regulasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPP</li> <li>- RPM</li> <li>- Keputusan Dirjen</li> </ul>	3 - -
S A S A R A N ( VI )		
<p>Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut serta teknologi transportasi laut yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim</p>		



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 11 )		
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31)Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,5252 Mega Ton
Sasaran Strategis ( 12 )		
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32)Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan
	33)Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1123 Sertifikat
	34)Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1679 Sertifikat
	35)Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat
	36)Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat



## 2.4 APBN Ditjen Hubla Tahun 2013

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2013 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir  
Ditjen Hubla Tahun 2013

NO	URAIAN	PAGU AWAL ( Rp. 000 )	PAGU AKHIR ( Rp. 000 )
1	Belanja Pegawai	880.712	885.625
2	Belanja Barang	2.392.113	2.219.867
	Rupiah murni (RM)	2.244.367	2.068.821
	PNBP	147.745	146.983
	Rupiah Murni Pendamping		
	PHLN		4.063
3	Belanja Modal	6.330.216	8.516.751
	Rupiah murni (RM)	5.384.540	7.525.818
	PNBP	75.877	76.640
	Rupiah Murni Pendamping		
	PHLN	869.798	914.292
	TOTAL PAGU	9.603.042	11.622.244
	TOTAL REALISAI		9.943.176
	TOTAL SISA DANA		1.679.068



Adapun kegiatan penggunaan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) akan diuraikan pada tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6  
Kegiatan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) Tahun 2013**

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp. Juta)
Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelabuhan dan Pengerukan		
1.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Singkel	<b>30,000</b>
2.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Labuhan Angin	<b>25,000</b>
3.	Pengembangan Faspel Barus	<b>10,000</b>
4.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bagan Siapi-Api	<b>30,000</b>
5.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sungai Guntung	<b>30,000</b>
6.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Mocoh	<b>40,000</b>
7.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dabo Singkep	<b>20,000</b>
8.	Pengembangan Faspel Laut Midai	<b>30,000</b>
9.	Pengembangan Faspel Laut Subi	<b>6,000</b>
10.	Lanjutan Pembangunan Faspel Sikakap	<b>30,000</b>
11.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Teluk Tapang	<b>20,000</b>
12.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Manggar (Break Water)	<b>10,000</b>
13.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sadai	<b>15,000</b>
14.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pangandaran	<b>5,000</b>
15.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kendal	<b>40,000</b>
16.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jepara	<b>10,000</b>
17.	Penyelesaian Sisi Darat Pelabuhan Rembang	<b>10,000</b>



18.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Probolinggo	<b>40,000</b>
19.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Branta	<b>30,000</b>
20.	Lanjutan Pembangunan Trestle s/d Modul 8 Pelabuhan Taddan	<b>40,000</b>
21.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanah Ampo (Tidak Terlaksana)	<b>30,000</b>
22.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bima	<b>32,000</b>
23.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Benete	<b>25,000</b>
24.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Badas	<b>25,000</b>
25.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut L. Say Maumere	<b>16,000</b>
26.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Baing	<b>15,000</b>
27.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Waingapu Nusantara	<b>27,000</b>
28.	Pengembangan Dermaga Pelra Pulau Mamboro	<b>10,000</b>
29.	Pengembangan faspel laut Ippi	<b>40,000</b>
30.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Nunbaunsabu	<b>17,000</b>
31.	Pengembangan Pelabuhan Tenau	<b>25,000</b>
32.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Kolbano	<b>20,500</b>
33.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Ba'a	<b>11,000</b>
34.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batutua	<b>10,000</b>
35.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Atapupu	<b>40,500</b>
36.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Waikelo	<b>28,000</b>
37.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Marapokot	<b>8,000</b>
38.	Lanjutan Faspel Laut Baranusa	<b>25,000</b>
39.	Pengembangan Faspel Laut Labuhan Bajo	<b>25,000</b>



40.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Menanga	<b>30,000</b>
41.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sukadana	<b>37,000</b>
42.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Sebuku	<b>40,000</b>
43.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Sei Nyamuk	<b>40,000</b>
44.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Malloy (CPO)	<b>7,000</b>
45.	Pengembangan Pelabuhan Palaran	<b>25,000</b>
46.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kalama	<b>5,000</b>
47.	Pembangunan Dermaga Gorontalo	<b>30,000</b>
48.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manui	<b>20,200</b>
49.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bungku	<b>5,000</b>
50.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kolonedale	<b>10,000</b>
51.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Mantangisi	<b>12,600</b>
52.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Leok	<b>11,300</b>
53.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Banggai	<b>22,700</b>
54.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Luwuk	<b>12,500</b>
55.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bungkutoko	<b>30,000</b>
56.	Pengembangan Faspel Laut Kaledupa	<b>6,000</b>
57.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Liana Banggai	<b>10,000</b>
58.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Lawele	<b>10,000</b>
59.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batu Atas	<b>12,500</b>
60.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wanci	<b>10,000</b>
61.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kolaka	<b>13,000</b>
62.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pare-pare	<b>27,000</b>
63.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Palopo	<b>15,000</b>



64.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Larea-rea (Sinjai)	<b>20,000</b>
65.	Penyelesain Fasilitas Pelabuhan Jeneponto	<b>5,000</b>
66.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bantaeng	<b>15,000</b>
67.	Lanjutan Pembangunan Faspel Kalatoa	<b>20,000</b>
68.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Patirro Bajo	<b>27,000</b>
69.	Pengembangan Faspel Laut Benteng / Selayar	<b>30,000</b>
70.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bulukumba	<b>23,000</b>
71.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Macini Baji	<b>30,000</b>
72.	Pengadaan Peralatan Survey Disnav Makassar	<b>10,000</b>
73.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Silopo	<b>20,000</b>
74.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Majene	<b>22,500</b>
75.	Penyelesian Pembangunan Faspel Laut Palipi	<b>30,000</b>
76.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Belang-belang	<b>34,200</b>
77.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut P. Ambo	<b>30,900</b>
78.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pompongan	<b>21,100</b>
79.	Lanjutan Pembangunan Faspel Dobo	<b>10,000</b>
80.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kobror	<b>10,000</b>
81.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Panambulai/ Marlasi	<b>10,000</b>
82.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Tuhaha	<b>21,800</b>
83.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sepo / Sagea	<b>15,000</b>
84.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Paniti	<b>20,000</b>
85.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Wayaua	<b>25,300</b>
86.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manitingting	<b>10,000</b>
87.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Laiwui	<b>10,000</b>



88.	Lanjutan Pembangunan Faspel Jojame	<b>10,100</b>
89.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Daruba	<b>20,000</b>
90.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tobelo (Container)	<b>10,000</b>
91.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jailolo	<b>10,000</b>
92.	Lanjutan Pembangunan Faspel P. Damar	<b>13,000</b>
93.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Loseng	<b>5,000</b>
94.	Penyelesaian Pelabuhan Laut Merauke	<b>15,000</b>
95.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pomako	<b>40,000</b>
96.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Serui	<b>30,000</b>
97.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dawai	<b>34,000</b>
98.	Faspel Waisai Waigeo	<b>40,000</b>
99.	Lanjutan Pembangunan Faspel Oransbari	<b>35,000</b>
100.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Wasior	<b>23,000</b>
101.	Peralatan Keamanan di DIT KPLP (7 lokasi)	<b>27,000</b>
<b>Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian</b>		
1.	Pengadaan Peralatan Survey Disnav Banjarmasin	<b>10,000</b>
2.	Pengadaan peralatan survey disnav kendari	<b>10,000</b>

## 2.6 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2013

Selanjutnya sesuai Pagu Definitif bahwa alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013 adalah sebesar Rp 9.603.042.171,- untuk sub sektor Transportasi Laut adalah sebagai berikut :



Tabel 2.8  
Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2013

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL ( Rp. 000,-)	PAGU AWAL ( Rp. 000,-)
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	2.511.457.395	2.367.859.398
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1.020.759.821	989.498.099
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	8.917.072.075	8.200.833.820
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	10.255.000	-
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	3.828.086.572	888.755.824
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	821.463.689	151.395.030
<b>T O T A L</b>		<b>17.109.094.552</b>	<b>12.598.342.171</b>

## 2.7 Kegiatan-kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2013

Beberapa kegiatan prioritas Ditjen Hubla adalah kegiatan yang dimonitor oleh UKP4 pada tahun 2013 yaitu:

### 1. Program N6P55A104 :

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan :



Terdapat 9 (Sembilan) pelabuhan pada Koridor MP3EI yang dipantau oleh UKP4 yaitu;

- a) Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Batang;
- b) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Bima;
- c) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Anggrek;
- d) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Donggala;
- e) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Gudang-Arang Ambon;
- f) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Pasean;
- g) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Jailolo;
- h) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Batanjung;
- i) Lanjutan pembangunan Faspel Laut Garongkong.

## 2. Program N7P63A117 :

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut:

Penyelenggaraan Inaportnet sebagai unsur pendukung NSW, Revitalisasi dan perawatan infrastruktur sistem inaportnet di 4 (empat) pelabuhan yaitu:

- a) Pelabuhan Tanjung Priok;
- b) Pelabuhan Belawan;
- c) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- d) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

## 3. Program N8P85A171 :

Agar seluruh kapal yang direncanakan dapat tersedia tepat waktu dan rute perintis dapat berjalan berkelanjutan sehingga yang merupakan kegiatan prioritas yaitu tersedianya 18 (delapan belas) unit kapal laut perintis meliputi Penyelesaian 11 (sebelas) unit kapal perintis dan Pembangunan baru 7 (tujuh) kapal perintis.





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## DITJEN HUBLA TAHUN 2013

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tk. Eselon I di lingkungan kementerian Perhubungan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Perhungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 28 Desember 2013.

Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla. RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja



Ditjen Hubla ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2013 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N ( 1 )</b>				
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 1 )</b>				
Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	51 Kejadian Kecelakaan	94,12 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 2 )</b>				
Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat	9.794 Sertifikat	124,76 %

**S A S A R A N ( II )**

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

**SASARAN STRATEGIS ( 3 )**

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	79 Rute Perintis	98,75 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan	379 Pelabuhan	98,19 %

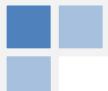
**S A S A R A N ( III )**

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut

**SASARAN STRATEGIS ( 4 )**

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang	6,092,501 Orang	91,47 %
---	---	--------------------	--------------------	---------



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang	563,727 Orang	88,92 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton	368,297,016 Ton	108,00 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %	99,68 %	100,79 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton	67,511,610 Ton	106,82 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %	10,91 %	105,61 %
<b>SASARAN STRATEGIS (5)</b>				
Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang				
12	Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	60 menit	104 menit	173,33 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 6 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belakut terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	37 Pelabuhan	77,08 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	26 Pelabuhan	54,17 %
<b>SASARAN ( IV )</b>				
Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi				



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 7 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut  - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2	2	100 %
<b>SASARAN ( V )</b>				
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 8 )</b>				
Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhantena Marine Inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	60 Orang	100,00 %
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang	427 Orang	100,00 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
21	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang	30 Orang	150,00%
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang	50 Orang	250,00%
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	30 Orang	150,00%

### SASARAN STRATEGIS ( 9 )

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00	80,26	97,88 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000	Rp. 642.438.699.393	207,89 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000	Rp. 9.943.176.487.000	103,54 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824	Rp. 27.992.287.146.185	84,54 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 10 )</b>				
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	3	3	100,00 %
<b>SASARAN ( 6 )</b>				
Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 11 )</b>				
Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO <sub>2</sub> ) transportasi laut	0,5252 Mega Ton	0,3939 Mega Ton	75 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 12 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan	13 Pelabuhan	108,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention)	1,123 Sertifikat	1,196 Sertifikat	106,50 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1,679 Sertifikat	1,514 Sertifikat	90,17 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat	156 Sertifikat	102,63 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat	403 Sertifikat	149,26 %

### 3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### I. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

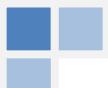
"Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal"

Sasaran Strategis (1)

Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	51 Kejadian Kecelakaan	94,12 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	Tetap
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	66 Kejadian Kecelakaan (72,73 %)	51 Kejadian Kecelakaan (94,12 %)	Turun 21,39 %

1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2013 pada Sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal". Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2013 sebanyak 24 kejadian kecelakaan sedangkan target sebanyak 31 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 129,17%, apabila dibanding dengan tahun 2012 jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia mempunyai jumlah kejadian yang sama yaitu sebanyak 24 kejadian kecelakaan. Hal ini dapat tercapai dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang semakin ketat dan juga dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait serta kepada para pihak yang bertanggungjawab kepada kecelakaan kapal yaitu Nahkoda Kapal, Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan Penerbit Sertifikat.



- a. Penanggung Jawab Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kapal
  - 1. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kapal
    - a. Nakhoda Kapal
    - b. Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran
    - c. Aparat Pengawas
    - d. Penerbit Sertifikat
  - b. Kelembagaan
    - 1. Peningkatan Fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
    - 2. Revitalisasi Peran Syahbandar/ADPEL/UPP
    - 3. Pembentukan Lembaga Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan UU 17/2008
    - 4. Pembentukan Lembaga Syahbandar sesuai dengan UU 17/2008
    - 5. Pembentukan Lembaga Penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) sesuai dengan UU 17/2008
    - 6. Peningkatan koordinasi pelaksanaan sistem informasi pelayaran dan meteorologi maritim
    - 7. Melakukan restrukturisasi dan reformasi terhadap lembaga Klasifikasi Indonesia agar dapat berdiri sendiri sebagai lembaga non profit dan lebih independen dan profesional dalam rangka mendapat pengakuan di IACS
    - 8. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran kapal rakyat dan kapal yang berukuran dibawah 7 GT.
  - c. Sumberdaya Manusia
    - 1. Peningkatan Diklat Teknis Ahli Nautika Tingkat (ANT) I-IV, Ahli Teknik Tingkat (ATT) I-IV;
    - 2. Peningkatan Diklat Teknis Marine Inspector
    - 3. Peningkatan Diklat Teknis Pengukuran Kapal, Pendaftaran & Kebangsaan Kapal;



4. Peningkatan Diklat Teknis Kepanduan;
  5. Peningkatan Diklat Teknis Global Marine Distress Safety System (GMDSS), SBNP, dan Radar Simulator Arpha Simulator
  6. Peningkatan Diklat Teknis Kesyahbandaran
  7. Peningkatan Diklat Teknis KPLP
  8. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISPS-Code, Port State Control Officer
  9. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Basic Safety
  10. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Advance Fire Fighting
  11. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISM Code
  12. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Ship Security Officer
  13. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli VTS, Operator Basic and Advance, VTS Supervisor, VTS on-the-Job Training, VTS Instructor
  14. Peningkatan Diklat Teknis Pengelola National Data Centre (NDC) Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)
  15. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat I-III
- d. Operator
1. Pelaporan pelaksanaan perawatan kapal secara berkala (Planned Maintenance System).
  2. Peningkatan pengetahuan operator melalui pelatihan pelatihan tentang keselamatan pelayaran Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).



e. Masyarakat

1. Meningkatkan Sosialisasi bidang keselamatan pelayaran dan sosialisasi tentang barang / bahan Berbahaya.
2. Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) masyarakat, konsumen dan operator.
3. Mengadakan program Gerakan Sadar Keselamatan Pelayaran secara Nasional setiap tahun khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang banyak melayani kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal penyeberangan.

f. Penegakan Hukum

1. Peningkatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal konvensi dan non konvensi di pelabuhan.
2. Peningkatan pemeriksaan kapal dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
3. Peningkatan pemeriksaan fasilitas pokok pelabuhan secara berkala.
4. Peningkatan pengawasan pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dan pengawasannya.
5. Peningkatan pengawasan terhadap telekomunikasi pelayaran.
6. Peningkatan pengawasan penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standard.
7. Peningkatan pengawasan penyebarluasan berita tentang meteorologi di bidang maritim.
8. Peningkatan pengawasan terhadap bangunan atau instalasi di perairan serta zona keamanan dan keselamatan berlayar.
9. Peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar, tata ruang perairan dan tata perairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.



10. Peningkatan pengawasan terhadap pemanduan di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa.
11. Peningkatan pengawasan terhadap material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, dan elektronika kapal penumpang dan barang baik untuk kapal konvensi maupun non konvensi.
12. Peningkatan pengawasan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan.
13. Peningkatan pengawasan melekat dalam pemeriksaan, pengujian dan penilikan keselamatan kapal.
14. Peningkatan pengawasan terhadap pemeliharaan kapal secara berkala dan sewaktu-waktu.
15. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis perlengkapan navigasi atau elektronika kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
16. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis peralatan meteorologi sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
17. Peningkatan pengawasan terhadap standar dan persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
18. Peningkatan pengawasan terhadap garis muat dan pemuatan kapal.
19. Peningkatan pengawasan manajemen keselamatan kapal.
20. Pembebasan tugas kepada petugas di lapangan yang melakukan kesalahan (Syahbandar dan Marine Inspector) .
21. Pemeriksaan khusus menyeluruh dengan melakukan Condition Assesment Survey (CAS) Terhadap Persyaratan Keselamatan bagi pengoperasian kapal Ferry Ro-Ro di dalam negeri yang telah berumur 25 tahun.



22. Memberikan sanksi tegas kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan, dan pencabutan ijin bagi operator yang tidak disiplin atau tidak memenuhi ke wajiban keselamatan transportasi laut.
2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

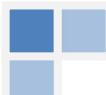
Terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain yaitu yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya muatan kapal yang jatuh dan mengakibatkan kecelakaan.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami penurunan sebanyak 15 kejadian kecelakaan atau 29,41 % dimana pada tahun 2012 terdapat 66 kejadian kecelakaan sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 51 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain.

Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2013 sebesar 94,12 % dimana target sebanyak 48 kejadian kecelakaan sedangkan realisasi sebanyak 51 kejadian kecelakaan.

**TABEL 3.2**  
**Data Kecelakaan Kapal Tahun 2010 s/d 2013**

<b>NO</b>	<b>DATA KECELAKAAN KAPAL</b>	<b>TAHUN</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A	Jenis Kecelakaan				
1	Kapal Tenggelam	58 (32,58 %)	49 (29,17 %)	57 (36,77 %)	
2	Kapal Terbakar	30 (16,85 %)	37 (22,02 %)	25 (16,12 %)	

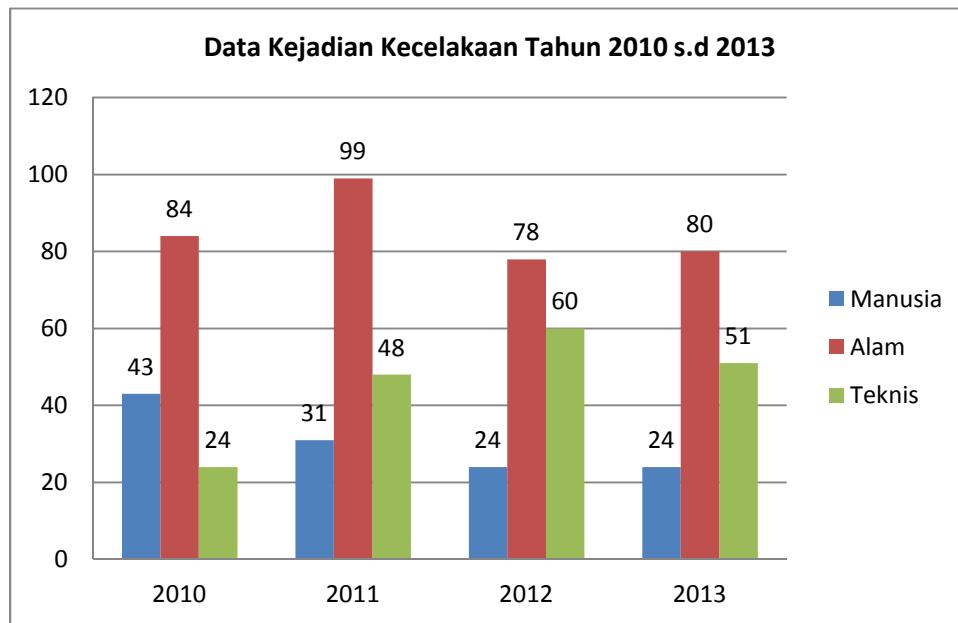


NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013
3	Kapal Tubrukan	14 (7,86 %)	20 (11,90 %)	19 (12,25 %)	
4	Kapal Kandas	35 (19,66 %)	38 (22,62 %)	37 (23,88 %)	
5	Kapal yg menyebabkan terancamnya Jiwa Manusia & Kerugian Harta Benda	41 (23,04 %)	24 (14,28 %)	17 (10,96 %)	
	Jumlah	178	168	155	
B	Korban & Kerugian				
1	Korban Jiwa ( Meninggal, Hilang )	343	150	150	
2	Kerugian Barang (Ton) ( Kendaran, Hewan )		1643		
C	Bendera Kapal				
1	Berbendera Indonesia		189 (94,97 %)	166 (93,78 %)	
2	Berbendera Asing		10 (5,03 %)	11 (6,21 %)	
	Jumlah	199	177		
D	Ukuran Kapal				
2	Kapal Gt < 7		13 (6,53 %)	10 (5,65 %)	
3	Kapal Gt 7 – 35		28 (14,07 %)	29 (16,38 %)	
4	Kapal Gt 35 – 500		68 (34,17%)	61 (34,47 %)	
5	Kapal Gt > 500		90 (45,22 %)	77 (43,51 %)	



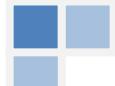
NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013
	Jumlah			199	177
E	Jenis Kapal				
1	Kapal Motor ( Km )			117 (88,94 %)	119 (67,24 %)
2	Motor Tanker (Mt)			3 (1,51 %)	11 (6,21 %)
3	Kapal Tradisional / Klm			29 (14,57 %)	16 (9,04 %)
4	Kapaltug Boat (Tb)			23 (11,56 %)	17 (9,61 %)
5	Kapal Tongkang (Barge)			27 (13,57 %)	14 (7,91 %)
	Jumlah			199	177
F	Dugaan Faktor penyebab				
1	Manusia	43 (28.48%)	31 (17,41 %)	24 (14,28 %)	24 (15,48 %)
2	Alam	84 (55.63%)	99 (55,62 %)	78 (46,42 %)	80 (51,61 %)
3	Teknis	24 (15.89%)	48 (26,92 %)	66 (39,28 %)	51 (32,91 %)
	JUMLAH	151	178	168	155





Ditjen Hubla telah berupaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Upaya-upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal
  - a. Penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten
  - b. Pemeriksaan saat diberikan SPB/Port Clear (Fisik, Dokumen, Jumlah dan Ijasah ABK) Termasuk muatan dan Penumpang
  - c. Patroli laut ditingkatkan (Pangkalan PLP dan Syahbandar)
  - d. Pemantauan kapal melalui Radio Pantai. (Ship Reporting System)
2. Tindakan Preventif Kecelakaan Kapal
  - a. Pemberitahuan Mapel Kepada Stakeholders Terkait.
  - b. Peningkatan Patroli Laut.
  - c. Diadakan Latihan-Latihan Diatas Kapal.
  - d. Penyuluhan Keselamatan Pelayaran.
3. Tindakan Represif Kecelakaan Kapal
  - a. Tindakan/ Hukuman Bagi Siapapun Penyebab Kecelakaan Kapal.
  - b. Penundaan Kapal Yang Overdraft/Lebih Penumpang.
  - c. Tindakan Keras Bagi Aparat Yang Tidak Disiplin.
  - d. Mencabut SIUP Bagi Perusahaan Yang Tidak Disiplin.



4. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal
  - a. Pemeriksaan Administratif (sesuai checklist), pemeriksaan kelengkapan dan validitas sertifikat dan surat-surat kapal;
  - b. Pemeriksaan fisik diatas kapal (sesuai checklist), pemeriksaan kondisi NTR serta pemuatan dan stabilitas kapal
5. Prasarana
  - 1) Pembangunan SBNP
  - 2) Pembangunan Kapal Navigasi
  - 3) Pembangunan Telekomunikasi Keselamatan Pelayaran
  - 4) Pembangunan dan rehabilitasi Kapal patroli
  - 5) Pengadaan peralatan CCTV
  - 6) Pengurukan alur pelayaran
  - 7) Peningkatan Pembangunan Faspel dan Kespel di Daerah terisolasi Terpencil , Kawasan Tertinggal dan Pulau-Pulau Terluar
  - 8) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Stasiun Radio Pantai
  - 9) Peningkatan Fasilitas Sarana Perangkatan dan Elektronika pada wilayah VTS
  - 10) Peningkatan Fasilitas LRIT
  - 11) Peningkatan Peralatan Komunikasi Marabahaya dan Keselamatan GMDSS dengan Menggunakan Jaringan Radio Terestrial Maupun Satelit
  - 12) Peningkatan Jumlah Dermaga Kapal Negara Kenavigasian Untuk Peningkatan Kesiagaan dan Mendukung Keandalan SBNP
  - 13) Peningkatan national data center (NDC) untuk LRIT
6. Sarana
  - 1) Pengawasan Pemeliharaan Kapal Secara Berkala dan Sewaktu-waktu
  - 2) Pengawasan dan Penyediaan Perlengkapan Navigasi Eletronika Kapal yang Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Jenis, Ukuran dan Daerah Pelayaran

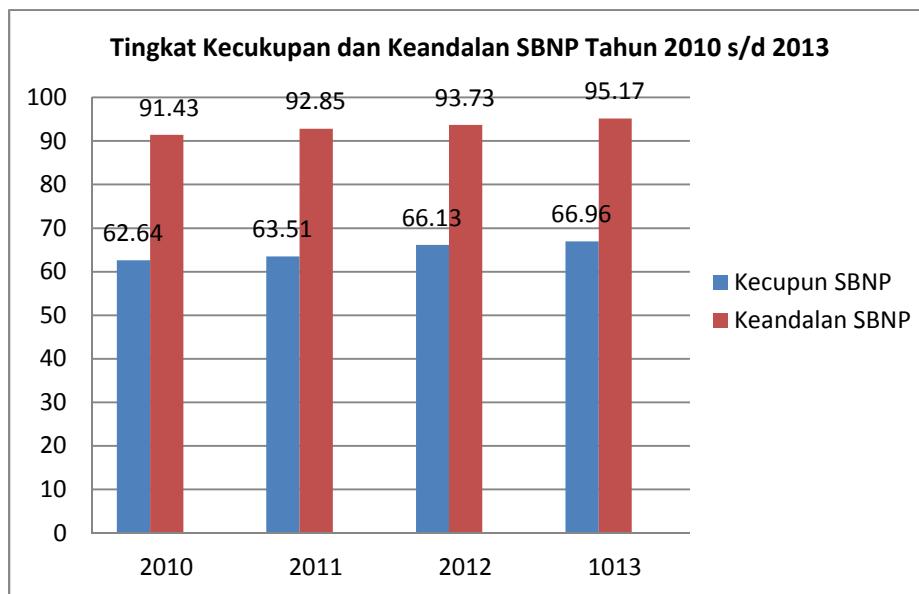


- 3) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Manajemen Keselamatan Kapal oleh Pemilik/Operator Kapal (Document of Compliance dan Safety Management Certificate)
  - 4) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Sarana Telekomunikasi Pelayaran
  - 5) Peningkatan aksesibilitas melalui pelayanan pelayaran angkutan laut perintis secara nasional (61 trayek) dan pembangunan kapal-kapal perintis
  - 6) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Kapal Negara (Patroli KPLP dan Kenavigasian)
  - 7) Penataan Alur dan Lokasi Perairan, Implementasi VTS dan Perumusan dan Penetapan Ketentuan Terkait dengan Keselamatan Pelayaran Sehubungan dengan Kegiatan Lepas Pantai
  - 8) Pengkajian Kelayakan dan Pengadaan Peralatan Pengamanan CCTV di Pelabuhan yang Terbuka bagi Pelayaran Luar Negeri dan Pelabuhan yang ditetapkan untuk melayani angkutan lebaran dan natal.
  - 9) Melakukan Kajian mengenai Pro Totipe Kapal-Kapal yang Mengangkut Penumpang dan Barang yang Sesuai untuk wilayah-Wilayah Tertentu
7. Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)  
Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP harus diperhatikan sesuai standard yang ditentukan dalam rangka menurunkan tingkat kejadian kecelakaan.



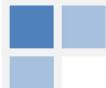
**Tabel 3.3**  
**Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP Tahun 2010 s/d 2013**

NO	URAIAN	TAHUN				PERTUMBUHAN		
		2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Tingkat Kecukupan SBNP	62,64 %	63,51 %	66,13 %	66,96 %	0,87 %	2,62 %	0,83 %
2	Tingkat Keandalan SBNP	91,43 %	92,85 %	93,73 %	95,17 %	1,42 %	0,88 %	1,44 %



Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan SBNP pada tahun 2013 masih rendah dan berada di bawah standard yang ada, dimana untuk tingkat kecukupan diharapkan dapat berada di atas 70 %. Demikian halnya tingkat kecukupan SBNP pada tahun 2010 s.d 2012 masih berada dibawah standard yaitu sekitar 60 %.

Sedangkan untuk tingkat keandalan standard minimal sebesar 95% dan pada tahun 2013 sudah dapat terpenuhi sesuai standard yang ada yaitu pencapaiannya sebesar 95,17% namun pada tahun 2010 s.d 2012 untuk tingkat kecukupan SBNP belum dapat terpenuhi sesuai dengan standard yang ada. Dengan demikian



untuk meningkatkan tingkat keandalan SBNP sesuai dengan standard yang ada diperlukan peningkatan alokasi anggaran pembangunan SBNP pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2013 Tingkat Kecukupan SBNP sebesar 66,96% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 66,13 % artinya terjadi peningkatan sebesar 0,83 % hal ini karena terdapat beberapa pemasangan SBNP. Pada tahun 2013 Tingkat Keandalan SBNP sebesar 95,17% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 93,73 % artinya terjadi peningkatan sebesar 1,36 %. Dan untuk mempertahankan tingkat keandalan SBNP sesuai standard yang ada tetap diperlukan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Dengan demikian pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk meningkatkan tingkat keandalan sedangkan untuk meningkatkan tingkat keandalan dengan meningkatkan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Jumlah SBNP yang terpasang sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3.541 terdiri dari milik Ditjen Hubla sebanyak 2.188 unit dan Non Ditjen Hubla sebanyak 1.353 unit. Adapun rincian SBNP yang dimiliki Ditjen Hubla dan Non Ditjen Hubla adalah sebagai berikut:

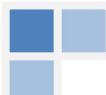
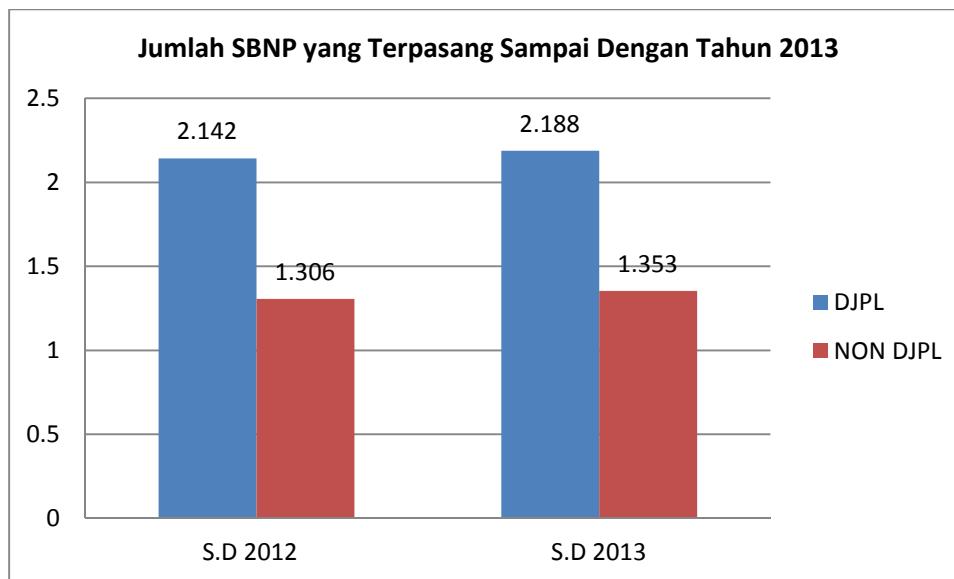
Tabel 3.4  
Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun 2010 s/d 2012

NO	JENIS	DJPL	NON DJPL	JUMLAH (unit)
1.	Menara Suar	279	-	279
2.	Rambu Suar	1.313	714	2.027
3.	Pelampung Suar	372	504	876
4.	Rambu Tanda Siang	138	69	207
5.	Anak Pelampung	40	19	59
	T O T A L	2.142	1.306	3.448



**Tabel 3.5**  
**Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun 2010 s/d 2013**

NO	JENIS	DJPL	NON DJPL	JUMLAH (unit)
1.	Menara Suar	281	-	281
2.	Rambu Suar	1.332	730	2.062
3.	Pelampung Suar	399	535	934
4.	Rambu Tanda Siang	140	69	209
5.	Anak Pelampung	36	19	55
	T O T A L	2.188	1.353	3.541



**Tabel 3.6**  
**Jumlah Kapal Negara Kenavigasian**

NO	JENIS KAPAL	JUMALH	
		THN 2012	THN 2013
1	Kapal Buoy Tender (kapal induk perambuan)	8	8
2	Kapal Aids Tender (Kapal Bantu Perambuan)	42	42
3	Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat Perambuan)	14	14
	T O T A L	64	64

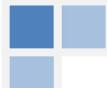
### Sasaran Strategis ( 2 )

“Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut”

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat	9.794 Sertifikat	124,76 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	9.298 Sertifikat (130,11 %)	9.794 Sertifikat (124,76 %)	Naik 5,35 %



3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal  
(cat : Pusat)

1. Penerbitan Sertifikat Terkait Pencegahan Kecelakaan

Salah satu upaya pencegahan kecelakaan adalah dengan Pengeluaran Sertifikat Kapal dan Penerbitan Sertifikat Lambung Timbul Kapal dalam Negeri dan Luar Negeri. Adapun Pengeluaran Sertifikat Kapal meliputi Keselamatan Konstruksi Kapal Barang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Radio Kapal Barang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Kapal Penumpang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC), Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah, Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah, Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah, Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah Koda dan Internasional, Dokumen Otorisasi, Sertifikat Pembebasan, Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya, Kelayakan Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi.

Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 496 sertifikat atau sebesar 5,33 % apabila dibanding tahun 2012 dimana pada tahun 2013 sebanyak 9.298 sertifikat sedangkan tahun 2013 sebanyak 9.794 sertifikat.

Sedangkan prosentase pencapaian target kinerja pada tahun 2013 sebesar 124,76 dimana target sebanyak 7.850 sertifikat sedangkan realisasi sebanyak 9.794 sertifikat.

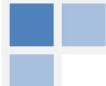
Peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2013 terdapat pada sertifikat kapal Non Solas. Hal ini terkait adanya pemberlakuan Azas Cabotage dan terdapat Pemberlakukan NCVS (Non Convention Vessel Standard) pada tahun 2013 yaitu ketentuan khusus untuk kapal yang



berlayar di dalam negeri. Jumlah dan jenis sertifikat yang diterbitkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Penerbitan Sertifikat Kapal Tahun 2010 S/D 2013**

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH				KET
		2010	2011	2012	2013	
I.	Pengeluaran Sertifikat Kapal					
1	Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (NON SOLAS)	80 563	293 2.398	350 3.096	344 3.208	
2	Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (NON SOLAS)	76 306	276 1267	336 1687	333 1.889	
3	Keselamatan Radio Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Radio Kapal Barang (NON SOLAS)	76 255	300 1389	358 1749	348 1.922	
4	Keselamatan Kapal Penumpang (SOLAS) Keselamatan Kapal Penumpang (NON SOLAS)	0 10	0 54	10 58	4 51	
5	Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC)	11	299	299	298	
6	Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	33	155	368	320	
7	Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah	28	112	142	118	
8	Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah	21	60	93	98	
9	Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Koda) Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Internasional)	11 0	44 16	59 53	45 48	
10	Dokumen Otorisasi	9	42	56	57	
11	Sertifikat Pembebasan	31	96	115	103	
12	Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	95	343	464	602	
13	Kelayakan Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	0	2	5	6	



NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH				KET
		2010	2011	2012	2013	
11.	Penerbitan Sertifikat Lambung Timbul Kapal					
1	Dalam Negeri	209	239			
2	Luar Negeri	36	62			
	TOTAL	1.850	7.447	9.298	9.794	

Tingkat perkembangan pengeluaran setifikat Kepelautan tahun 2013 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 akan diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.8  
Perkembangan Penerbitan Sertifikat Kepelautan Tahun 2010 – 2013

NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012	2013
<b>I . Sertifikat Ahli Nautika</b>					
1	ANT - I	511	418	454	381
2	ANT - II	1.311	1.001	867	706
3	ANT - III	1.175	1.047	1.015	1.359
4	ANT - IV	1.406	1.178	1.287	1.095
5	ANT - V	2.116	2.668	3.147	4.143
6	ANT - D	12.360	14.644	12.899	7.882
	TOTAL	18.879	20.956	19.669	15.566
<b>II. Sertifikat Ahli Teknika</b>					
1	ATT - I	416	367	390	402
2	ATT - II	1.103	788	628	696
3	ATT - III	1.125	1.040	1.070	1.168
4	ATT - IV	1.091	1.082	1.161	924
5	ATT - V	1.432	1.880	2.189	2.579
6	ATT - D	6.461	7.960	6.907	4.485
	TOTAL	11.628	13.117	12.345	10.254
<b>III. Sertifikat Keahlian Kapal Ikan</b>					
1	ANKAPIN I	150	116	137	122
2	ANKAPIN II	474	756	714	484



NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012	2013
3	ANKAPIN III	1.417	1.018	1.064	891
	TOTAL	2.041	1.890	1.915	1.497
4	ATKAPIN I	147	67	89	84
5	ATKAPIN II	380	491	553	361
6	ATKAPIN III	697	252	314	234
	TOTAL	1.224	810	956	679
<b>IV. Pengeluaran Buku Pelaut</b>					
1	Penggantian	1.219	1.601	1.987	1.980
2	Buku Baru	3.871	5.529	5.864	5.911
3	Perpanjangan	3.552	3.217	4.500	
<b>V. Penyijilan Awak Kapal</b>					
	PKL Asing	8.436	8.792	10.767	2.164
	PKL Nasional	598	978	3.325	15.335
<b>VI. Pengukuhan Keahlian Teknika</b>					
	ATT – I	263	616	728	745
	ATT – II	817	1.260	1.062	1.175
	ATT – III	519	2.499	2.839	2.560
	ATT - IV	1.150	1.900	2.328	1.872
	ATT - V	1.927	3.178	4.137	4.484
	TOTAL	4.676	9.453	11.094	10.836
<b>VII. Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika</b>					
	ANT – I	353	773	956	840
	ANT – II	886	1.513	1.299	1.190
	ANT – III	1.786	2.305	2.820	2.782
	ANT - IV	965	2.220	2.763	2.274
	ANT - V	1.665	4.189	5.290	6.239
	TOTAL	5.655	11.000	13.128	13.325



## 1) Sertifikat Ahli Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 26,35 % apabila dibanding tahun 2012, dimana pada tahun 2012 sebanyak 19.669 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 15.566 artinya pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami penurunan sebanyak 4.103 sertifikat.

## 2) Sertifikat Ahli Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika tahun 2013 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I s/d V mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3) Sertifikat Keahlian Kapal Ikan

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Keahlian Kapal Ikan Tahun 2013 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2013 pengeluaran Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN I s/d III mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 4) Pengeluaran Buku Pelaut

Perkembangan pemberian Buku Pelaut. Jenis pengeluaran buku pelaut tahun 2013 untuk permintaan Buku Pelaut Baru, Penggantian Buku Pelaut dan perpanjangan buku pelaut ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

## 5) Penyijilan Awak Kapal

Tingkat perkembangan Penyijilan Awak Kapal pada tahun 2013. Jumlah Penyijilan Awak Kapal yang bekerja di kapal asing meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kapal nasional juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



6) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika sesuai STCW 1978 Amandemen 1995. Jumlah Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika I s/d V pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Nautika tahun 2013 sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2013 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

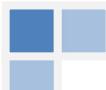
## II. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah"

Sasaran Strategis (3)

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	79 Rute Perintis	98,75 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan	386 Pelabuhan	100 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis (100 %)	79 Rute Perintis (98,75 %)	
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan (98,22 %)	386 Pelabuhan (100 %)	

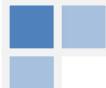
#### 4. Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut

Pencapaian indikator kinerja Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut adalah sebesar 98,75 % dimana target sebanyak 80 rute sedangkan realisasi sebanyak 79 rute. Adapun rute perintis yang tidak dilayani adalah R-56 pangkalan Jayapura disebabkan gagal lelang karena tidak ada perusahaan mendaftar atau berminat. Dengan demikian pada tahun 2013 terdapat penurunan pencapaian sebesar 1 rute atau terdapat penurunan sebesar 1,25 % jika dibanding dengan tahun 2012. Adapun rincian rute perintis dapat disampaikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.6**  
**Data Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal**  
**Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013**

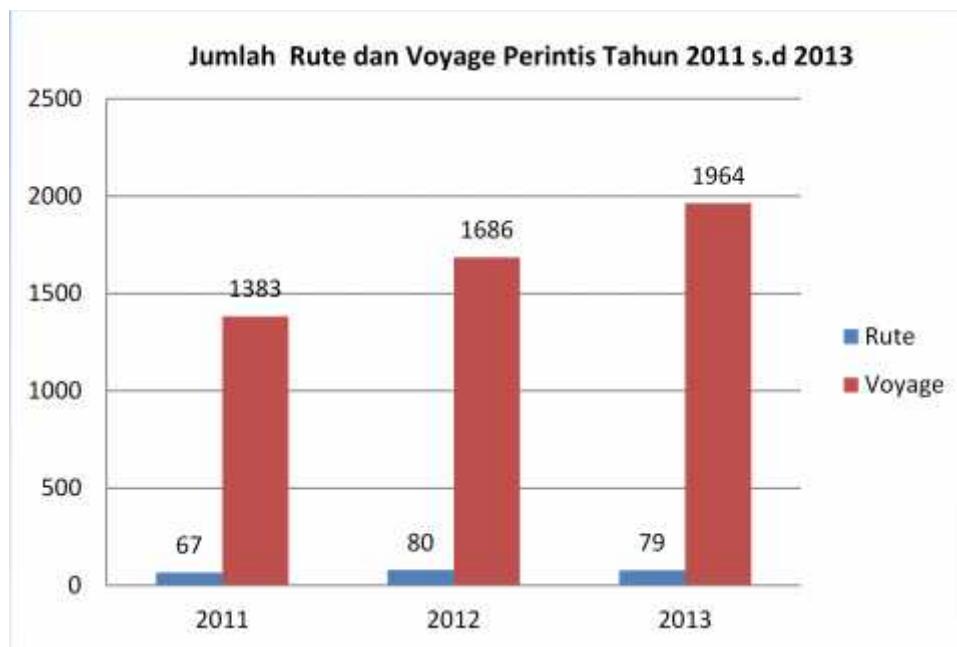
NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
1.	MEULABOH	R – 1	18	R – 1	18	R – 1	26
2.	TELUK BAYUR	R – 2	20	R – 2	20	R – 2	19
		R – 3	20	R – 3	20	R – 3	19
3.	BENGKULU	R – 4	26	R – 4	26	R – 4	23
4.	TG. PINANG	R – 5	33	R – 5	33	R – 5	33
		R – 6	37	R – 6	37	R – 6	41
5.	SINTETE	R – 7	28	R – 7	28	R – 7	30
		R – 8	22	R – 8	22	R – 8	23
6.	KOTABARU	R – 9	28	R – 9	28	R – 9	30
7.	SUKAMARA	R – 10	33	R – 10	33	R – 10	33
8.	SURABAYA	R – 11	26	R – 11	26	R – 11	26
9.	TG. WANGI	R – 12	26	R – 12	26	R – 12	26
10	BIMA	R – 13	26	R – 13	26	R – 13	26
		R – 14	21	R – 14	21	R – 14	19
11	KUPANG	R – 15	18	R – 15	24	R – 15	24
				R – 68	11		
				R – 69	10		
		R – 16	22	R – 16	22	R – 16	26
		R – 17	22	R – 17	22	R – 17	41
		R – 18	20	R – 18	20	R – 18	33
12	MAUMERE					R – 19	26
						R – 20	37
13	BITUNG	R – 19	20	R – 19	20	R – 21	26
		R – 20	23	R – 20	23	R – 22	26
14	TAHUNA	R – 21	23	R – 21	23	R – 23	26
		R – 22	22	R – 22	22	R – 24	22
15	PAGIMANA	R – 23	16	R – 23	16	R – 25	22
16	KOLONEDALE	R – 24	16	R – 24	16	R – 26	23
17	KENDARI	R – 25	22	R – 25	22	R – 27	23
		R – 26	21	R – 26	21	R – 28	20
18	TILAMUTA	R – 27	17	R – 27	17	R – 29	23
		R – 28	20	R – 28	20	R – 30	22
19	KWANDANG					R – 31	28
20	MAKASSAR	R – 29	23	R – 29	23	R – 32	23
21	MAMUJU	R – 30	19	R – 30	19	R – 33	23



NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
22	AMBON	R - 32	18	R - 32	18	R - 34	21
		R - 33	16	R - 33	18	R - 35	19
				R - 70	9	R - 36	24
				R - 71	9	R - 37	18
				R - 72	9	R - 38	23
		R - 34	14	R - 34	14	R - 39	23
		R - 35	20	R - 35	20	R - 40	22
		R - 36	23	R - 36	23		
23	TUAL	R - 36	17	R - 36	17	R - 41	17
		R - 37	15	R - 37	15	R - 42	19
				R - 73	14	R - 43	24
				R - 74	17	R - 44	20
24	SAUMLAKI	R - 38	17	R - 38	17	R - 45	24
		R - 39	17	R - 39	17	R - 46	19
				R - 38	27	R - 47	22
				R - 75	11	R - 48	20
				R - 76	9		
25	TERNATE	R - 40	22	R - 40	22	R - 49	26
		R - 41	18	R - 41	18	R - 50	26
		R - 42	17	R - 42	17	R - 51	20
				R - 77	11	R - 52	21
26	BABANG	R - 43	18	R - 43	18	R - 53	21
27	SANANA	R - 45	19	R - 45	19	R - 54	26
		R - 46	24	R - 46	24	R - 55	26
28	JAYAPURA	R - 47	30	R - 47	30	R - 56	31
		R - 48	34	R - 48	34	R - 57	31
		R - 49	28	R - 49	28	R - 58	24
		R - 50	28	R - 50	28	R - 59	26
						R - 60	29
29	BAIK	R - 51	24	R - 51	24	R - 61	24
		R - 52	30	R - 52	30	R - 62	31
		R - 53	25	R - 53	25	R - 63	24
30	MERAUKE	R - 54	21	R - 54	21	R - 64	21
		R - 55	19	R - 55	24	R - 65	29
				R - 78	13	R - 66	24
		R - 56	22	R - 56	22	R - 67	23
		R - 57	22	R - 57	22	R - 68	24
		R - 58	15	R - 58	15	R - 69	23
		R - 59	21	R - 59	21	R - 70	30



NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
31	MANOKWARI	R - 60	23	R - 60	23	R - 71	23
		R - 61	34	R - 61	34	R - 72	31
		R - 62	26	R - 62	26	R - 73	28
		R - 63	27	R - 63	27	R - 74	29
32	SORONG	R - 64	23	R - 64	23	R - 75	25
		R - 65	23	R - 65	23	R - 76	23
		R - 66	19	R - 66	19	R - 77	26
		R - 67	26	R - 67	26	R - 78	21
				R - 78	19	R - 79	22
				R - 79	11	R - 80	24
				R - 80	10		



Dari table di atas dapat disampaikan bahwa terdapat perubahan-perubahan jumlah rute dan voyage pada beberapa pangkalan selama tahun 2012 dan 2013 yaitu:

#### Pangkalan Kupang

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Kupang mempunyai jumlah rute sebanyak 6 (enam) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 4 (empat) rute dimana rute yang dihilangkan yaitu R-68 dan R-69.



### Pangkalan Maumere

Tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan perintis pada pangkalan Maumere namun pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan perintis sebanyak 2 (dua) rute yaitu R-19 sebanyak 26 Voyage dan R-20 sebanyak 37 Voyage.

### Pangkalan Kwandang

Tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan perintis pada pangkalan Kwandang namun pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan perintis sebanyak 1 (satu) rute yaitu R-31 sebanyak 28 Voyage.

### Pangkalan Ambon

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Ambon mempunyai jumlah rute sebanyak 8 (delapan) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 7 (tujuh) rute dimana rute yang dihilangkan yaitu R-36 sebanyak 8 Voyage.

### Pangkalan Jayapura

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Jayapura mempunyai jumlah rute sebanyak 4 (empat) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 5 (lima) rute dimana rute yang bertambah yaitu R-60 sebanyak 29 Voyage dan terdapat rute yang tidak beroperasional karena gagal lelang yaitu R-56 dengan jumlah voyage sebanyak 3 Voyage.

### Pangkalan Sorong

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Sorong mempunyai jumlah rute sebanyak 7 (tujuh) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 6 (enam) rute dimana rute yang dihilangkan yaitu R-80 dengan jumlah voyage sebanyak 10 Voyage.

### Total Jumlah Rute dan Voyage

Tahun 2012 total penyelenggaraan perintis mempunyai jumlah rute sebanyak 80 rute dengan jumlah 1.686 Voyage sedangkan pada tahun 2013 mempunyai pencapaian jumlah rute sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) rute dengan jumlah 1.964 Voyage sehingga terdapat penurunan jumlah rute sebanyak 1 (satu) rute namun untuk jumlah Voyage mengalami peningkatan sebanyak 278 Voyage.



Pada TA. 2013 Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis terdapat 80 Rute yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.108/1/10/DJPL-12 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Aggaran 2013 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 5 November 2012. Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani oleh kapal perintis diharapkan meningkat pada masa yang akan datang, sehingga dapat membuka aksesibilitas daerah terisolir dan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah perbatasan. Sedangkan daerah terluar dan perbatasan yang merupakan beranda depan wilayah Indonesia terhadap negara yang berbatasan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan keutuhan bangsa, ketahanan nasional serta meningkatkan potensi ekonomi pada wilayah tersebut.

5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 98,19 % artinya dari target sebanyak 386 pelabuhan yang dilayani terealisasi sebanyak 379 pelabuhan. Hal ini terjadi karena terdapat 1 (satu) rute perintis yang tidak dilayani yaitu R-56 pangkalan Jayapura disebabkan gagal lelang karena tidak ada perusahaan yang mendaftar atau berminat. Adapun jumlah pelabuhan yang terdapat pada rute tersebut (R-56) Pangkalan Jayapura sebanyak 7 Pelabuhan.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat penurunan pencapaian kinerja sebesar 1,25 % artinya pada tahun 2012 rute yang dilayani sebanyak 80 rute sedangkan tahun 2013 menjadi 79 rute.



### III. SASARAN III

"Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut"

Sasaran Strategis (4)

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

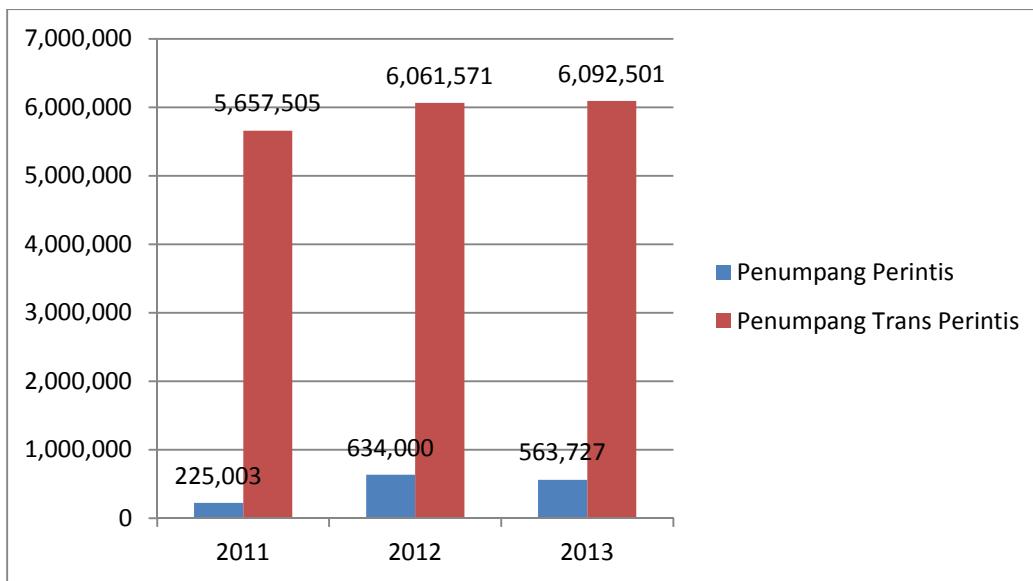
Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang	6,092,501 Orang	91,47 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang	563,727 Orang	88,92 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton	368.297.016 Ton	108,00%
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %	99,68 %	100,97%
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton	67.511.610 Ton	106,82%
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %	10,91 %	105,61%



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang (120,56%)	6,092,501 Orang (91,47 %)	Turun 29,09 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang (100,66%)	563,727 Orang (88,92%)	Turun 11,74 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton (107,54%)	368.297.016 Ton (108,00%)	Naik 0,46 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 % (100,05%)	99,68% (100,97 %)	Naik 0,78 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton (100,59%)	67.511.610 Ton (106,82%)	Naik 6,23 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 % (118,00%)	10,91 % (105,61%)	Turun 12,39 %





6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;

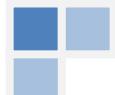
Pada tahun 2013 Pencapaian Kinerja sebesar 91,47 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 6,660,000 orang realisasi sebanyak 6,092,501 orang. yang artinya terdapat penurunan sebesar 567,499 orang.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat penurunan pencapaian kinerja sebesar 29,09 % artinya dari realisasi Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 6,660,000 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 6,092,501.

Tabel 3.6

Perkembangan Angkutan Penumpang Transportasi Laut Tahun 2008 – 2013

NO	TAHUN	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)
1	2008	7.197.890
2	2009	7.664.753
3	2010	5.096.851
4	2011	5.657.505
5	2012	6.061.571
6	2013	6,092,501



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah penumpang dalam negeri peningkatan sebesar 99,49.

- 7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis;  
Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 88,92% artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 634.000 orang terdapat realisasi sebanyak 563,727 orang.  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat penurunan pencapaian kinerja sebesar Turun 11,74 % artinya dari realisasi Jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 634.000 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 563,727.
- 8) Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional  
Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 108,00 % artinya dari target jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebanyak 341.000.000 Ton terdapat realisasi sebanyak 368.297.016 Ton.  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja sebesar naik 0,46 % artinya dari realisasi Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebanyak 341.000.000 Ton sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 368.297.016 Ton.
- 9) Persentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;  
Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 100,97 % artinya dari target persentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,90 % terdapat realisasi sebesar 99,68 %.  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja sebesar naik 0,38 % artinya dari realisasi persentase pangsa



muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,90 % sedangkan pada tahun 2013 sebesar 99,68 %.

10) Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 106,82% artinya dari target jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 63.200.000 terdapat realisasi sebesar 67.511.610.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja sebesar naik 6,23 % artinya dari realisasi persentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 63.200.000 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 67.511.610.

11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 105,61% artinya dari target Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 10,33 % terdapat realisasi sebesar 10,91 %.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja turun sebesar 12,39 % artinya dari realisasi Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 118,00% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 105,61%.

### III. SASARAN STRATEGIS ( 5 )

Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang

12) Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan;

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:



NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	60 Menit	104 Menit	173,33 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	351 menit	104 Menit (173,33 %)	

Beberapa data kinerja yang berpengaruh terhadap Pencapaian Turn-Around Time (TRT) meliputi yaitu data Kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET) dan Berthing Time (BT), namun perhitungan Turn-Around Time (TRT) Pada tahun 2013 menggunakan data kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET)

Pencapain kinerja penurunan Turn-Around Time (TRT) pada tahun 2013 sebesar 173,33% artinya dari target Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan sebesar 104 menit terdapat realisasi sebesar 60 menit.

Pencapain kinerja tahun 2013 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena data yang ada pada tahun 2012 Turn-Around Time (TRT) secara total atau bukan data penurunan, dan data TRT yg tersedia hanya pada 5 (lima) pelabuhan dan mempunyai rata-rata sebesar 87,94 Jam/Kapal.



## SASARAN STRATEGIS ( 6 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	37 Pelabuhan	77,08 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	26 Pelabuhan	54,16 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	37 Pelabuhan (77,08 %)	
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	36 Pelabuhan (75,00 %)	
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	15 Pelabuhan (31,25 %)	26 Pelabuhan (54,16 %)	

- 13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

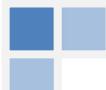
Tabel berikut adalah daftar pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Sesuai Dengan SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/38/18/DJPL-11

Pada tahun 2013 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 77,08 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat sebanyak 37 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan sedangkan pada tahun 2012 pencapaian Waiting Time (WT) sebesar 75,00% atau naik sebesar 1,92% dari tahun 2012.



**Tabel 3.8**  
**Data Kinerja Operasional Pelabuhan Tahun 2013**

NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
1	Belawan			
2	Dumai			
3	Sibolga			
4	Lhokseumawe			
5	Pekanbaru			
6	Tanjung Pinang			
7	Tanjung Priok			
8	Panjang			
9	Palembang			
10	Teluk Bayur			
11	Pontianak			
12	Banten			
13	Tg. Perak			
14	Tg. Emas			
15	Banjarmasin			
16	Benoa			
17	Tenau/ Kupang			
18	Tanjung Intan			
19	Makassar			
20	Balik Papan			
21	Samarinda			
22	Bitung			
23	Ambon			
24	Jayapura			



NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
25	Sunda kelapa			
26	Bengkulu			
27	Pangkal Balam			
28	Tg Pandan			
29	Cirebon			
30	Jambi			
31	Gersik			
32	Tg Wangi			
33	Kota Baru			
34	Sampit			
35	Gorontalo			
36	Pantoloan			
37	Manado			
38	Toli-Toli			
39	Biak			
40	Nunukan			
41	Sorong			
42	Parepare			
43	Kendari			
44	Tarakan			
45	Merauke			
46	Manokwari			
47	Fak-Fak			
48	Ternate			



- 14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja pelabuhan yang memenuhi pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 75,00 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat sebanyak 36 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang memenuhi pencapaian Approach Time (AT) sesuai standard yang ada 36 Pelabuhan sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 36 Pelabuhan.

- 15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja pelabuhan yang memenuhi pencapaian Effective Time (ET) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 54,17 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat sebanyak 26 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang memenuhi pencapaian Effective Time (ET)/(BT) sesuai standard yang ada 15 Pelabuhan sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 36 Pelabuhan atau meningkat sebanyak 21 (dua puluh satu) pelabuhan.

Pada tahun 2013 data yang dimiliki hanya pada 48 pelabuhan strategis yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.9 Kinerja Pelayanan Kapal Tahun 2011 – 2013

NO	Pelabuhan	Standar Kinerja			2012			2013		
		WT Jam	AT Jam	ET:BT ( % )	WT Jam	AT Jam	ET:BT ( % )	WT Jam	AT Jam	ET:BT ( % )
1.	Belawan	1	2	70	1,17	1,27	72,61	0.76	2.58	73.39
2.	Dumai	2	6	80	1,27	4,95	72,23	1.85	5.11	84.04
3.	Sibolga	1	1	70	0,00	0,00	9,70	-	-	11.20
4.	Lhok Seumawe	1	1	80	0,25	0,85	74,01	0.26	1.00	78.00
5.	Pekanbaru	2	12	70	0,22	8,17	49,40	0.19	7.98	44.10
6.	Tanjung Pinang	1	1	70	-	1,30	21,34	0	1,50	16.40
7.	Tg. Priok	1	2	80	0,75	1,00	87,18	0.24	0.62	76.76
8.	Panjang	1	1	80	0,44	0,59	62,25	0.45	0.41	63.00
9.	Palembang	1	8	80	0,13	6,25	51,40	0.12	6.33	52.00
10.	Teluk Bayur	1	1	70	0,23	0,63	54,62	0.01	0.93	63.96
11.	Pontianak	1	5	80	0,08	3,38	47,18	0.06	3.37	54.34
12.	Banten	1	1	80	1,00	1,10	83,72	1.00	1.10	85.39
13.	Tg. Perak	2	4	80	0,25	0,90	79,49	1.36	3.37	67.89
14.	Tg. Emas	1	1	80	0,28	0,59	68,37	0.21	0.59	94.43
15.	Banjarmasin	2	4	80	0,78	2,97	70,95	0.70	2.71	75.00
16.	Benoa	1	1	70	0,14	0,35	53,58	0	1.00	24.75
17.	Tenau/Kupang	2	1	70	-	0,23	47,71	0.42	0.40	76.80
18.	Tanjung Intan	1	2	70	0,00	3,02	60,67	0.03	2.48	65.76
19.	Makassar	1	1	80	0,54	1,58	80,72	0.13	1.46	70.12
20.	Balikpapan	1	2	80	1,43	1,63	76,72	0.10	0.59	70.00
21.	Samarinda	1	5	80	2,34	4,63	74,85	0.30	4.00	55.00
22.	Bitung	1	2	70	0,50	1,38	64,84	0.70	1.00	48.17
23.	Ambon	1	2	70	1,15	1,63	66,72	0.16	0.43	76.82
24.	Jayapura	1	12	70	0,50	0,68	63,72	0.90	1.00	67.00
25.	Sunda Kelapa	1	2	-	-	-	52,92	-	-	54.20
26.	Bengkulu	1	2	-	0,23	0,35	73,53	0.23	0.37	74
27.	Pangkal Balam	1	2	-	1,00	1,00	75,12	1.00	0.92	55.62
28.	Tg. Pandan	1	2	-	0,17	0,61	20,18	0.084	0.29	22.47
29.	Cirebon	1	2	-	-	1,59	45,12	-	1.66	53.45
30.	Jambi	1	2	-	0,43	28,3	38,67	0.10	30.29	45.85
31.	Gresik	1	2	-	1,50	1,13	59,75	1.10	1.75	59.60
32.	Tg. Wangi	1	2	-	0,77	0,75	89,98	0.22	0.77	62.02
33.	Kota Baru	1	2	-	-	-	-	-	-	-
34.	Sampit	1	2	-	-	-	-	-	-	-
35.	Gorontalo	1	2	70	0,54	1,58	70,72	0.54	1.58	70.72
36.	Pantoloan	1	2	70	0,16	1,58	69,49	0.24	0.76	80.09
37.	Manado	1	2	70	0,77	1,58	69,49	0.77	1.85	33.33
38.	Tolitoli	1	2	70	0,72	1,63	64,00	-	-	59.00
39.	Biak	1	2	70	0,47	1,54	63,00	0.70	1.00	71.79
40.	Nunukan	1	2	70	0,73	2,63	61,92	0.40	0.70	71.50
41.	Sorong	1	2	70	9,08	1,08	54,53	1.00	1.00	54.00
42.	Parepare	1	2	70	0,98	2,63	60,72	1.36	0.51	23.83
43.	Kendari	1	2	70	0,66	1,65	67,08	6.10	2.27	70.96
44.	Tarakan	1	2	70	1,58	2,00	38,82	2.71	3.28	42.45
45.	Merauke	1	2	70	0,87	1,82	51,18	2.00	2.20	57.00
46.	Manokwari	1	2	70	0,90	1,75	91,38	0.64	0.88	59.00
47.	Fakfak	1	2	70	0,90	1,92	73,72	0.80	1.90	73.68
48.	Ternate	1	2	70	0,95	0,68	80,47	0.40	0.50	55.95



#### IV. SASARAN IV

"Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi"

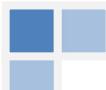
##### SASARAN STRATEGIS ( 7 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENT ASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut			
	Pelelangan	2	2	100,00 %
	Perizinan	-	-	-
	Konstruksi	-	-	-
	Operasional	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut			
	Pelelangan	2 (100,00 %)	2 (100,00 %)	



16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut

Pada tahun 2013 terdapat kerjasama yang sudah pada tahap pelelangan yaitu Tanah Ampo dan Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS) sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100% atau sesuai target yang ada sebanyak 2 kerja sama.

Pada tahun 2012 terdapat kerjasama yang sudah pada tahap pelelangan yaitu Tanah Ampo dan Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS) sehingga pada tahun 2013 tidak terdapat penambahan kerjasama.

#### V. SASARAN ( 5 )

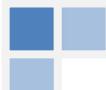
"Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi"

Sasaran Strategis ( 8 )

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

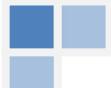
Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	60 Orang	100,00 %
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang	427 Orang	100,00 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100,00 %



22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang	30 Orang	150,00%
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang	50 Orang	250,00%
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	30 Orang	150,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	
18	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	59 Orang (98,33 %)	60 Orang (100,00 %)	
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang (100,00 %)	427 Orang (100,00 %)	
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	
22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	



23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	50 Orang (250,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

### Sasaran Strategis (8)

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

#### 17. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga Marine Inspector A sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 60 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga Marine Inspector A yang mengikuti diklat sebanyak 60 orang dan mempunyai jumlah yang sama dengan tahun 2013 sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkata Tenaga Marine Inspektor A sebanyak 120 orang pada dua tahun terakhir

#### 18. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga Marine Inspector B sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 120 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga Marine Inspector B yang mengikuti diklat sebanyak 120 orang dan mempunyai jumlah yang sama dengan tahun 2013 sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkata Tenaga Marine Inspektor B sebanyak 240 orang pada dua tahun terakhir.



19. Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga PPNS sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 60 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga PPNS sebanyak 59 orang sedangkan tahun 2013 sebanyak 60 orang sehingga terdapat peningkatan tenaga PPNS sebanyak 119 orang pada dua tahun terakhir.

20. Jumlah Tenaga PPNS;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga PPNS sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 427 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga PPNS sebanyak 367 orang sedangkan tahun 2013 sebanyak 427 orang sehingga terdapat peningkatan tenaga PPNS sebanyak 60 orang

21. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang sehingga pencapaian kinerjanya 100 %.

pada tahun 2012 pencapaian tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 Orang dan pada tahun 2013 sebanyak 60 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 120 orang pada dua tahun terakhir.

22. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang sehingga pencapaian kinerjanya 100 %.

pada tahun 2012 pencapaian tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 Orang dan pada tahun 2013 sebanyak 120 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 240 orang pada dua tahun terakhir.



23. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 30 orang, dimana kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 20 orang sehingga pencapaian kinerjanya 150 %. pada tahun 2012 tidak terdapat diklat tenaga penanggulangan pencemaran dan pada tahun 2013 sebanyak 30 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 30 orang pada dua tahun terakhir.

24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 50 orang, dimana kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 20 orang sehingga pencapaian kinerjanya 250 %. pada tahun 2012 tidak terdapat diklat tenaga penanggulangan kebakaran dan pada tahun 2013 sebanyak 50 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 50 orang pada dua tahun terakhir.

25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga penyelam sebanyak 20 orang, dimana kebutuhan tenaga penyelam sebanyak 30 orang sehingga pencapaian kinerjanya 150 %. pada tahun 2012 tidak terdapat diklat tenaga penyelam dan pada tahun 2013 sebanyak 30 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga penyelam sebanyak 30 orang pada dua tahun terakhir.



### Sasaran Strategis ( 9 )

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,

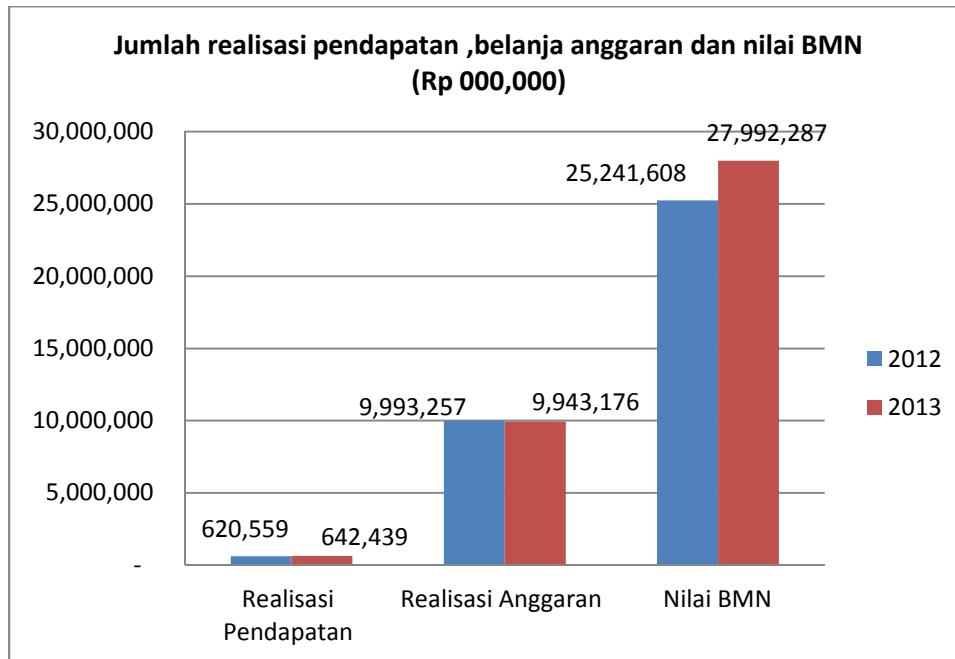
Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00	80,26	97,88 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000	Rp. 642.438.699.393	207,89 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000	Rp. 9.943.176.487	103,54 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824	Rp. 27.992.287.146.185	84,54 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00 (100,00 %)	80,26 (97,88 %)	Naik 2,26 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 620.558.927.453 (187,21 %)	Rp. 642.438.699.393 (207,89 %)	Naik Rp 21,877,771,940
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.993.257.136.888 (86,52 %)	Rp. 9.943.176.487.000 (103,54 %)	Naik 50,080,649,888
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 25.241.607.641.062 (94,61 %)	Rp. 27.992.287.146.185 (84,54 %)	Naik 2,750,679,505,123





#### 26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:

Pencapaian kinerja hasil nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2013 sebesar 97,88 % artinya dari target nilai sebesar 82,00 yang dapat terpenuhi hanya sebesar 80,26.

Pada tahun 2012 pencapaian nilai AKIP Ditjen Hubla sebesar 78,00 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 80,26 sehingga terdapat kenaikan sebesar 2,26 dari tahun 2012.

#### 27. Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pencapaian kinerja Pada tahun 2013 sebesar 207,89 % artinya dari target jumlah pendapatan sebesar Rp. 309.026.100.000 dapat tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. 642.438.699.393.

Pada tahun 2012 pencapaian pendapatan sebesar Rp. 620.558.927.453 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 642.438.699.393 atau naik sebesar Rp. 21,877,771,940 dari tahun 2012.



**28. Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pencapaian kinerja Pada tahun 2013 sebesar 103,54 % artinya dari target jumlah realisasi belanja anggaran sebesar Rp. 9.603.042.171.000 terdapat realisasi sebesar Rp. 9.943.176.487.000.

Pada tahun 2012 pencapaian realisasi belanja anggaran sebesar Rp.9.993.257.136.888 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 9.943.176.487.000 atau naik sebesar Rp. 50,080,649,888 dari tahun 2012.

**29. Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pencapaian kinerja Pada tahun 2013 sebesar 84,54 % artinya dari target jumlah nilai BMN sebesar Rp.33.110.421.564.824 terdapat realisasi sebesar Rp.27.992.287.146.185.

Pada tahun 2012 pencapaian nilai BMN sebesar 25.241.607.641.062 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 27.992.287.146.185 atau naik sebesar Rp. 2,750,679,505,123

**X. SASARAN STRATEGIS ( 10 )**

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	3	3	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	1 (100 %) 8 (100 %) 2 (100 %)	3 (100 %) - -	



### 30. Jumlah penyelesaian regulasi

Pada tahun 2013 direncanakan akan menyelesaikan 3 ( tiga ) RPP dan seluruhnya teralisasi, RPP yang terealisasi adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Pada tahun 2012 terealisasi 1 RPP yaitu RPP Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), 8 RPM dan 2 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## VI. SASARAN 6

Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

Sasaran Strategis ( 11 )

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,5252 Mega Ton	0,3939 Mega Ton	%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,102 Mega Ton (21,00 %)	0,3939 Mega Ton	0.2919

### 31. Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut:

Pada tahun 2013 Ditjen Hubla hanya mampu menurunkan emisi gas buang (CO2) dari kapal-kapal yang beroperasional sebesar 0,3939 mega ton dari target penurunan sebesar 0,525 mega ton sehingga pencapaiannya hanya sebesar



75,00%. Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain pengehematan penggunaan BBM dan penerbitan sertifikasi kapal melalui dikeluarkannya sertifikat International Air Pollution Prevention (IAPP) sedangkan target yang belum tercapai sebesar 25 % adalah bersumber dari faktor pendukung yaitu implementasi Ecoport di Pelabuhan karena sampai saat ini Ditjen Hubla belum dapat menentukan berapa besar penurunan emisi yang diakibatkan dari pelaksanaan Ecoport di pelabuhan.

Hal ini diatur dalam Konvensi MARPOL 73/78 Anex ke VI yang terkait dengan bahan bakar yang digunakan. Sertifikat IAPP merupakan sertifikat yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari operasional kapal.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III-IV MARPOL dengan Perpres No. 29 Tahun 2012. Jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib). Pada saat ini telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Jumlah kepemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2013 sebanyak 1.196 sertifikat dengan target sebanyak 10.208 kapal yang harus disertifikasi.

Adapun perhitungan penurunan emisi sbb:

TABEL

Perhitungan Emisi Gas Buang (CO<sub>2</sub>) Transportasi Laut

Tahun	Total GT Tiap Tahun	Total Emisi Karbon (Mega Ton)	Target Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun	Target Penurunan Emisi (Mega Ton)
2009	8,456,364.00	24.39	-	-
2010	10,347,436.00	27.80	-	-
2011	10,994,942.00	29.70	-	-
2012	11,654,639	32.36	1.5%	0.4853
2013	12,353,917	35.01	1.5%	0.5252



2014	13,095,152	37.67	1.5%	0.5650
2015	13,880,861	40.32	1.5%	0.6048
2016	14,713,713	42.98	1.5%	0.6446
2017	15,596,535	45.63	1.5%	0.6845
2018	16,532,327	48.29	1.5%	0.7243
2019	17,524,267	50.94	1.5%	0.7641
2020	18,575,723	53.60	1.5%	0.8039

## Keterangan :

- 1) Total Gt Tiap Tahun Diperkirakan Naik 6 % Dari Tahun Sebelumnya;
  - 2) Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun Diperkirakan 1,5 %;
  - 3) Untuk Mendapatkan Total Emisi Karbon Tahun 2012 - 2020 =  
Total Emisi Karbon Tahun Sebelumnya + Rata-Rata Kenaikan Emisi Karbon Tahun 2009-2010-2011 (Sebesar : 2,655 Megaton)
  - 4) Jumlah Sertifikat IAPP (Pencegah Ah An Pencemaran Udara Dari Operasional Kapal) Yang Dikeluarkan Tahun 2012 Sebanyak = 320 Sertifikat
  - 5) Asumsi Total Gt Kapal Yang Sudah Dikeluarkan Sertifikat IAPP :  
$$50\% \quad 10.000 \text{ Gt} = 160 \times 10.000 \text{ Gt} = 1.600.000 \text{ Gt}$$
$$50\% \quad 5.000 \text{ Gt} = 160 \times 5.000 \text{ Gt} = 800.000 \text{ Gt}$$
$$= 2.400.000 \text{ Gt}$$
  - 6) Untuk Perhitungan Persentase Riil (Kenyataan) Penurunan Emisi Karbon Adalah :  
$$\begin{aligned} \text{Total Gt Tahun 2012} &= 11.654.639 \\ \text{Total Gt Yang Sudah Disertifikasi IAPP} &= 2.400.000 \\ &= 21\% \end{aligned} \quad \}$$

Permasalahan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

- 1) Selama tahun 2013 pembahasan RPM Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal mengalami penundaan di Bagian Hukum Ditjen Hubla karena banyaknya agenda di Bagian Hukum, seperti pembahasan



RPM dari Direktorat lain dan persiapan Indonesia menghadiri sidang Assembly di IMO.

- 2) Selama tahun 2013 pembahasan RPM Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal mengalami beberapa kali revisi terkait beberapa konvensi yang harus di update serta terkendala oleh banyaknya agenda pada Bagian Hukum Ditjen Hubla.
- 3) Pemahaman sistem manajemen keselamatan kapal di perusahaan dan kapal masih belum optimal karena kurangnya pemahaman ISM CODE oleh DPA Perusahaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

- a. Telah ditetapkan PP nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim tanggal 1 Februari 2010;
- b. Telah dilaksanakan pembahasan Draft RPM Pencegahan Pencemaran dengan Bagian Hukum Ditjen Hubla untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum Kemenhub;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal telah ditetapkan Nomor KM 45 tahun 2012.
- d. Ratifikasi MARPOL telah dilaksanakan Annex III s.d VI melalui Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2012.
- e. Telah dilaksanakan Temu Teknis Kelaiklautan Kapal.
- f. Telah dilaksanakan uji petik kelaiklautan kapal.
- g. Telah dilaksanakan bimbingan teknis pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen pengoperasian kapal serta sosialisasi ratifikasi Marpol di 3 kota yaitu Surabaya, Balikpapan dan Batam;
- h. Pelaksanaan Workshop Manajemen Keselamatan Kapal.
- i. Pengajuan usulan ratifikasi konvensi internasional tentang jaminan ganti rugi pencemaran akibat minyak bunker dan system anti teritip.
- j. Pelaksanaan audit keselamatan kapal di beberapa lokasi pelabuhan Indonesia.

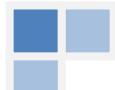


## XI. SASARAN STRATEGIS ( 12 )

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan	13 Pelabuhan	108,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.123 Sertifikat	1.196 Sertifikat	106,50 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.679 Sertifikat	1.514 Sertifikat	90,17 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat	156 Sertifikat	102,63 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat	403 Sertifikat	149,26 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan (100 %)	13 Pelabuhan (108,33 %)	Naik 8,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	972 Sertifikat (95,20 %)	1.196 Sertifikat (106,50 %)	Naik 11,30 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.332 Sertifikat (87,23 %)	1.514 Sertifikat (90,17 %)	Naik 2,94 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	107 Sertifikat (79,85 %)	156 Sertifikat (102,63 %)	Naik 22,78 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	305 Sertifikat (80,33 %)	403 Sertifikat (149,26 %)	Naik 68,93 %

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan);

Pada tahun 2013 jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan) telah dilaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) sebanyak 13 Pelabuhan sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 108,33 % artinya dari target jumlah pelabuhan sebanyak 12 pelabuhan dapat terealisasi sebanyak 13 pelabuhan. Adapun pelabuhan yang dimaksud yaitu pelabuhan yang telah melaksanakan Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 6 (enam) pelabuhan yaitu Pelabuhan Tj. Priok, Tj. Perak, Belawan, Makassar, Panjang dan Jayapura, dan pelabuhan yang sudah memiliki Dokumen Lingkungan (UKL/UPL) yang disusun pada tahun



2012 dimana pemantauannya dimulai pada tahun 2013 yaitu pelabuhan Tanjung Perawan Kabupaten Pulau Pisau Kalimantan Tengah, Tanjung Lalak Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Marabatuan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Mata Siri Kabupaten Kota Baru Kaliamantan Selatan, Torosik Kabupaten Bolaang Mogondo Sulawesi Selatan, Bian Kabupaten Merauke Papua.

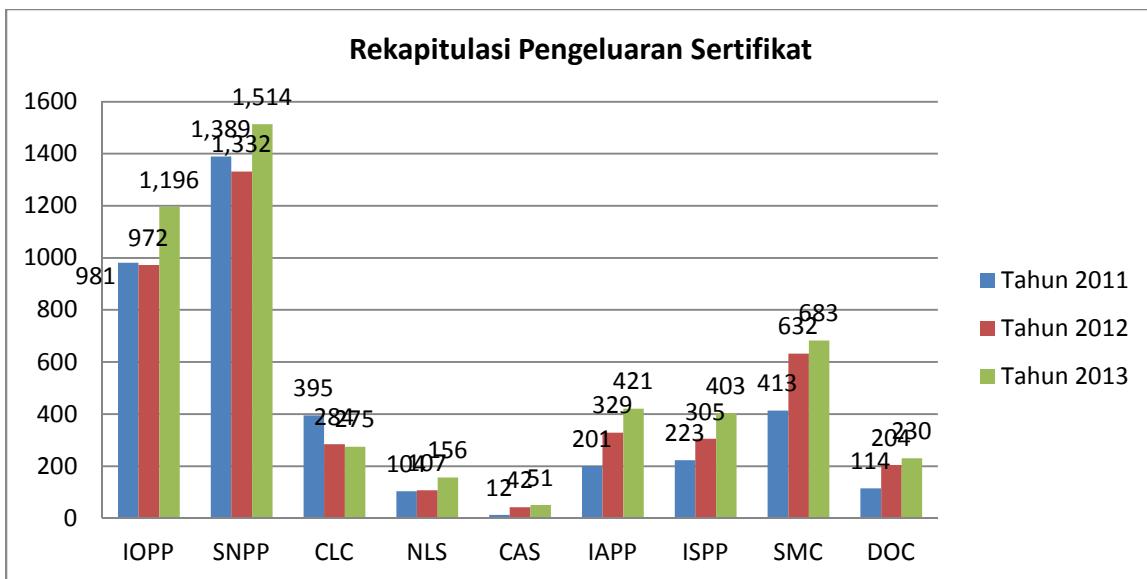
33. Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention);

Tabel 3.10

Rekapitulasi Pengeluaran Sertifikat Tahun 2011, 2012 dan 2013

No	Jenis Sertifikat	Tahun 2011 ( Sertifikat )	Tahun 2012 ( Sertifikat )	Tahun 2013 ( Sertifikat )
1	IOPP	981	972	1.196
2	SNPP	1.389	1.332	1.514
3	CLC	395	284	275
4	NLS	104	107	156
5	CAS	12	42	51
6	IAPP	201	329	421
7	ISPP	223	305	403
8	SMC	413	632	683
9	DOC	114	204	230
	TOTAL	3.832	4.207	4.929





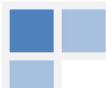
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat IOPP yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 106,50 % artinya dari target sebanyak 1.123 dapat terealisasi sebanyak 1.196.

Pada tahun 2012 jumlah sertifikat IOPP yang dikeluarkan sebanyak 972 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.196 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 224 sertifikat.

34. Jumlah Pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran);

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pemilikan sertifikat SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 90,17 % artinya dari target sebanyak 1.679 dapat terealisasi sebanyak 1.514.

Pada tahun 2012 jumlah Pemilikan sertifikat SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) yang dikeluarkan sebanyak 1.332 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.514 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 182 sertifikat.



35. Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance) yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 102,63 % artinya dari target sebanyak 152 dapat terealisasi sebanyak 156.

Pada tahun 2012 jumlah Pemilikan sertifikat Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance) yang dikeluarkan sebanyak 107 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 156 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 49 sertifikat.

36. Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention) yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 149,26 % artinya dari target sebanyak 270 dapat terealisasi sebanyak 403.

Pada tahun 2012 jumlah Pemilikan sertifikat Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention) yang dikeluarkan sebanyak 305 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 403 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 98 sertifikat.



3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Terhadap Target RENSTRA  
Ditjen Hubla Tahun 2010-2014

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2012 - 2014**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
S A S A R A N ( 1 )					
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal					
Sasaran Strategis ( 1 )					
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1. Jumlah kejadian kecelakaan yang oleh manusia	Kejadian Kecelakaan	31	31	31
	2. Jumlah kejadian kecelakaan yang oleh manusia	Kejadian Kecelakaan	48	48	48



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 2 )					
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	Sertifikat	7.146	7.850	8.650
S A S A R A N ( II )					
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah					
Sasaran Strategis ( 3 )					
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	4. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	Rute Perintis	80	80	89



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	Pelabuhan	393	386	405
<b>S A S A R A N ( III )</b>					
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut					
<b>Sasaran Strategis ( 4 )</b>					
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional	6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	Orang	5.027.658	6.660.000	7.200.000
	7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis	Orang	629.847	634.000	685.000



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	8. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	Ton	327.300.000	341.000.000	359.200.000
	9. Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	%	98,85	98,90	99,00
	10. Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	Ton	59.599.000	63.200.000	66.300.000
	11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	%	10,00	10,33	10,51



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 5 )					
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12. Penurunan Turn-Around Time (TR) di pelabuhan yang diusahakan	Menit	30	60	60
Sasaran Strategis ( 6 )					
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pelabuhan	48	48	48



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pelabuhan	48	48	48
	15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pelabuhan	48	48	48



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
S A S A R A N ( IV )					
Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut					
Sasaran Strategis ( 7 )					
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional		2 - - -	2 - - -	- 2 - -



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
<b>SASARAN ( V )</b>					
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi					
<b>Sasaran Strategis ( 8 )</b>					
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	Orang	60	60	60
	18. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	Orang	120	120	120
	19. Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	Orang	60	60	60
	20. Jumlah tenaga PPNS	Orang	367	427	487
	21. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	Orang	60	60	60
	22. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	Orang	120	120	120



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	23. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	Orang	*)	20	20
	24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	Orang	*)	20	20
	25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	Orang	*)	20	20
Sasaran Strategis ( 9 )					
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		78,00	82,00	84,00
	27. Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	331.485.001.206	309.026.100.000	383.244.291.534



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	28. Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	11.550.550.774.000	9.603.042.171.000	9.603.042.171.000
	29. Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	26.680.195.570.824	33.010.412.564.824	39.510.412.564.842
Sasaran Strategis ( 10 )					
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi di Bidang Transportasi Laut	30. Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	RPP RPM Kep. Dirjen	1 8 2	3 3 3	3 10 5



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
<b>S A S A R A N ( VI )</b>					
Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut serta teknologi transportasi laut yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim					
Sasaran Strategis ( 11 )					
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31. Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	Mega Ton	0,4853	0,5252	0,5650



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 12 )					
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	Pelabuhan	6	12	28
	33. Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention)	Sertifikat	1.021	1.123	1.347
	34. Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	Sertifikat	1.527	1.679	1.846



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	35. Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	Sertifikat	134	152	165
	36. Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	Sertifikat	245	270	300



Evaluasi dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Terhadap Target RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010-2014 yaitu sebagai berikut:

#### Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

"Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal"

##### I. Sasaran Strategis

###### Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	Tetap
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	66 Kejadian Kecelakaan (72,73 %)	51 Kejadian Kecelakaan (94,12 %)	Turun 21,39 %

###### 1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2012-2014 sebanyak 93 kejadian kecelakaan, dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 48 kejadian kecelakaan artinya tingkat kecelakan sampai dengan saat ini sebesar 51,61 %.



2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2012-2014 sebanyak 144 kejadian kecelakaan, dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 117 kejadian kecelakaan artinya tingkat kecelakaan sampai dengan saat ini sebesar 81,25 %.

## II. Sasaran Strategis

"Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	9.298 Sertifikat (130,11 %)	9.794 Sertifikat (124,76 %)	Naik 5,35 %

3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal  
(cat : Pusat)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal pada tahun 2012-2014 sebanyak 23,646 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 19,092 sertifikat kelaiklautan kapal artinya sampai dengan saat ini sebesar 80,84%.



### III. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah"

Sasaran Strategis (3)

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis (100 %)	79 Rute Perintis (98,75 %)	
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan (98,22 %)	386 Pelabuhan (100 %)	

#### 4. Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut pada tahun 2012-2014 sebanyak 240 Rute Perintis dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 159 Rute Perintis artinya sampai dengan saat ini pencapainnya sebesar 66,25% atau terdapat 81 rute lagi yang harus dilayani pada tahun 2014.



5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang pada tahun 2012-2014 sebanyak 1,184 Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 772 Jumlah artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 65,20 % atau terdapat 412 jumlah pelabuhan yang harus dilayani pada tahun 2014.

#### IV. SASARAN III

"Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut"

Sasaran Strategis (4)

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang (120,56%)	6,092,501 Orang (91,47 %)	Turun 29,09 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang (100,66%)	563,727 Orang (88,92%)	Turun 11,74 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton (107,54%)	368.297.016 Ton (108,00%)	Naik 0,46 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 % (100,05%)	99,68% (100,97 %)	Naik 0,78 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton (100,59%)	67.511.610 Ton (106,82%)	Naik 6,23 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 % (118,00%)	10,91 % (105,61%)	Turun 12,39 %

6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut pada tahun 2012-2014 sebanyak 18.887.658 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 12.752.501 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 67,52 % atau terdapat 6.135.157 yang harus terangkut pada tahun 2014.

7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja penumpang angkutan laut perintis pada tahun 2012-2014 sebanyak 1.948.847 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 1.197.727 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 61,46 % atau terdapat 751.120 yang harus terangkut pada tahun 2014.



8. Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional pada tahun 2012-2014 sebanyak 1.027.500.000 ton dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 709.297.016 ton artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 69,63 % atau terdapat 318.202.984 yang harus terangkut pada tahun 2014.

9. Prosentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Prosentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional pada tahun 2012-2014 sebesar 99,00 % dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 98,90 % artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 98,90 % pada tahun 2014.

10. Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional pada tahun 2012-2014 sebesar 189,099,000 ton dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 130,711,610 ton artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 69,12 % atau 58.367.390 ton yang harus diangkut pada tahun 2014.

11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional pada tahun 2014 sebesar 10,51 % dan realisasi



pencapaian sampai dengan 2013 sebesar 10,91 % artinya pencapaian sampai dengan saat ini sudah diatas target tahun 2014 sebesar 0,36 %.

#### IV. SASARAN STRATEGIS ( 5 )

Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang

12. Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan;  
Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	351 menit	104 Menit (173,33 %)	

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan pada tahun 2014 sebesar 60 menit dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebesar 104 menit artinya pencapaian sampai dengan saat ini sudah diatas target tahun 2014 sebesar 44 menit.

#### SASARAN STRATEGIS ( 6 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	37 Pelabuhan (77,08 %)	



14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	36 Pelabuhan (75,00 %)	
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	15 Pelabuhan (31,25 %)	26 Pelabuhan (54,16 %)	

13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 48 pelabuhan dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebanyak 37 pelabuhan artinya masih terdapat 11 pelabuhan lagi yang harus dapat memenuhi pencapaian Waiting Time (WT) sesuai target sampai tahun 2014.

14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 48 pelabuhan dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebanyak 36 pelabuhan artinya masih terdapat 12



pelabuhan lagi yang harus dapat memenuhi pencapaian Approach Time (AT) sesuai target sampai tahun 2014.

15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 48 pelabuhan dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebanyak 26 pelabuhan artinya masih terdapat 22 pelabuhan lagi yang harus dapat memenuhi pencapaian Efektif (Effective Time/ET) sesuai target sampai tahun 2014.

## VII. SASARAN IV

"Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi" SASARAN STRATEGIS (7)

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut  Pelelangan Perizinan Konstruksi Operasional		2 (100,00 %)	2 (100,00 %)



16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut pada tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan pada tahap konstruksi dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 masih pada tahap pelelangan sebanyak 2 kegiatan artinya pada tahun 2014 harus dapat mencapai sampai tahap konstruksi.

## VIII. SASARAN ( 5 )

"Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi"

Sasaran Strategis ( 8 )

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	
18	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	59 Orang (98,33 %)	60 Orang (100,00 %)	
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang (100,00 %)	427 Orang (100,00 %)	
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	



22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	50 Orang (250,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

### Sasaran Strategis ( 8 )

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

#### 17. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A pada tahun 2012-2014 sebanyak 180 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 120 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,67 % atau masih terdapat 60 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

#### 18. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B pada tahun 2012-2014 sebanyak 360 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 240 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,67 % atau masih terdapat 120 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



19. Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS pada tahun 2012-2014 sebanyak 180 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 119 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,11 % atau masih terdapat 61 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

20. Jumlah Tenaga PPNS

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Tenaga PPNS pada tahun 2012-2014 sebanyak 487 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 427 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 87,68 % atau masih terdapat 60 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

21. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A pada tahun 2012-2014 sebanyak 180 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 120 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,67 % atau masih terdapat 60 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

22. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B pada tahun 2012-2014 sebanyak 360 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 240 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,76 % atau masih terdapat 120 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



**23. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran;**

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran pada tahun 2012-2014 sebanyak 40 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 30 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 75,00 % atau masih terdapat 10 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

**24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;**

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran pada tahun 2012-2014 sebanyak 40 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 50 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 125% atau sudah melebihi target tahun 2014.

**25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam;**

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan tenaga penyelam pada tahun 2012-2014 sebanyak 40 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 30 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 75,00 % atau masih terdapat 10 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

Sasaran Strategis ( 9 )

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,

Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00 (100,00 %)	80,26 (97,88 %)	Naik 2,26 %



27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 620.558.927.453 (187,21 %)	Rp. 642.438.699.393 (207,89 %)	Naik Rp 21.877.771,940
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.993.257.136.888 (86,52 %)	Rp. 9.943.176.487.000 (103,54 %)	Naik 50.080.649.888
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 25.241.607.641.062 (94,61 %)	Rp. 27.992.287.146.185 (84,54 %)	Naik 2.750.679.505,123

#### 26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebesar 84 dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar 80,26 artinya pencapaiannya sebesar 95,55 % atau masih terdapat sebesar 3,74 nilai yang harus ditingkatkan sesuai target tahun 2014.

#### 27. Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 1.023.755.392.740 dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 1.262.997.626.846 artinya pencapaiannya sebesar 123,06 % atau sudah melebihi target tahun 2014 sebesar Rp. 239.242.234.106.

#### 28. Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 30.756.635.116.000 dan realisasi pencapaian



2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 19.936.433.623.888 artinya pencapaiannya sebesar 64,82 % atau masih terdapat sebesar Rp. 10.820.201.492.112 yang harus dicapai tahun 2014.

#### 29. Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Jumlah Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 39.510.412.564.842 dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp53.233.894.787.247 artinya pencapaiannya sebesar 134,73 % atau sudah melebihi target tahun 2014 sebesar Rp.13.723.482.222.405.

#### X. SASARAN STRATEGIS ( 10 )

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	1 (100 %) 8 (100 %) 2 (100 %)	3 (100 %) - -	

#### 30. Jumlah penyelesaian regulasi

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian regulasi pada tahun 2012-2014 meliputi RPP sebanyak 7 (tujuh), RPM 21 (duapuluhan satu) dan Keputusan Dirjen 10 (sepuluh) dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 meliputi RPP sebanyak 4 (empat), RPM 8 (delapan) dan Keputusan Dirjen 3 (tiga) artinya pencapaian



sampai dengan saat ini meliputi RPP sebesar 42,86 % atau masih terdapat 3 RPP yang harus dicapai, pencapaian RPM sebesar 61,906 % atau masih terdapat 8 RPM yang harus dicapai dan pencapaian keputusan Dirjen sebesar 70 % atau masih terdapat 3 keputusan Dirjen yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

## IX. SASARAN 6

Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim  
Sasaran Strategis ( 11 )

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,102 Mega Ton (21,00 %)	0,3939 Mega Ton	

### 31. Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut:

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut pada tahun 2012-2014 sebesar 0,5650 mega ton dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar 0,3939 mega ton artinya pencapaian sampai dengan saat ini masih sebesar 69,72 % atau masih terdapat sebesar 0,1711 mega ton yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

## XII. SASARAN STRATEGIS ( 12 )

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan (100 %)	13 Pelabuhan (108,33 %)	Naik 8,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	972 Sertifikat (95,20 %)	1.196 Sertifikat (106,50 %)	Naik 11,30 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.332 Sertifikat (87,23 %)	1.514 Sertifikat (90,17 %)	Naik 2,94 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	107 Sertifikat (79,85 %)	156 Sertifikat (102,63 %)	Naik 22,78 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	305 Sertifikat (80,33 %)	403 Sertifikat (149,26 %)	Naik 68,93 %

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan);

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port pada tahun 2012-2014 banyak 28 Pelabuhan dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 13 Pelabuhan artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 46,43 % atau masih terdapat 15 (lima belas) pelabuhan yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



33. Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention);

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP pada tahun 2012-2014 banyak 3.491 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 2.168 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 62,10 % atau masih terdapat 1.323 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

34. Jumlah Pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat SNPP pada tahun 2012-2014 sebanyak 5.052 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 2.846 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 56,33 % atau masih terdapat 2.206 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

35. Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun pada tahun 2012-2014 sebanyak 451 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 263 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 58,31 % atau masih terdapat 188 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

36. Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP pada tahun 2012-2014 banyak 815 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 708 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 86,87 % atau masih terdapat 107 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## DITJEN HUBLA TAHUN 2013

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tk. Eselon I di lingkungan kementerian Perhubungan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Perhungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 28 Desember 2013.

Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla. RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja



Ditjen Hubla ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2013 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N ( 1 )</b>				
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 1 )</b>				
Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	51 Kejadian Kecelakaan	94,12 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 2 )</b>				
Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat	9.794 Sertifikat	124,76 %

**S A S A R A N ( II )**

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

**SASARAN STRATEGIS ( 3 )**

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	79 Rute Perintis	98,75 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan	379 Pelabuhan	98,19 %

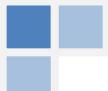
**S A S A R A N ( III )**

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut

**SASARAN STRATEGIS ( 4 )**

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang	6,092,501 Orang	91,47 %
---	---	--------------------	--------------------	---------



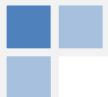
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang	563,727 Orang	88,92 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton	368,297,016 Ton	108,00 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %	99,68 %	100,79 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton	67,511,610 Ton	106,82 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %	10,91 %	105,61 %
<b>SASARAN STRATEGIS (5)</b>				
Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang				
12	Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	60 menit	104 menit	173,33 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 6 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belakut terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	37 Pelabuhan	77,08 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	26 Pelabuhan	54,17 %
<b>SASARAN ( IV )</b>				
Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi				



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 7 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut  - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2	2	100 %
<b>SASARAN ( V )</b>				
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 8 )</b>				
Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhantena Marine Inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	60 Orang	100,00 %
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang	427 Orang	100,00 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
21	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang	30 Orang	150,00%
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang	50 Orang	250,00%
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	30 Orang	150,00%

### SASARAN STRATEGIS ( 9 )

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00	80,26	97,88 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000	Rp. 642.438.699.393	207,89 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000	Rp. 9.943.176.487.000	103,54 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824	Rp. 27.992.287.146.185	84,54 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 10 )</b>				
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	3	3	100,00 %
<b>SASARAN ( 6 )</b>				
Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 11 )</b>				
Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO <sub>2</sub> ) transportasi laut	0,5252 Mega Ton	0,3939 Mega Ton	75 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 12 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan	13 Pelabuhan	108,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention)	1,123 Sertifikat	1,196 Sertifikat	106,50 %



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1,679 Sertifikat	1,514 Sertifikat	90,17 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat	156 Sertifikat	102,63 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat	403 Sertifikat	149,26 %

### 3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### I. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

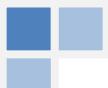
"Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal"

Sasaran Strategis (1)

Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE PENCAPIAAN
		TARGET	REALISASI	
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	51 Kejadian Kecelakaan	94,12 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	Tetap
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	66 Kejadian Kecelakaan (72,73 %)	51 Kejadian Kecelakaan (94,12 %)	Turun 21,39 %

1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2013 pada Sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal". Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2013 sebanyak 24 kejadian kecelakaan sedangkan target sebanyak 31 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 129,17%, apabila dibanding dengan tahun 2012 jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia mempunyai jumlah kejadian yang sama yaitu sebanyak 24 kejadian kecelakaan. Hal ini dapat tercapai dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang semakin ketat dan juga dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait serta kepada para pihak yang bertanggungjawab kepada kecelakaan kapal yaitu Nahkoda Kapal, Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan Penerbit Sertifikat.



- a. Penanggung Jawab Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kapal
  - 1. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kapal
    - a. Nakhoda Kapal
    - b. Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran
    - c. Aparat Pengawas
    - d. Penerbit Sertifikat
  - b. Kelembagaan
    - 1. Peningkatan Fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
    - 2. Revitalisasi Peran Syahbandar/ADPEL/UPP
    - 3. Pembentukan Lembaga Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan UU 17/2008
    - 4. Pembentukan Lembaga Syahbandar sesuai dengan UU 17/2008
    - 5. Pembentukan Lembaga Penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) sesuai dengan UU 17/2008
    - 6. Peningkatan koordinasi pelaksanaan sistem informasi pelayaran dan meteorologi maritim
    - 7. Melakukan restrukturisasi dan reformasi terhadap lembaga Klasifikasi Indonesia agar dapat berdiri sendiri sebagai lembaga non profit dan lebih independen dan profesional dalam rangka mendapat pengakuan di IACS
    - 8. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran kapal rakyat dan kapal yang berukuran dibawah 7 GT.
  - c. Sumberdaya Manusia
    - 1. Peningkatan Diklat Teknis Ahli Nautika Tingkat (ANT) I-IV, Ahli Teknik Tingkat (ATT) I-IV;
    - 2. Peningkatan Diklat Teknis Marine Inspector
    - 3. Peningkatan Diklat Teknis Pengukuran Kapal, Pendaftaran & Kebangsaan Kapal;



4. Peningkatan Diklat Teknis Kepanduan;
  5. Peningkatan Diklat Teknis Global Marine Distress Safety System (GMDSS), SBNP, dan Radar Simulator Arpha Simulator
  6. Peningkatan Diklat Teknis Kesyahbandaran
  7. Peningkatan Diklat Teknis KPLP
  8. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISPS-Code, Port State Control Officer
  9. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Basic Safety
  10. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Advance Fire Fighting
  11. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISM Code
  12. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Ship Security Officer
  13. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli VTS, Operator Basic and Advance, VTS Supervisor, VTS on-the-Job Training, VTS Instructor
  14. Peningkatan Diklat Teknis Pengelola National Data Centre (NDC) Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)
  15. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat I-III
- d. Operator
1. Pelaporan pelaksanaan perawatan kapal secara berkala (Planned Maintenance System).
  2. Peningkatan pengetahuan operator melalui pelatihan pelatihan tentang keselamatan pelayaran Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).



e. Masyarakat

1. Meningkatkan Sosialisasi bidang keselamatan pelayaran dan sosialisasi tentang barang / bahan Berbahaya.
2. Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) masyarakat, konsumen dan operator.
3. Mengadakan program Gerakan Sadar Keselamatan Pelayaran secara Nasional setiap tahun khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang banyak melayani kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal penyeberangan.

f. Penegakan Hukum

1. Peningkatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal konvensi dan non konvensi di pelabuhan.
2. Peningkatan pemeriksaan kapal dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
3. Peningkatan pemeriksaan fasilitas pokok pelabuhan secara berkala.
4. Peningkatan pengawasan pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dan pengawasannya.
5. Peningkatan pengawasan terhadap telekomunikasi pelayaran.
6. Peningkatan pengawasan penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standard.
7. Peningkatan pengawasan penyebarluasan berita tentang meteorologi di bidang maritim.
8. Peningkatan pengawasan terhadap bangunan atau instalasi di perairan serta zona keamanan dan keselamatan berlayar.
9. Peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar, tata ruang perairan dan tata perairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.



10. Peningkatan pengawasan terhadap pemanduan di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa.
11. Peningkatan pengawasan terhadap material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, dan elektronika kapal penumpang dan barang baik untuk kapal konvensi maupun non konvensi.
12. Peningkatan pengawasan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan.
13. Peningkatan pengawasan melekat dalam pemeriksaan, pengujian dan penilikan keselamatan kapal.
14. Peningkatan pengawasan terhadap pemeliharaan kapal secara berkala dan sewaktu-waktu.
15. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis perlengkapan navigasi atau elektronika kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
16. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis peralatan meteorologi sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
17. Peningkatan pengawasan terhadap standar dan persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
18. Peningkatan pengawasan terhadap garis muat dan pemuatan kapal.
19. Peningkatan pengawasan manajemen keselamatan kapal.
20. Pembebasan tugas kepada petugas di lapangan yang melakukan kesalahan (Syahbandar dan Marine Inspector) .
21. Pemeriksaan khusus menyeluruh dengan melakukan Condition Assesment Survey (CAS) Terhadap Persyaratan Keselamatan bagi pengoperasian kapal Ferry Ro-Ro di dalam negeri yang telah berumur 25 tahun.



22. Memberikan sanksi tegas kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan, dan pencabutan ijin bagi operator yang tidak disiplin atau tidak memenuhi ke wajiban keselamatan transportasi laut.
2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

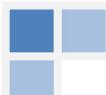
Terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain yaitu yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya muatan kapal yang jatuh dan mengakibatkan kecelakaan.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami penurunan sebanyak 15 kejadian kecelakaan atau 29,41 % dimana pada tahun 2012 terdapat 66 kejadian kecelakaan sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 51 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain.

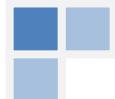
Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2013 sebesar 94,12 % dimana target sebanyak 48 kejadian kecelakaan sedangkan realisasi sebanyak 51 kejadian kecelakaan.

**TABEL 3.2**  
**Data Kecelakaan Kapal Tahun 2010 s/d 2013**

<b>NO</b>	<b>DATA KECELAKAAN KAPAL</b>	<b>TAHUN</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
A	Jenis Kecelakaan				
1	Kapal Tenggelam	58 (32,58 %)	49 (29,17 %)	57 (36,77 %)	
2	Kapal Terbakar	30 (16,85 %)	37 (22,02 %)	25 (16,12 %)	

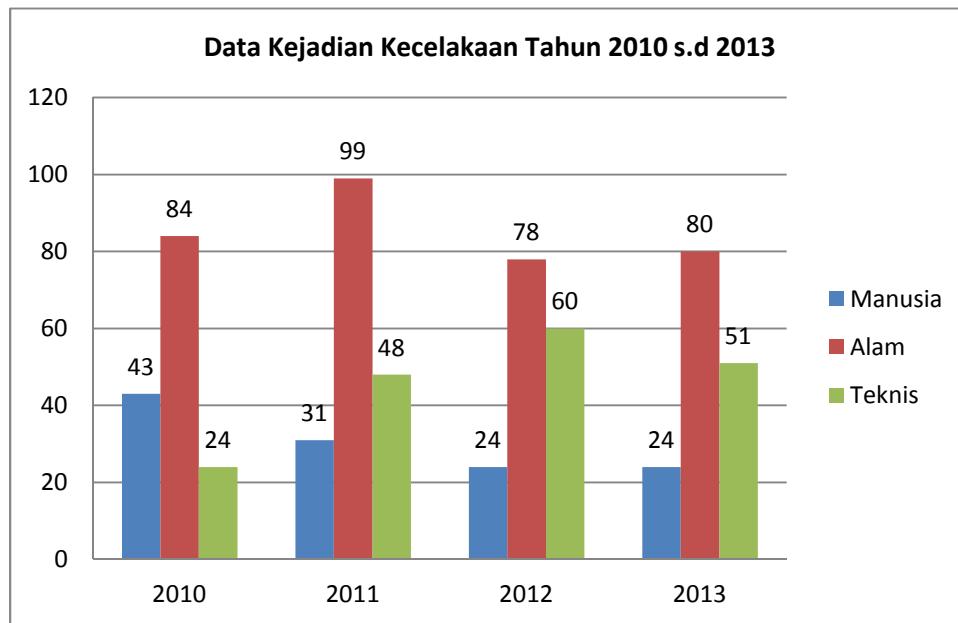


NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013
3	Kapal Tubrukan	14 (7,86 %)	20 (11,90 %)	19 (12,25 %)	
4	Kapal Kandas	35 (19,66 %)	38 (22,62 %)	37 (23,88 %)	
5	Kapal yg menyebabkan terancamnya Jiwa Manusia & Kerugian Harta Benda	41 (23,04 %)	24 (14,28 %)	17 (10,96 %)	
	Jumlah	178	168	155	
B	Korban & Kerugian				
1	Korban Jiwa ( Meninggal, Hilang )	343	150	150	
2	Kerugian Barang (Ton) ( Kendaran, Hewan )		1643		
C	Bendera Kapal				
1	Berbendera Indonesia		189 (94,97 %)	166 (93,78 %)	
2	Berbendera Asing		10 (5,03 %)	11 (6,21 %)	
	Jumlah	199	177		
D	Ukuran Kapal				
2	Kapal Gt < 7		13 (6,53 %)	10 (5,65 %)	
3	Kapal Gt 7 – 35		28 (14,07 %)	29 (16,38 %)	
4	Kapal Gt 35 – 500		68 (34,17%)	61 (34,47 %)	
5	Kapal Gt > 500		90 (45,22 %)	77 (43,51 %)	



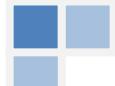
NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN			
		2010	2011	2012	2013
	Jumlah			199	177
E	Jenis Kapal				
1	Kapal Motor ( Km )			117 (88,94 %)	119 (67,24 %)
2	Motor Tanker (Mt)			3 (1,51 %)	11 (6,21 %)
3	Kapal Tradisional / Klm			29 (14,57 %)	16 (9,04 %)
4	Kapaltug Boat (Tb)			23 (11,56 %)	17 (9,61 %)
5	Kapal Tongkang (Barge)			27 (13,57 %)	14 (7,91 %)
	Jumlah			199	177
F	Dugaan Faktor penyebab				
1	Manusia	43 (28.48%)	31 (17,41 %)	24 (14,28 %)	24 (15,48 %)
2	Alam	84 (55.63%)	99 (55,62 %)	78 (46,42 %)	80 (51,61 %)
3	Teknis	24 (15.89%)	48 (26,92 %)	66 (39,28 %)	51 (32,91 %)
	JUMLAH	151	178	168	155





Ditjen Hubla telah berupaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Upaya-upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal
  - a. Penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten
  - b. Pemeriksaan saat diberikan SPB/Port Clear (Fisik, Dokumen, Jumlah dan Ijasah ABK) Termasuk muatan dan Penumpang
  - c. Patroli laut ditingkatkan (Pangkalan PLP dan Syahbandar)
  - d. Pemantauan kapal melalui Radio Pantai. (Ship Reporting System)
2. Tindakan Preventif Kecelakaan Kapal
  - a. Pemberitahuan Mapel Kepada Stakeholders Terkait.
  - b. Peningkatan Patroli Laut.
  - c. Diadakan Latihan-Latihan Diatas Kapal.
  - d. Penyuluhan Keselamatan Pelayaran.
3. Tindakan Represif Kecelakaan Kapal
  - a. Tindakan/ Hukuman Bagi Siapapun Penyebab Kecelakaan Kapal.
  - b. Penundaan Kapal Yang Overdraft/Lebih Penumpang.
  - c. Tindakan Keras Bagi Aparat Yang Tidak Disiplin.
  - d. Mencabut SIUP Bagi Perusahaan Yang Tidak Disiplin.



4. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal
  - a. Pemeriksaan Administratif (sesuai checklist), pemeriksaan kelengkapan dan validitas sertifikat dan surat-surat kapal;
  - b. Pemeriksaan fisik diatas kapal (sesuai checklist), pemeriksaan kondisi NTR serta pemuatan dan stabilitas kapal
5. Prasarana
  - 1) Pembangunan SBNP
  - 2) Pembangunan Kapal Navigasi
  - 3) Pembangunan Telekomunikasi Keselamatan Pelayaran
  - 4) Pembangunan dan rehabilitasi Kapal patroli
  - 5) Pengadaan peralatan CCTV
  - 6) Pengurukan alur pelayaran
  - 7) Peningkatan Pembangunan Faspel dan Kespel di Daerah terisolasi Terpencil , Kawasan Tertinggal dan Pulau-Pulau Terluar
  - 8) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Stasiun Radio Pantai
  - 9) Peningkatan Fasilitas Sarana Perangkatan dan Elektronika pada wilayah VTS
  - 10) Peningkatan Fasilitas LRIT
  - 11) Peningkatan Peralatan Komunikasi Marabahaya dan Keselamatan GMDSS dengan Menggunakan Jaringan Radio Terestrial Maupun Satelit
  - 12) Peningkatan Jumlah Dermaga Kapal Negara Kenavigasian Untuk Peningkatan Kesiagaan dan Mendukung Keandalan SBNP
  - 13) Peningkatan national data center (NDC) untuk LRIT
6. Sarana
  - 1) Pengawasan Pemeliharaan Kapal Secara Berkala dan Sewaktu-waktu
  - 2) Pengawasan dan Penyediaan Perlengkapan Navigasi Eletronika Kapal yang Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Jenis, Ukuran dan Daerah Pelayaran

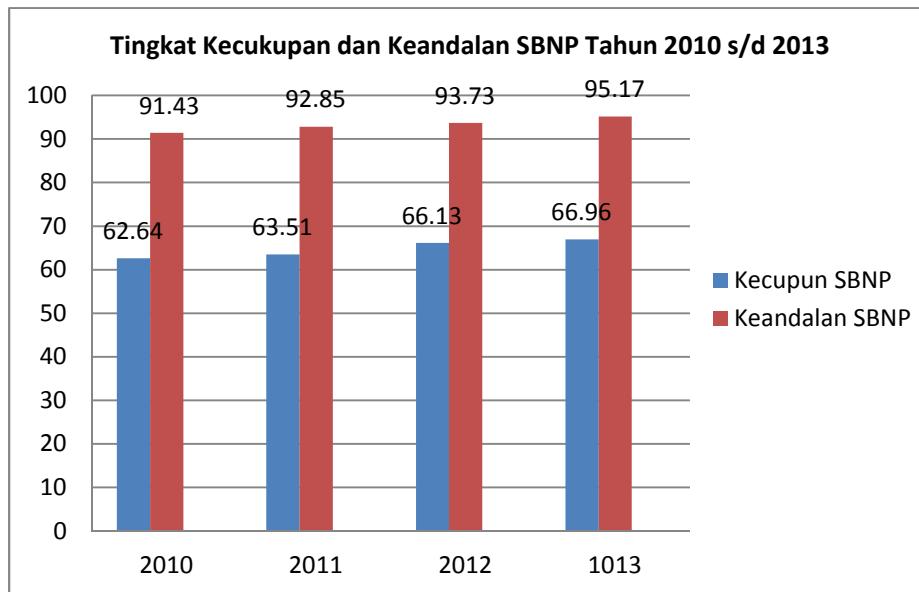


- 3) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Manajemen Keselamatan Kapal oleh Pemilik/Operator Kapal (Document of Compliance dan Safety Management Certificate)
  - 4) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Sarana Telekomunikasi Pelayaran
  - 5) Peningkatan aksesibilitas melalui pelayanan pelayaran angkutan laut perintis secara nasional (61 trayek) dan pembangunan kapal-kapal perintis
  - 6) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Kapal Negara (Patroli KPLP dan Kenavigasian)
  - 7) Penataan Alur dan Lokasi Perairan, Implementasi VTS dan Perumusan dan Penetapan Ketentuan Terkait dengan Keselamatan Pelayaran Sehubungan dengan Kegiatan Lepas Pantai
  - 8) Pengkajian Kelayakan dan Pengadaan Peralatan Pengamanan CCTV di Pelabuhan yang Terbuka bagi Pelayaran Luar Negeri dan Pelabuhan yang ditetapkan untuk melayani angkutan lebaran dan natal.
  - 9) Melakukan Kajian mengenai Pro Totipe Kapal-Kapal yang Mengangkut Penumpang dan Barang yang Sesuai untuk wilayah-Wilayah Tertentu
7. Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)  
Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP harus diperhatikan sesuai standard yang ditentukan dalam rangka menurunkan tingkat kejadian kecelakaan.



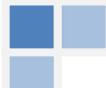
**Tabel 3.3**  
**Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP Tahun 2010 s/d 2013**

NO	URAIAN	TAHUN				PERTUMBUHAN		
		2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Tingkat Kecukupan SBNP	62,64 %	63,51 %	66,13 %	66,96 %	0,87 %	2,62 %	0,83 %
2	Tingkat Keandalan SBNP	91,43 %	92,85 %	93,73 %	95,17 %	1,42 %	0,88 %	1,44 %



Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan SBNP pada tahun 2013 masih rendah dan berada di bawah standard yang ada, dimana untuk tingkat kecukupan diharapkan dapat berada di atas 70 %. Demikian halnya tingkat kecukupan SBNP pada tahun 2010 s.d 2012 masih berada dibawah standard yaitu sekitar 60 %.

Sedangkan untuk tingkat keandalan standard minimal sebesar 95% dan pada tahun 2013 sudah dapat terpenuhi sesuai standard yang ada yaitu pencapaiannya sebesar 95,17% namun pada tahun 2010 s.d 2012 untuk tingkat kecukupan SBNP belum dapat terpenuhi sesuai dengan standard yang ada. Dengan demikian



untuk meningkatkan tingkat keandalan SBNP sesuai dengan standard yang ada diperlukan peningkatan alokasi anggaran pembangunan SBNP pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2013 Tingkat Kecukupan SBNP sebesar 66,96% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 66,13 % artinya terjadi peningkatan sebesar 0,83 % hal ini karena terdapat beberapa pemasangan SBNP. Pada tahun 2013 Tingkat Keandalan SBNP sebesar 95,17% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 93,73 % artinya terjadi peningkatan sebesar 1,36 %. Dan untuk mempertahankan tingkat keandalan SBNP sesuai standard yang ada tetap diperlukan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Dengan demikian pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk meningkatkan tingkat keandalan sedangkan untuk meningkatkan tingkat keandalan dengan meningkatkan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Jumlah SBNP yang terpasang sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3.541 terdiri dari milik Ditjen Hubla sebanyak 2.188 unit dan Non Ditjen Hubla sebanyak 1.353 unit. Adapun rincian SBNP yang dimiliki Ditjen Hubla dan Non Ditjen Hubla adalah sebagai berikut:

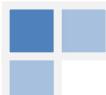
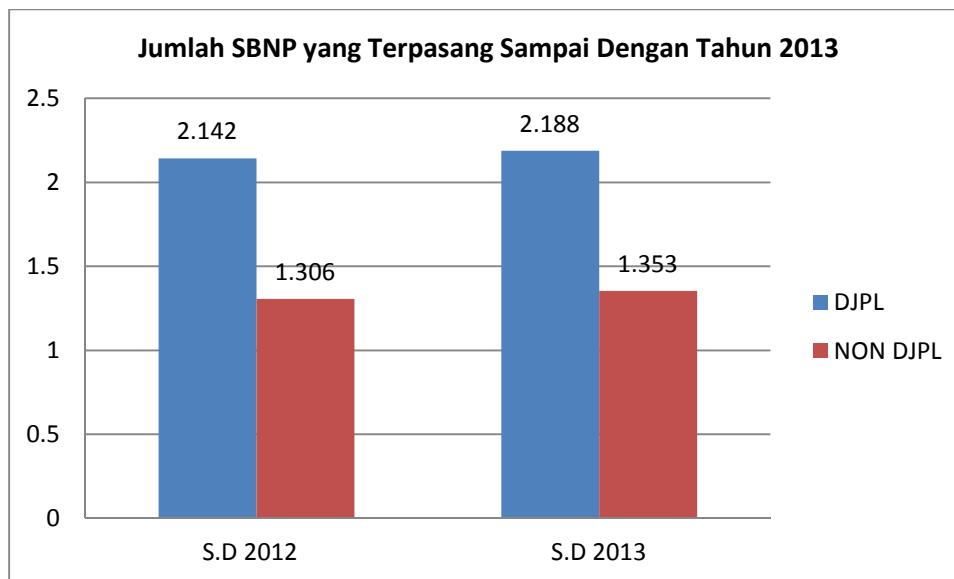
Tabel 3.4  
Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun 2010 s/d 2012

NO	JENIS	DJPL	NON DJPL	JUMLAH (unit)
1.	Menara Suar	279	-	279
2.	Rambu Suar	1.313	714	2.027
3.	Pelampung Suar	372	504	876
4.	Rambu Tanda Siang	138	69	207
5.	Anak Pelampung	40	19	59
	T O T A L	2.142	1.306	3.448



**Tabel 3.5**  
**Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun 2010 s/d 2013**

NO	JENIS	DJPL	NON DJPL	JUMLAH (unit)
1.	Menara Suar	281	-	281
2.	Rambu Suar	1.332	730	2.062
3.	Pelampung Suar	399	535	934
4.	Rambu Tanda Siang	140	69	209
5.	Anak Pelampung	36	19	55
	T O T A L	2.188	1.353	3.541



**Tabel 3.6**  
**Jumlah Kapal Negara Kenavigasian**

NO	JENIS KAPAL	JUMALH	
		THN 2012	THN 2013
1	Kapal Buoy Tender (kapal induk perambuan)	8	8
2	Kapal Aids Tender (Kapal Bantu Perambuan)	42	42
3	Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat Perambuan)	14	14
	T O T A L	64	64

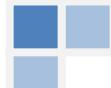
### Sasaran Strategis ( 2 )

“Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut”

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat	9.794 Sertifikat	124,76 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	9.298 Sertifikat (130,11 %)	9.794 Sertifikat (124,76 %)	Naik 5,35 %



3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal  
(cat : Pusat)

1. Penerbitan Sertifikat Terkait Pencegahan Kecelakaan

Salah satu upaya pencegahan kecelakaan adalah dengan Pengeluaran Sertifikat Kapal dan Penerbitan Sertifikat Lambung Timbul Kapal dalam Negeri dan Luar Negeri. Adapun Pengeluaran Sertifikat Kapal meliputi Keselamatan Konstruksi Kapal Barang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Radio Kapal Barang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Kapal Penumpang SOLAS dan NON SOLAS, Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC), Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah, Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah, Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah, Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah Koda dan Internasional, Dokumen Otorisasi, Sertifikat Pembebasan, Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya, Kelayakan Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi.

Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 496 sertifikat atau sebesar 5,33 % apabila dibanding tahun 2012 dimana pada tahun 2013 sebanyak 9.298 sertifikat sedangkan tahun 2013 sebanyak 9.794 sertifikat.

Sedangkan prosentase pencapaian target kinerja pada tahun 2013 sebesar 124,76 dimana target sebanyak 7.850 sertifikat sedangkan realisasi sebanyak 9.794 sertifikat.

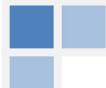
Peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2013 terdapat pada sertifikat kapal Non Solas. Hal ini terkait adanya pemberlakuan Azas Cabotage dan terdapat Pemberlakukan NCVS (Non Convention Vessel Standard) pada tahun 2013 yaitu ketentuan khusus untuk kapal yang



berlayar di dalam negeri. Jumlah dan jenis sertifikat yang diterbitkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Penerbitan Sertifikat Kapal Tahun 2010 S/D 2013**

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH				KET
		2010	2011	2012	2013	
I.	Pengeluaran Sertifikat Kapal					
1	Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (NON SOLAS)	80 563	293 2.398	350 3.096	344 3.208	
2	Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (NON SOLAS)	76 306	276 1267	336 1687	333 1.889	
3	Keselamatan Radio Kapal Barang (SOLAS) Keselamatan Radio Kapal Barang (NON SOLAS)	76 255	300 1389	358 1749	348 1.922	
4	Keselamatan Kapal Penumpang (SOLAS) Keselamatan Kapal Penumpang (NON SOLAS)	0 10	0 54	10 58	4 51	
5	Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC)	11	299	299	298	
6	Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	33	155	368	320	
7	Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah	28	112	142	118	
8	Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah	21	60	93	98	
9	Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Koda) Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Internasional)	11 0	44 16	59 53	45 48	
10	Dokumen Otorisasi	9	42	56	57	
11	Sertifikat Pembebasan	31	96	115	103	
12	Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	95	343	464	602	
13	Kelayakan Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	0	2	5	6	



NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH				KET
		2010	2011	2012	2013	
11.	Penerbitan Sertifikat Lambung Timbul Kapal					
1	Dalam Negeri	209	239			
2	Luar Negeri	36	62			
	TOTAL	1.850	7.447	9.298	9.794	

Tingkat perkembangan pengeluaran setifikat Kepelautan tahun 2013 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 akan diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.8  
Perkembangan Penerbitan Sertifikat Kepelautan Tahun 2010 – 2013

NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012	2013
<b>I . Sertifikat Ahli Nautika</b>					
1	ANT - I	511	418	454	381
2	ANT - II	1.311	1.001	867	706
3	ANT - III	1.175	1.047	1.015	1.359
4	ANT - IV	1.406	1.178	1.287	1.095
5	ANT - V	2.116	2.668	3.147	4.143
6	ANT - D	12.360	14.644	12.899	7.882
	TOTAL	18.879	20.956	19.669	15.566
<b>II. Sertifikat Ahli Teknika</b>					
1	ATT - I	416	367	390	402
2	ATT - II	1.103	788	628	696
3	ATT - III	1.125	1.040	1.070	1.168
4	ATT - IV	1.091	1.082	1.161	924
5	ATT - V	1.432	1.880	2.189	2.579
6	ATT - D	6.461	7.960	6.907	4.485
	TOTAL	11.628	13.117	12.345	10.254
<b>III. Sertifikat Keahlian Kapal Ikan</b>					
1	ANKAPIN I	150	116	137	122
2	ANKAPIN II	474	756	714	484



NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012	2013
3	ANKAPIN III	1.417	1.018	1.064	891
	TOTAL	2.041	1.890	1.915	1.497
4	ATKAPIN I	147	67	89	84
5	ATKAPIN II	380	491	553	361
6	ATKAPIN III	697	252	314	234
	TOTAL	1.224	810	956	679
<b>IV. Pengeluaran Buku Pelaut</b>					
1	Penggantian	1.219	1.601	1.987	1.980
2	Buku Baru	3.871	5.529	5.864	5.911
3	Perpanjangan	3.552	3.217	4.500	
<b>V. Penyijilan Awak Kapal</b>					
	PKL Asing	8.436	8.792	10.767	2.164
	PKL Nasional	598	978	3.325	15.335
<b>VI. Pengukuhan Keahlian Teknika</b>					
	ATT – I	263	616	728	745
	ATT – II	817	1.260	1.062	1.175
	ATT – III	519	2.499	2.839	2.560
	ATT - IV	1.150	1.900	2.328	1.872
	ATT - V	1.927	3.178	4.137	4.484
	TOTAL	4.676	9.453	11.094	10.836
<b>VII. Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika</b>					
	ANT – I	353	773	956	840
	ANT – II	886	1.513	1.299	1.190
	ANT – III	1.786	2.305	2.820	2.782
	ANT - IV	965	2.220	2.763	2.274
	ANT - V	1.665	4.189	5.290	6.239
	TOTAL	5.655	11.000	13.128	13.325



## 1) Sertifikat Ahli Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 26,35 % apabila dibanding tahun 2012, dimana pada tahun 2012 sebanyak 19.669 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 15.566 artinya pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami penurunan sebanyak 4.103 sertifikat.

## 2) Sertifikat Ahli Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika tahun 2013 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I s/d V mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3) Sertifikat Keahlian Kapal Ikan

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Keahlian Kapal Ikan Tahun 2013 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2013 pengeluaran Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN I s/d III mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 4) Pengeluaran Buku Pelaut

Perkembangan pemberian Buku Pelaut. Jenis pengeluaran buku pelaut tahun 2013 untuk permintaan Buku Pelaut Baru, Penggantian Buku Pelaut dan perpanjangan buku pelaut ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

## 5) Penyijilan Awak Kapal

Tingkat perkembangan Penyijilan Awak Kapal pada tahun 2013. Jumlah Penyijilan Awak Kapal yang bekerja di kapal asing meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kapal nasional juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



6) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika sesuai STCW 1978 Amandemen 1995. Jumlah Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika I s/d V pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Nautika tahun 2013 sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2013 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

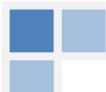
## II. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah"

Sasaran Strategis (3)

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	79 Rute Perintis	98,75 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan	386 Pelabuhan	100 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis (100 %)	79 Rute Perintis (98,75 %)	
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan (98,22 %)	386 Pelabuhan (100 %)	

#### 4. Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut

Pencapaian indikator kinerja Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut adalah sebesar 98,75 % dimana target sebanyak 80 rute sedangkan realisasi sebanyak 79 rute. Adapun rute perintis yang tidak dilayani adalah R-56 pangkalan Jayapura disebabkan gagal lelang karena tidak ada perusahaan mendaftar atau berminat. Dengan demikian pada tahun 2013 terdapat penurunan pencapaian sebesar 1 rute atau terdapat penurunan sebesar 1,25 % jika dibanding dengan tahun 2012. Adapun rincian rute perintis dapat disampaikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.6**  
**Data Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal**  
**Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013**

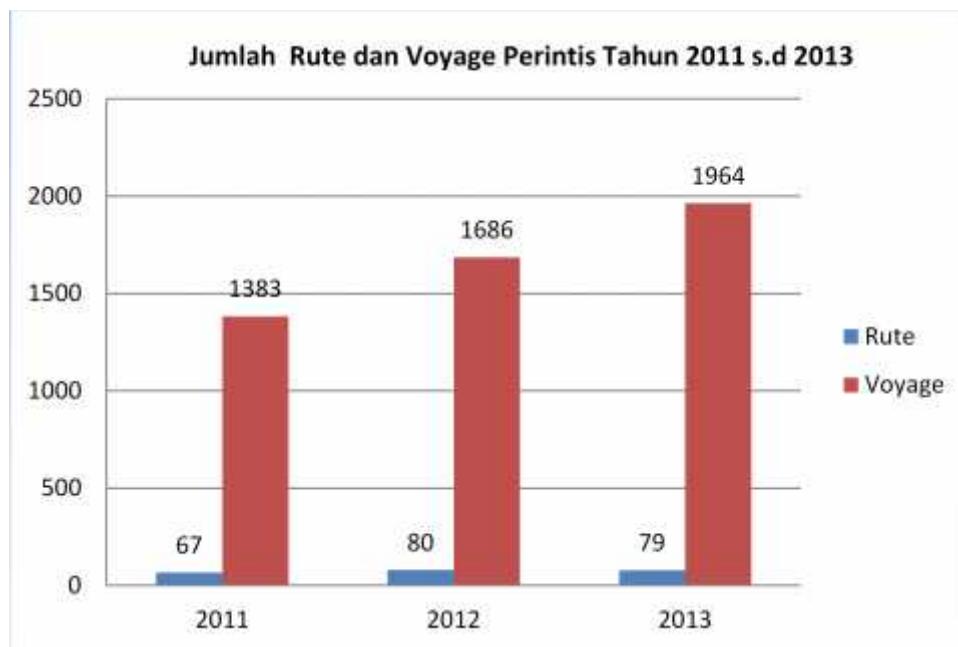
NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
1.	MEULABOH	R – 1	18	R – 1	18	R – 1	26
2.	TELUK BAYUR	R – 2	20	R – 2	20	R – 2	19
		R – 3	20	R – 3	20	R – 3	19
3.	BENGKULU	R – 4	26	R – 4	26	R – 4	23
4.	TG. PINANG	R – 5	33	R – 5	33	R – 5	33
		R – 6	37	R – 6	37	R – 6	41
5.	SINTETE	R – 7	28	R – 7	28	R – 7	30
		R – 8	22	R – 8	22	R – 8	23
6.	KOTABARU	R – 9	28	R – 9	28	R – 9	30
7.	SUKAMARA	R – 10	33	R – 10	33	R – 10	33
8.	SURABAYA	R – 11	26	R – 11	26	R – 11	26
9.	TG. WANGI	R – 12	26	R – 12	26	R – 12	26
10	BIMA	R – 13	26	R – 13	26	R – 13	26
		R – 14	21	R – 14	21	R – 14	19
11	KUPANG	R – 15	18	R – 15	24	R – 15	24
				R – 68	11		
				R – 69	10		
		R – 16	22	R – 16	22	R – 16	26
		R – 17	22	R – 17	22	R – 17	41
		R – 18	20	R – 18	20	R – 18	33
12	MAUMERE					R – 19	26
						R – 20	37
13	BITUNG	R – 19	20	R – 19	20	R – 21	26
		R – 20	23	R – 20	23	R – 22	26
14	TAHUNA	R – 21	23	R – 21	23	R – 23	26
		R – 22	22	R – 22	22	R – 24	22
15	PAGIMANA	R – 23	16	R – 23	16	R – 25	22
16	KOLONEDALE	R – 24	16	R – 24	16	R – 26	23
17	KENDARI	R – 25	22	R – 25	22	R – 27	23
		R – 26	21	R – 26	21	R – 28	20
18	TILAMUTA	R – 27	17	R – 27	17	R – 29	23
		R – 28	20	R – 28	20	R – 30	22
19	KWANDANG					R – 31	28
20	MAKASSAR	R – 29	23	R – 29	23	R – 32	23
21	MAMUJU	R – 30	19	R – 30	19	R – 33	23



NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
22	AMBON	R - 32	18	R - 32	18	R - 34	21
		R - 33	16	R - 33	18	R - 35	19
				R - 70	9	R - 36	24
				R - 71	9	R - 37	18
				R - 72	9	R - 38	23
		R - 34	14	R - 34	14	R - 39	23
		R - 35	20	R - 35	20	R - 40	22
		R - 36	23	R - 36	23		
23	TUAL	R - 36	17	R - 36	17	R - 41	17
		R - 37	15	R - 37	15	R - 42	19
				R - 73	14	R - 43	24
				R - 74	17	R - 44	20
24	SAUMLAKI	R - 38	17	R - 38	17	R - 45	24
		R - 39	17	R - 39	17	R - 46	19
				R - 38	27	R - 47	22
				R - 75	11	R - 48	20
				R - 76	9		
25	TERNATE	R - 40	22	R - 40	22	R - 49	26
		R - 41	18	R - 41	18	R - 50	26
		R - 42	17	R - 42	17	R - 51	20
				R - 77	11	R - 52	21
26	BABANG	R - 43	18	R - 43	18	R - 53	21
27	SANANA	R - 45	19	R - 45	19	R - 54	26
		R - 46	24	R - 46	24	R - 55	26
28	JAYAPURA	R - 47	30	R - 47	30	R - 56	31
		R - 48	34	R - 48	34	R - 57	31
		R - 49	28	R - 49	28	R - 58	24
		R - 50	28	R - 50	28	R - 59	26
						R - 60	29
29	BAIK	R - 51	24	R - 51	24	R - 61	24
		R - 52	30	R - 52	30	R - 62	31
		R - 53	25	R - 53	25	R - 63	24
30	MERAUKE	R - 54	21	R - 54	21	R - 64	21
		R - 55	19	R - 55	24	R - 65	29
				R - 78	13	R - 66	24
		R - 56	22	R - 56	22	R - 67	23
		R - 57	22	R - 57	22	R - 68	24
		R - 58	15	R - 58	15	R - 69	23
		R - 59	21	R - 59	21	R - 70	30



NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
31	MANOKWARI	R - 60	23	R - 60	23	R - 71	23
		R - 61	34	R - 61	34	R - 72	31
		R - 62	26	R - 62	26	R - 73	28
		R - 63	27	R - 63	27	R - 74	29
32	SORONG	R - 64	23	R - 64	23	R - 75	25
		R - 65	23	R - 65	23	R - 76	23
		R - 66	19	R - 66	19	R - 77	26
		R - 67	26	R - 67	26	R - 78	21
				R - 78	19	R - 79	22
				R - 79	11	R - 80	24
				R - 80	10		



Dari table di atas dapat disampaikan bahwa terdapat perubahan-perubahan jumlah rute dan voyage pada beberapa pangkalan selama tahun 2012 dan 2013 yaitu:

#### Pangkalan Kupang

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Kupang mempunyai jumlah rute sebanyak 6 (enam) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 4 (empat) rute dimana rute yang dihilangkan yaitu R-68 dan R-69.



### Pangkalan Maumere

Tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan perintis pada pangkalan Maumere namun pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan perintis sebanyak 2 (dua) rute yaitu R-19 sebanyak 26 Voyage dan R-20 sebanyak 37 Voyage.

### Pangkalan Kwandang

Tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan perintis pada pangkalan Kwandang namun pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan perintis sebanyak 1 (satu) rute yaitu R-31 sebanyak 28 Voyage.

### Pangkalan Ambon

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Ambon mempunyai jumlah rute sebanyak 8 (delapan) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 7 (tujuh) rute dimana rute yang dihilangkan yaitu R-36 sebanyak 8 Voyage.

### Pangkalan Jayapura

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Jayapura mempunyai jumlah rute sebanyak 4 (empat) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 5 (lima) rute dimana rute yang bertambah yaitu R-60 sebanyak 29 Voyage dan terdapat rute yang tidak beroperasional karena gagal lelang yaitu R-56 dengan jumlah voyage sebanyak 3 Voyage.

### Pangkalan Sorong

Tahun 2012 penyelenggaraan perintis pada pangkalan Sorong mempunyai jumlah rute sebanyak 7 (tujuh) rute sedangkan pada tahun 2013 jumlah rute menjadi 6 (enam) rute dimana rute yang dihilangkan yaitu R-80 dengan jumlah voyage sebanyak 10 Voyage.

### Total Jumlah Rute dan Voyage

Tahun 2012 total penyelenggaraan perintis mempunyai jumlah rute sebanyak 80 rute dengan jumlah 1.686 Voyage sedangkan pada tahun 2013 mempunyai pencapaian jumlah rute sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) rute dengan jumlah 1.964 Voyage sehingga terdapat penurunan jumlah rute sebanyak 1 (satu) rute namun untuk jumlah Voyage mengalami peningkatan sebanyak 278 Voyage.



Pada TA. 2013 Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis terdapat 80 Rute yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.108/1/10/DJPL-12 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Aggaran 2013 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 5 November 2012. Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani oleh kapal perintis diharapkan meningkat pada masa yang akan datang, sehingga dapat membuka aksesibilitas daerah terisolir dan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah perbatasan. Sedangkan daerah terluar dan perbatasan yang merupakan beranda depan wilayah Indonesia terhadap negara yang berbatasan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan keutuhan bangsa, ketahanan nasional serta meningkatkan potensi ekonomi pada wilayah tersebut.

5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 98,19 % artinya dari target sebanyak 386 pelabuhan yang dilayani terealisasi sebanyak 379 pelabuhan. Hal ini terjadi karena terdapat 1 (satu) rute perintis yang tidak dilayani yaitu R-56 pangkalan Jayapura disebabkan gagal lelang karena tidak ada perusahaan yang mendaftar atau berminat. Adapun jumlah pelabuhan yang terdapat pada rute tersebut (R-56) Pangkalan Jayapura sebanyak 7 Pelabuhan.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat penurunan pencapaian kinerja sebesar 1,25 % artinya pada tahun 2012 rute yang dilayani sebanyak 80 rute sedangkan tahun 2013 menjadi 79 rute.



### III. SASARAN III

"Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut"

Sasaran Strategis (4)

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

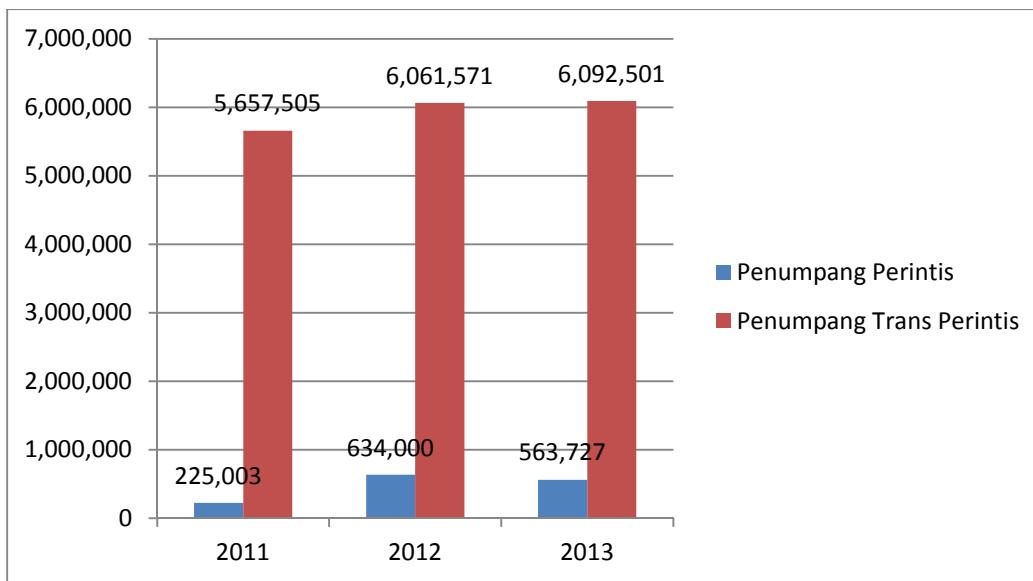
Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang	6,092,501 Orang	91,47 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang	563,727 Orang	88,92 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton	368.297.016 Ton	108,00%
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %	99,68 %	100,97%
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton	67.511.610 Ton	106,82%
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %	10,91 %	105,61%



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang (120,56%)	6,092,501 Orang (91,47 %)	Turun 29,09 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang (100,66%)	563,727 Orang (88,92%)	Turun 11,74 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton (107,54%)	368.297.016 Ton (108,00%)	Naik 0,46 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 % (100,05%)	99,68% (100,97 %)	Naik 0,78 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton (100,59%)	67.511.610 Ton (106,82%)	Naik 6,23 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 % (118,00%)	10,91 % (105,61%)	Turun 12,39 %





6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;

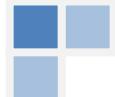
Pada tahun 2013 Pencapaian Kinerja sebesar 91,47 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 6,660,000 orang realisasi sebanyak 6,092,501 orang. yang artinya terdapat penurunan sebesar 567,499 orang.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat penurunan pencapaian kinerja sebesar 29,09 % artinya dari realisasi Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 6,660,000 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 6,092,501.

Tabel 3.6

Perkembangan Angkutan Penumpang Transportasi Laut Tahun 2008 – 2013

NO	TAHUN	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)
1	2008	7.197.890
2	2009	7.664.753
3	2010	5.096.851
4	2011	5.657.505
5	2012	6.061.571
6	2013	6,092,501



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah penumpang dalam negeri peningkatan sebesar 99,49.

- 7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis;  
Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 88,92% artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 634.000 orang terdapat realisasi sebanyak 563,727 orang.  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat penurunan pencapaian kinerja sebesar Turun 11,74 % artinya dari realisasi Jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 634.000 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 563,727.
- 8) Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional  
Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 108,00 % artinya dari target jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebanyak 341.000.000 Ton terdapat realisasi sebanyak 368.297.016 Ton.  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja sebesar naik 0,46 % artinya dari realisasi Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebanyak 341.000.000 Ton sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 368.297.016 Ton.
- 9) Persentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;  
Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 100,97 % artinya dari target persentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,90 % terdapat realisasi sebesar 99,68 %.  
Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja sebesar naik 0,38 % artinya dari realisasi persentase pangsa



muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,90 % sedangkan pada tahun 2013 sebesar 99,68 %.

10) Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 106,82% artinya dari target jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 63.200.000 terdapat realisasi sebesar 67.511.610.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja sebesar naik 6,23 % artinya dari realisasi persentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 63.200.000 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 67.511.610.

11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Pencapaian Kinerja pada tahun 2013 sebesar 105,61% artinya dari target Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 10,33 % terdapat realisasi sebesar 10,91 %.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 terdapat Kenaikan pencapaian kinerja turun sebesar 12,39 % artinya dari realisasi Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 118,00% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 105,61%.

### III. SASARAN STRATEGIS ( 5 )

Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang

12) Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan;

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:



NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	60 Menit	104 Menit	173,33 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	351 menit	104 Menit (173,33 %)	

Beberapa data kinerja yang berpengaruh terhadap Pencapaian Turn-Around Time (TRT) meliputi yaitu data Kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET) dan Berthing Time (BT), namun perhitungan Turn-Around Time (TRT) Pada tahun 2013 menggunakan data kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET)

Pencapain kinerja penurunan Turn-Around Time (TRT) pada tahun 2013 sebesar 173,33% artinya dari target Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan sebesar 104 menit terdapat realisasi sebesar 60 menit.

Pencapain kinerja tahun 2013 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena data yang ada pada tahun 2012 Turn-Around Time (TRT) secara total atau bukan data penurunan, dan data TRT yg tersedia hanya pada 5 (lima) pelabuhan dan mempunyai rata-rata sebesar 87,94 Jam/Kapal.



## SASARAN STRATEGIS ( 6 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	37 Pelabuhan	77,08 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	26 Pelabuhan	54,16 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	37 Pelabuhan (77,08 %)	
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	36 Pelabuhan (75,00 %)	
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	15 Pelabuhan (31,25 %)	26 Pelabuhan (54,16 %)	

- 13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Tabel berikut adalah daftar pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Sesuai Dengan SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/38/18/DJPL-11

Pada tahun 2013 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 77,08 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat sebanyak 37 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan sedangkan pada tahun 2012 pencapaian Waiting Time (WT) sebesar 75,00% atau naik sebesar 1,92% dari tahun 2012.



**Tabel 3.8**  
**Data Kinerja Operasional Pelabuhan Tahun 2013**

NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
1	Belawan			
2	Dumai			
3	Sibolga			
4	Lhokseumawe			
5	Pekanbaru			
6	Tanjung Pinang			
7	Tanjung Priok			
8	Panjang			
9	Palembang			
10	Teluk Bayur			
11	Pontianak			
12	Banten			
13	Tg. Perak			
14	Tg. Emas			
15	Banjarmasin			
16	Benoa			
17	Tenau/ Kupang			
18	Tanjung Intan			
19	Makassar			
20	Balik Papan			
21	Samarinda			
22	Bitung			
23	Ambon			
24	Jayapura			



NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
25	Sunda kelapa			
26	Bengkulu			
27	Pangkal Balam			
28	Tg Pandan			
29	Cirebon			
30	Jambi			
31	Gersik			
32	Tg Wangi			
33	Kota Baru			
34	Sampit			
35	Gorontalo			
36	Pantoloan			
37	Manado			
38	Toli-Toli			
39	Biak			
40	Nunukan			
41	Sorong			
42	Parepare			
43	Kendari			
44	Tarakan			
45	Merauke			
46	Manokwari			
47	Fak-Fak			
48	Ternate			



- 14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja pelabuhan yang memenuhi pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 75,00 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat sebanyak 36 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang memenuhi pencapaian Approach Time (AT) sesuai standard yang ada 36 Pelabuhan sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 36 Pelabuhan.

- 15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja pelabuhan yang memenuhi pencapaian Effective Time (ET) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 54,17 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah ditetapkan hanya terdapat sebanyak 26 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang memenuhi pencapaian Effective Time (ET)/(BT) sesuai standard yang ada 15 Pelabuhan sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 36 Pelabuhan atau meningkat sebanyak 21 (dua puluh satu) pelabuhan.

Pada tahun 2013 data yang dimiliki hanya pada 48 pelabuhan strategis yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.9 Kinerja Pelayanan Kapal Tahun 2011 – 2013

NO	Pelabuhan	Standar Kinerja			2012			2013		
		WT Jam	AT Jam	ET:BT ( % )	WT Jam	AT Jam	ET:BT ( % )	WT Jam	AT Jam	ET:BT ( % )
1.	Belawan	1	2	70	1,17	1,27	72,61	0.76	2.58	73.39
2.	Dumai	2	6	80	1,27	4,95	72,23	1.85	5.11	84.04
3.	Sibolga	1	1	70	0,00	0,00	9,70	-	-	11.20
4.	Lhok Seumawe	1	1	80	0,25	0,85	74,01	0.26	1.00	78.00
5.	Pekanbaru	2	12	70	0,22	8,17	49,40	0.19	7.98	44.10
6.	Tanjung Pinang	1	1	70	-	1,30	21,34	0	1,50	16.40
7.	Tg. Priok	1	2	80	0,75	1,00	87,18	0.24	0.62	76.76
8.	Panjang	1	1	80	0,44	0,59	62,25	0.45	0.41	63.00
9.	Palembang	1	8	80	0,13	6,25	51,40	0.12	6.33	52.00
10.	Teluk Bayur	1	1	70	0,23	0,63	54,62	0.01	0.93	63.96
11.	Pontianak	1	5	80	0,08	3,38	47,18	0.06	3.37	54.34
12.	Banten	1	1	80	1,00	1,10	83,72	1.00	1.10	85.39
13.	Tg. Perak	2	4	80	0,25	0,90	79,49	1.36	3.37	67.89
14.	Tg. Emas	1	1	80	0,28	0,59	68,37	0.21	0.59	94.43
15.	Banjarmasin	2	4	80	0,78	2,97	70,95	0.70	2.71	75.00
16.	Benoa	1	1	70	0,14	0,35	53,58	0	1.00	24.75
17.	Tenau/Kupang	2	1	70	-	0,23	47,71	0.42	0.40	76.80
18.	Tanjung Intan	1	2	70	0,00	3,02	60,67	0.03	2.48	65.76
19.	Makassar	1	1	80	0,54	1,58	80,72	0.13	1.46	70.12
20.	Balikpapan	1	2	80	1,43	1,63	76,72	0.10	0.59	70.00
21.	Samarinda	1	5	80	2,34	4,63	74,85	0.30	4.00	55.00
22.	Bitung	1	2	70	0,50	1,38	64,84	0.70	1.00	48.17
23.	Ambon	1	2	70	1,15	1,63	66,72	0.16	0.43	76.82
24.	Jayapura	1	12	70	0,50	0,68	63,72	0.90	1.00	67.00
25.	Sunda Kelapa	1	2	-	-	-	52,92	-	-	54.20
26.	Bengkulu	1	2	-	0,23	0,35	73,53	0.23	0.37	74
27.	Pangkal Balam	1	2	-	1,00	1,00	75,12	1.00	0.92	55.62
28.	Tg. Pandan	1	2	-	0,17	0,61	20,18	0.084	0.29	22.47
29.	Cirebon	1	2	-	-	1,59	45,12	-	1.66	53.45
30.	Jambi	1	2	-	0,43	28,3	38,67	0.10	30.29	45.85
31.	Gresik	1	2	-	1,50	1,13	59,75	1.10	1.75	59.60
32.	Tg. Wangi	1	2	-	0,77	0,75	89,98	0.22	0.77	62.02
33.	Kota Baru	1	2	-	-	-	-	-	-	-
34.	Sampit	1	2	-	-	-	-	-	-	-
35.	Gorontalo	1	2	70	0,54	1,58	70,72	0.54	1.58	70.72
36.	Pantoloan	1	2	70	0,16	1,58	69,49	0.24	0.76	80.09
37.	Manado	1	2	70	0,77	1,58	69,49	0.77	1.85	33.33
38.	Tolitoli	1	2	70	0,72	1,63	64,00	-	-	59.00
39.	Biak	1	2	70	0,47	1,54	63,00	0.70	1.00	71.79
40.	Nunukan	1	2	70	0,73	2,63	61,92	0.40	0.70	71.50
41.	Sorong	1	2	70	9,08	1,08	54,53	1.00	1.00	54.00
42.	Parepare	1	2	70	0,98	2,63	60,72	1.36	0.51	23.83
43.	Kendari	1	2	70	0,66	1,65	67,08	6.10	2.27	70.96
44.	Tarakan	1	2	70	1,58	2,00	38,82	2.71	3.28	42.45
45.	Merauke	1	2	70	0,87	1,82	51,18	2.00	2.20	57.00
46.	Manokwari	1	2	70	0,90	1,75	91,38	0.64	0.88	59.00
47.	Fakfak	1	2	70	0,90	1,92	73,72	0.80	1.90	73.68
48.	Ternate	1	2	70	0,95	0,68	80,47	0.40	0.50	55.95



#### IV. SASARAN IV

"Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi"

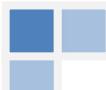
##### SASARAN STRATEGIS ( 7 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENT ASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut			
	Pelelangan	2	2	100,00 %
	Perizinan	-	-	-
	Konstruksi	-	-	-
	Operasional	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut			
	Pelelangan	2 (100,00 %)	2 (100,00 %)	



16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut

Pada tahun 2013 terdapat kerjasama yang sudah pada tahap pelelangan yaitu Tanah Ampo dan Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS) sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100% atau sesuai target yang ada sebanyak 2 kerja sama.

Pada tahun 2012 terdapat kerjasama yang sudah pada tahap pelelangan yaitu Tanah Ampo dan Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS) sehingga pada tahun 2013 tidak terdapat penambahan kerjasama.

#### V. SASARAN ( 5 )

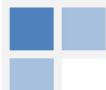
"Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi"

Sasaran Strategis ( 8 )

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	60 Orang	100,00 %
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang	427 Orang	100,00 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100,00 %



22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang	30 Orang	150,00%
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang	50 Orang	250,00%
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	30 Orang	150,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	
18	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	59 Orang (98,33 %)	60 Orang (100,00 %)	
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang (100,00 %)	427 Orang (100,00 %)	
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	
22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	



23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	50 Orang (250,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

### Sasaran Strategis (8)

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

#### 17. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga Marine Inspector A sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 60 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga Marine Inspector A yang mengikuti diklat sebanyak 60 orang dan mempunyai jumlah yang sama dengan tahun 2013 sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkata Tenaga Marine Inspektor A sebanyak 120 orang pada dua tahun terakhir

#### 18. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga Marine Inspector B sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 120 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga Marine Inspector B yang mengikuti diklat sebanyak 120 orang dan mempunyai jumlah yang sama dengan tahun 2013 sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkata Tenaga Marine Inspektor B sebanyak 240 orang pada dua tahun terakhir.



19. Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga PPNS sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 60 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga PPNS sebanyak 59 orang sedangkan tahun 2013 sebanyak 60 orang sehingga terdapat peningkatan tenaga PPNS sebanyak 119 orang pada dua tahun terakhir.

20. Jumlah Tenaga PPNS;

Pada tahun 2013 pencapaian kinerja diklat tenaga PPNS sebesar 100% artinya dari taget sebanyak 427 orang dapat terpenuhi seluruhnya.

Pada tahun 2012 jumlah tenaga PPNS sebanyak 367 orang sedangkan tahun 2013 sebanyak 427 orang sehingga terdapat peningkatan tenaga PPNS sebanyak 60 orang

21. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang sehingga pencapaian kinerjanya 100 %.

pada tahun 2012 pencapaian tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 Orang dan pada tahun 2013 sebanyak 60 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 120 orang pada dua tahun terakhir.

22. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang sehingga pencapaian kinerjanya 100 %.

pada tahun 2012 pencapaian tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 Orang dan pada tahun 2013 sebanyak 120 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 240 orang pada dua tahun terakhir.



23. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 30 orang, dimana kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 20 orang sehingga pencapaian kinerjanya 150 %. pada tahun 2012 tidak terdapat diklat tenaga penanggulangan pencemaran dan pada tahun 2013 sebanyak 30 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga penanggulangan pencemaran sebanyak 30 orang pada dua tahun terakhir.

24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 50 orang, dimana kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 20 orang sehingga pencapaian kinerjanya 250 %. pada tahun 2012 tidak terdapat diklat tenaga penanggulangan kebakaran dan pada tahun 2013 sebanyak 50 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 50 orang pada dua tahun terakhir.

25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam;

Pada tahun 2013 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga penyelam sebanyak 20 orang, dimana kebutuhan tenaga penyelam sebanyak 30 orang sehingga pencapaian kinerjanya 150 %. pada tahun 2012 tidak terdapat diklat tenaga penyelam dan pada tahun 2013 sebanyak 30 orang sehingga Ditjen Hubla memiliki peningkatan Tenaga penyelam sebanyak 30 orang pada dua tahun terakhir.



### Sasaran Strategis ( 9 )

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,

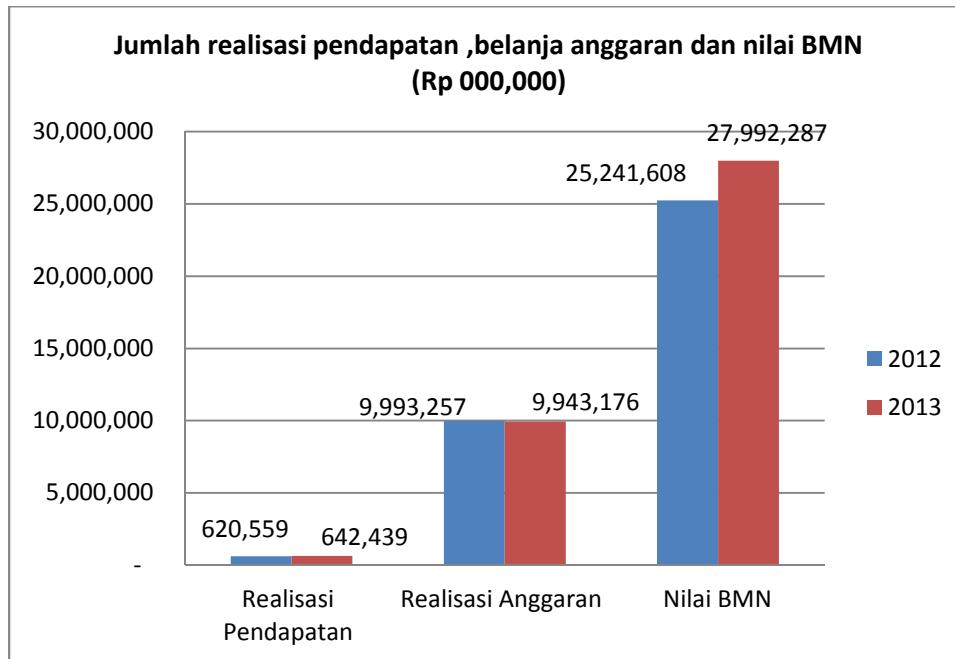
Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00	80,26	97,88 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000	Rp. 642.438.699.393	207,89 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000	Rp. 9.943.176.487	103,54 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824	Rp. 27.992.287.146.185	84,54 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00 (100,00 %)	80,26 (97,88 %)	Naik 2,26 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 620.558.927.453 (187,21 %)	Rp. 642.438.699.393 (207,89 %)	Naik Rp 21,877,771,940
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.993.257.136.888 (86,52 %)	Rp. 9.943.176.487.000 (103,54 %)	Naik 50,080,649,888
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 25.241.607.641.062 (94,61 %)	Rp. 27.992.287.146.185 (84,54 %)	Naik 2,750,679,505,123





**26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:**

Pencapaian kinerja hasil nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2013 sebesar 97,88 % artinya dari target nilai sebesar 82,00 yang dapat terpenuhi hanya sebesar 80,26.

Pada tahun 2012 pencapaian nilai AKIP Ditjen Hubla sebesar 78,00 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 80,26 sehingga terdapat kenaikan sebesar 2,26 dari tahun 2012.

**27. Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pencapaian kinerja Pada tahun 2013 sebesar 207,89 % artinya dari target jumlah pendapatan sebesar Rp. 309.026.100.000 dapat tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. 642.438.699.393.

Pada tahun 2012 pencapaian pendapatan sebesar Rp. 620.558.927.453 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 642.438.699.393 atau naik sebesar Rp. 21,877,771,940 dari tahun 2012.



**28. Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pencapaian kinerja Pada tahun 2013 sebesar 103,54 % artinya dari target jumlah realisasi belanja anggaran sebesar Rp. 9.603.042.171.000 terdapat realisasi sebesar Rp. 9.943.176.487.000.

Pada tahun 2012 pencapaian realisasi belanja anggaran sebesar Rp.9.993.257.136.888 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 9.943.176.487.000 atau naik sebesar Rp. 50,080,649,888 dari tahun 2012.

**29. Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pencapaian kinerja Pada tahun 2013 sebesar 84,54 % artinya dari target jumlah nilai BMN sebesar Rp.33.110.421.564.824 terdapat realisasi sebesar Rp.27.992.287.146.185.

Pada tahun 2012 pencapaian nilai BMN sebesar 25.241.607.641.062 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 27.992.287.146.185 atau naik sebesar Rp. 2,750,679,505,123

**X. SASARAN STRATEGIS ( 10 )**

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	3	3	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	1 (100 %) 8 (100 %) 2 (100 %)	3 (100 %) - -	



### 30. Jumlah penyelesaian regulasi

Pada tahun 2013 direncanakan akan menyelesaikan 3 ( tiga ) RPP dan seluruhnya teralisasi, RPP yang terealisasi adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Pada tahun 2012 terealisasi 1 RPP yaitu RPP Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), 8 RPM dan 2 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## VI. SASARAN 6

Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

Sasaran Strategis ( 11 )

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,5252 Mega Ton	0,3939 Mega Ton	%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,102 Mega Ton (21,00 %)	0,3939 Mega Ton	0.2919

### 31. Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut:

Pada tahun 2013 Ditjen Hubla hanya mampu menurunkan emisi gas buang (CO2) dari kapal-kapal yang beroperasional sebesar 0,3939 mega ton dari target penurunan sebesar 0,525 mega ton sehingga pencapaiannya hanya sebesar



75,00%. Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain pengehematan penggunaan BBM dan penerbitan sertifikasi kapal melalui dikeluarkannya sertifikat International Air Pollution Prevention (IAPP) sedangkan target yang belum tercapai sebesar 25 % adalah bersumber dari faktor pendukung yaitu implementasi Ecoport di Pelabuhan karena sampai saat ini Ditjen Hubla belum dapat menentukan berapa besar penurunan emisi yang diakibatkan dari pelaksanaan Ecoport di pelabuhan.

Hal ini diatur dalam Konvensi MARPOL 73/78 Anex ke VI yang terkait dengan bahan bakar yang digunakan. Sertifikat IAPP merupakan sertifikat yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari operasional kapal.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III-IV MARPOL dengan Perpres No. 29 Tahun 2012. Jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib). Pada saat ini telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Jumlah kepemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2013 sebanyak 1.196 sertifikat dengan target sebanyak 10.208 kapal yang harus disertifikasi.

Adapun perhitungan penurunan emisi sbb:

TABEL

Perhitungan Emisi Gas Buang (CO<sub>2</sub>) Transportasi Laut

Tahun	Total GT Tiap Tahun	Total Emisi Karbon (Mega Ton)	Target Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun	Target Penurunan Emisi (Mega Ton)
2009	8,456,364.00	24.39	-	-
2010	10,347,436.00	27.80	-	-
2011	10,994,942.00	29.70	-	-
2012	11,654,639	32.36	1.5%	0.4853
2013	12,353,917	35.01	1.5%	0.5252



2014	13,095,152	37.67	1.5%	0.5650
2015	13,880,861	40.32	1.5%	0.6048
2016	14,713,713	42.98	1.5%	0.6446
2017	15,596,535	45.63	1.5%	0.6845
2018	16,532,327	48.29	1.5%	0.7243
2019	17,524,267	50.94	1.5%	0.7641
2020	18,575,723	53.60	1.5%	0.8039

## Keterangan :

- 1) Total Gt Tiap Tahun Diperkirakan Naik 6 % Dari Tahun Sebelumnya;
  - 2) Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun Diperkirakan 1,5 %;
  - 3) Untuk Mendapatkan Total Emisi Karbon Tahun 2012 - 2020 =  
Total Emisi Karbon Tahun Sebelumnya + Rata-Rata Kenaikan Emisi Karbon Tahun 2009-2010-2011 (Sebesar : 2,655 Megaton)
  - 4) Jumlah Sertifikat IAPP (Pencegah Ah An Pencemaran Udara Dari Operasional Kapal) Yang Dikeluarkan Tahun 2012 Sebanyak = 320 Sertifikat
  - 5) Asumsi Total Gt Kapal Yang Sudah Dikeluarkan Sertifikat IAPP :  
$$50\% \quad 10.000 \text{ Gt} = 160 \times 10.000 \text{ Gt} = 1.600.000 \text{ Gt}$$
$$50\% \quad 5.000 \text{ Gt} = 160 \times 5.000 \text{ Gt} = 800.000 \text{ Gt}$$
$$= 2.400.000 \text{ Gt}$$
  - 6) Untuk Perhitungan Persentase Riil (Kenyataan) Penurunan Emisi Karbon Adalah :  
$$\begin{aligned} \text{Total Gt Tahun 2012} &= 11.654.639 \\ \text{Total Gt Yang Sudah Disertifikasi IAPP} &= 2.400.000 \\ &= 21\% \end{aligned} \quad \}$$

Permasalahan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

- 1) Selama tahun 2013 pembahasan RPM Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal mengalami penundaan di Bagian Hukum Ditjen Hubla karena banyaknya agenda di Bagian Hukum, seperti pembahasan



RPM dari Direktorat lain dan persiapan Indonesia menghadiri sidang Assembly di IMO.

- 2) Selama tahun 2013 pembahasan RPM Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal mengalami beberapa kali revisi terkait beberapa konvensi yang harus di update serta terkendala oleh banyaknya agenda pada Bagian Hukum Ditjen Hubla.
- 3) Pemahaman sistem manajemen keselamatan kapal di perusahaan dan kapal masih belum optimal karena kurangnya pemahaman ISM CODE oleh DPA Perusahaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

- a. Telah ditetapkan PP nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim tanggal 1 Februari 2010;
- b. Telah dilaksanakan pembahasan Draft RPM Pencegahan Pencemaran dengan Bagian Hukum Ditjen Hubla untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum Kemenhub;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal telah ditetapkan Nomor KM 45 tahun 2012.
- d. Ratifikasi MARPOL telah dilaksanakan Annex III s.d VI melalui Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2012.
- e. Telah dilaksanakan Temu Teknis Kelaiklautan Kapal.
- f. Telah dilaksanakan uji petik kelaiklautan kapal.
- g. Telah dilaksanakan bimbingan teknis pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen pengoperasian kapal serta sosialisasi ratifikasi Marpol di 3 kota yaitu Surabaya, Balikpapan dan Batam;
- h. Pelaksanaan Workshop Manajemen Keselamatan Kapal.
- i. Pengajuan usulan ratifikasi konvensi internasional tentang jaminan ganti rugi pencemaran akibat minyak bunker dan system anti teritip.
- j. Pelaksanaan audit keselamatan kapal di beberapa lokasi pelabuhan Indonesia.

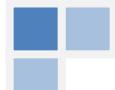


## XI. SASARAN STRATEGIS ( 12 )

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2013		PROSENTASE CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan	13 Pelabuhan	108,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.123 Sertifikat	1.196 Sertifikat	106,50 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.679 Sertifikat	1.514 Sertifikat	90,17 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat	156 Sertifikat	102,63 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat	403 Sertifikat	149,26 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan (100 %)	13 Pelabuhan (108,33 %)	Naik 8,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	972 Sertifikat (95,20 %)	1.196 Sertifikat (106,50 %)	Naik 11,30 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.332 Sertifikat (87,23 %)	1.514 Sertifikat (90,17 %)	Naik 2,94 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	107 Sertifikat (79,85 %)	156 Sertifikat (102,63 %)	Naik 22,78 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	305 Sertifikat (80,33 %)	403 Sertifikat (149,26 %)	Naik 68,93 %

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan);

Pada tahun 2013 jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan) telah dilaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) sebanyak 13 Pelabuhan sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 108,33 % artinya dari target jumlah pelabuhan sebanyak 12 pelabuhan dapat terealisasi sebanyak 13 pelabuhan. Adapun pelabuhan yang dimaksud yaitu pelabuhan yang telah melaksanakan Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 6 (enam) pelabuhan yaitu Pelabuhan Tj. Priok, Tj. Perak, Belawan, Makassar, Panjang dan Jayapura, dan pelabuhan yang sudah memiliki Dokumen Lingkungan (UKL/UPL) yang disusun pada tahun



2012 dimana pemantauannya dimulai pada tahun 2013 yaitu pelabuhan Tanjung Perawan Kabupaten Pulau Pisau Kalimantan Tengah, Tanjung Lalak Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Marabatuan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Mata Siri Kabupaten Kota Baru Kaliamantan Selatan, Torosik Kabupaten Bolaang Mogondo Sulawesi Selatan, Bian Kabupaten Merauke Papua.

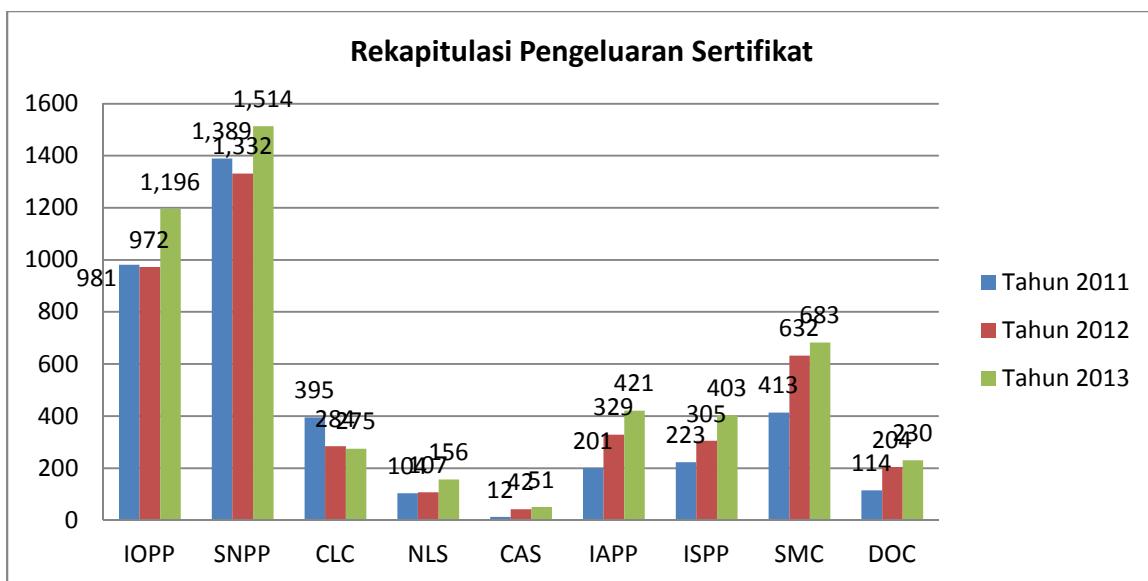
33. Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention);

Tabel 3.10

Rekapitulasi Pengeluaran Sertifikat Tahun 2011, 2012 dan 2013

No	Jenis Sertifikat	Tahun 2011 ( Sertifikat )	Tahun 2012 ( Sertifikat )	Tahun 2013 ( Sertifikat )
1	IOPP	981	972	1.196
2	SNPP	1.389	1.332	1.514
3	CLC	395	284	275
4	NLS	104	107	156
5	CAS	12	42	51
6	IAPP	201	329	421
7	ISPP	223	305	403
8	SMC	413	632	683
9	DOC	114	204	230
	TOTAL	3.832	4.207	4.929





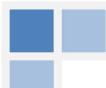
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat IOPP yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 106,50 % artinya dari target sebanyak 1.123 dapat terealisasi sebanyak 1.196.

Pada tahun 2012 jumlah sertifikat IOPP yang dikeluarkan sebanyak 972 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.196 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 224 sertifikat.

34. Jumlah Pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran);

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pemilikan sertifikat SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 90,17 % artinya dari target sebanyak 1.679 dapat terealisasi sebanyak 1.514.

Pada tahun 2012 jumlah Pemilikan sertifikat SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) yang dikeluarkan sebanyak 1.332 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.514 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 182 sertifikat.



35. Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance) yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 102,63 % artinya dari target sebanyak 152 dapat terealisasi sebanyak 156.

Pada tahun 2012 jumlah Pemilikan sertifikat Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance) yang dikeluarkan sebanyak 107 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 156 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 49 sertifikat.

36. Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention) yang dikeluarkan pada tahun 2013 pencapaian kinerja sebesar 149,26 % artinya dari target sebanyak 270 dapat terealisasi sebanyak 403.

Pada tahun 2012 jumlah Pemilikan sertifikat Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention) yang dikeluarkan sebanyak 305 sertifikat sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 403 sertifikat sehingga terdapat kenaikan sebanyak 98 sertifikat.



3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Terhadap Target RENSTRA  
Ditjen Hubla Tahun 2010-2014

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2012 - 2014**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
S A S A R A N ( 1 )					
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal					
Sasaran Strategis ( 1 )					
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1. Jumlah kejadian kecelakaan yang oleh manusia	Kejadian Kecelakaan	31	31	31
	2. Jumlah kejadian kecelakaan yang oleh manusia	Kejadian Kecelakaan	48	48	48



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 2 )					
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	Sertifikat	7.146	7.850	8.650
S A S A R A N ( II )					
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah					
Sasaran Strategis ( 3 )					
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	4. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	Rute Perintis	80	80	89



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	Pelabuhan	393	386	405
<b>S A S A R A N ( III )</b>					
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut					
<b>Sasaran Strategis ( 4 )</b>					
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional	6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	Orang	5.027.658	6.660.000	7.200.000
	7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis	Orang	629.847	634.000	685.000



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	8. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	Ton	327.300.000	341.000.000	359.200.000
	9. Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	%	98,85	98,90	99,00
	10. Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	Ton	59.599.000	63.200.000	66.300.000
	11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	%	10,00	10,33	10,51



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 5 )					
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12. Penurunan Turn-Around Time (TR) di pelabuhan yang diusahakan	Menit	30	60	60
Sasaran Strategis ( 6 )					
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pelabuhan	48	48	48



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pelabuhan	48	48	48
	15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pelabuhan	48	48	48



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
S A S A R A N ( IV )					
Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut					
Sasaran Strategis ( 7 )					
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional		2 - - -	2 - - -	- 2 - -



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
<b>SASARAN ( V )</b>					
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi					
<b>Sasaran Strategis ( 8 )</b>					
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	Orang	60	60	60
	18. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	Orang	120	120	120
	19. Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	Orang	60	60	60
	20. Jumlah tenaga PPNS	Orang	367	427	487
	21. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	Orang	60	60	60
	22. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	Orang	120	120	120



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	23. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	Orang	*)	20	20
	24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	Orang	*)	20	20
	25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	Orang	*)	20	20
Sasaran Strategis ( 9 )					
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		78,00	82,00	84,00
	27. Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	331.485.001.206	309.026.100.000	383.244.291.534



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	28. Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	11.550.550.774.000	9.603.042.171.000	9.603.042.171.000
	29. Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp.	26.680.195.570.824	33.010.412.564.824	39.510.412.564.842
Sasaran Strategis ( 10 )					
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi di Bidang Transportasi Laut	30. Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	RPP RPM Kep. Dirjen	1 8 2	3 3 3	3 10 5



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
<b>S A S A R A N ( VI )</b>					
Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut serta teknologi transportasi laut yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim					
Sasaran Strategis ( 11 )					
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31. Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	Mega Ton	0,4853	0,5252	0,5650



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
Sasaran Strategis ( 12 )					
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	Pelabuhan	6	12	28
	33. Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention)	Sertifikat	1.021	1.123	1.347
	34. Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	Sertifikat	1.527	1.679	1.846



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2012	2013	2014
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
	35. Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	Sertifikat	134	152	165
	36. Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	Sertifikat	245	270	300



Evaluasi dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Terhadap Target RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010-2014 yaitu sebagai berikut:

#### Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

"Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal"

##### I. Sasaran Strategis

###### Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	24 Kejadian Kecelakaan (129,17 %)	Tetap
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	66 Kejadian Kecelakaan (72,73 %)	51 Kejadian Kecelakaan (94,12 %)	Turun 21,39 %

###### 1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2012-2014 sebanyak 93 kejadian kecelakaan, dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 48 kejadian kecelakaan artinya tingkat kecelakan sampai dengan saat ini sebesar 51,61 %.



2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2012-2014 sebanyak 144 kejadian kecelakaan, dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 117 kejadian kecelakaan artinya tingkat kecelakaan sampai dengan saat ini sebesar 81,25 %.

## II. Sasaran Strategis

"Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	9.298 Sertifikat (130,11 %)	9.794 Sertifikat (124,76 %)	Naik 5,35 %

3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal  
(cat : Pusat)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal pada tahun 2012-2014 sebanyak 23,646 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 19,092 sertifikat kelaiklautan kapal artinya sampai dengan saat ini sebesar 80,84%.



### III. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah"

Sasaran Strategis (3)

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis (100 %)	79 Rute Perintis (98,75 %)	
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan (98,22 %)	386 Pelabuhan (100 %)	

#### 4. Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut pada tahun 2012-2014 sebanyak 240 Rute Perintis dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 159 Rute Perintis artinya sampai dengan saat ini pencapainnya sebesar 66,25% atau terdapat 81 rute lagi yang harus dilayani pada tahun 2014.



5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang pada tahun 2012-2014 sebanyak 1,184 Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 772 Jumlah artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 65,20 % atau terdapat 412 jumlah pelabuhan yang harus dilayani pada tahun 2014.

#### IV. SASARAN III

"Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut"

Sasaran Strategis (4)

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang (120,56%)	6,092,501 Orang (91,47 %)	Turun 29,09 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang (100,66%)	563,727 Orang (88,92%)	Turun 11,74 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton (107,54%)	368.297.016 Ton (108,00%)	Naik 0,46 %



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Pertumbuhan
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 % (100,05%)	99,68% (100,97 %)	Naik 0,78 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton (100,59%)	67.511.610 Ton (106,82%)	Naik 6,23 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 % (118,00%)	10,91 % (105,61%)	Turun 12,39 %

6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut pada tahun 2012-2014 sebanyak 18.887.658 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 12.752.501 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 67,52 % atau terdapat 6.135.157 yang harus terangkut pada tahun 2014.

7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja penumpang angkutan laut perintis pada tahun 2012-2014 sebanyak 1.948.847 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 1.197.727 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 61,46 % atau terdapat 751.120 yang harus terangkut pada tahun 2014.



8. Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional pada tahun 2012-2014 sebanyak 1.027.500.000 ton dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 709.297.016 ton artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 69,63 % atau terdapat 318.202.984 yang harus terangkut pada tahun 2014.

9. Prosentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Prosentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional pada tahun 2012-2014 sebesar 99,00 % dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 98,90 % artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 98,90 % pada tahun 2014.

10. Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional pada tahun 2012-2014 sebesar 189,099,000 ton dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 130,711,610 ton artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 69,12 % atau 58.367.390 ton yang harus diangkut pada tahun 2014.

11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional pada tahun 2014 sebesar 10,51 % dan realisasi



pencapaian sampai dengan 2013 sebesar 10,91 % artinya pencapaian sampai dengan saat ini sudah diatas target tahun 2014 sebesar 0,36 %.

#### IV. SASARAN STRATEGIS ( 5 )

Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang

12. Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan;  
Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	351 menit	104 Menit (173,33 %)	

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan pada tahun 2014 sebesar 60 menit dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebesar 104 menit artinya pencapaian sampai dengan saat ini sudah diatas target tahun 2014 sebesar 44 menit.

#### SASARAN STRATEGIS ( 6 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	37 Pelabuhan (77,08 %)	



14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	36 Pelabuhan (75,00 %)	36 Pelabuhan (75,00 %)	
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	15 Pelabuhan (31,25 %)	26 Pelabuhan (54,16 %)	

13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 48 pelabuhan dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebanyak 37 pelabuhan artinya masih terdapat 11 pelabuhan lagi yang harus dapat memenuhi pencapaian Waiting Time (WT) sesuai target sampai tahun 2014.

14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 48 pelabuhan dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebanyak 36 pelabuhan artinya masih terdapat 12



pelabuhan lagi yang harus dapat memenuhi pencapaian Approach Time (AT) sesuai target sampai tahun 2014.

15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 48 pelabuhan dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 sebanyak 26 pelabuhan artinya masih terdapat 22 pelabuhan lagi yang harus dapat memenuhi pencapaian Efektif (Effective Time/ET) sesuai target sampai tahun 2014.

## VII. SASARAN IV

"Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi" SASARAN STRATEGIS (7)

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut  Pelelangan Perizinan Konstruksi Operasional		2 (100,00 %)	2 (100,00 %)



16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut pada tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan pada tahap konstruksi dan realisasi pencapaian sampai dengan 2013 masih pada tahap pelelangan sebanyak 2 kegiatan artinya pada tahun 2014 harus dapat mencapai sampai tahap konstruksi.

## VIII. SASARAN ( 5 )

"Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi"

Sasaran Strategis ( 8 )

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	
18	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	59 Orang (98,33 %)	60 Orang (100,00 %)	
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang (100,00 %)	427 Orang (100,00 %)	
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang (100,00 %)	60 Orang (100,00 %)	



22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang (100,00 %)	120 Orang (100,00 %)	
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	50 Orang (250,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	30 Orang (150,00%)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

### Sasaran Strategis ( 8 )

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

#### 17. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A pada tahun 2012-2014 sebanyak 180 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 120 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,67 % atau masih terdapat 60 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

#### 18. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B pada tahun 2012-2014 sebanyak 360 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 240 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,67 % atau masih terdapat 120 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



19. Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS pada tahun 2012-2014 sebanyak 180 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 119 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,11 % atau masih terdapat 61 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

20. Jumlah Tenaga PPNS

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Tenaga PPNS pada tahun 2012-2014 sebanyak 487 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 427 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 87,68 % atau masih terdapat 60 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

21. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A pada tahun 2012-2014 sebanyak 180 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 120 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,67 % atau masih terdapat 60 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

22. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B pada tahun 2012-2014 sebanyak 360 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 240 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 66,76 % atau masih terdapat 120 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



**23. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran;**

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran pada tahun 2012-2014 sebanyak 40 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 30 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 75,00 % atau masih terdapat 10 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

**24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;**

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran pada tahun 2012-2014 sebanyak 40 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 50 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 125% atau sudah melebihi target tahun 2014.

**25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam;**

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan tenaga penyelam pada tahun 2012-2014 sebanyak 40 orang dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 30 orang artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 75,00 % atau masih terdapat 10 orang yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

**Sasaran Strategis ( 9 )**

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,

Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		Tahun 2012	Tahun 2013	
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00 (100,00 %)	80,26 (97,88 %)	Naik 2,26 %



27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 620.558.927.453 (187,21 %)	Rp. 642.438.699.393 (207,89 %)	Naik Rp 21.877.771,940
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.993.257.136.888 (86,52 %)	Rp. 9.943.176.487.000 (103,54 %)	Naik 50.080.649.888
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 25.241.607.641.062 (94,61 %)	Rp. 27.992.287.146.185 (84,54 %)	Naik 2.750.679.505,123

#### 26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebesar 84 dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar 80,26 artinya pencapaiannya sebesar 95,55 % atau masih terdapat sebesar 3,74 nilai yang harus ditingkatkan sesuai target tahun 2014.

#### 27. Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 1.023.755.392.740 dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 1.262.997.626.846 artinya pencapaiannya sebesar 123,06 % atau sudah melebihi target tahun 2014 sebesar Rp. 239.242.234.106.

#### 28. Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 30.756.635.116.000 dan realisasi pencapaian



2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp. 19.936.433.623.888 artinya pencapaiannya sebesar 64,82 % atau masih terdapat sebesar Rp. 10.820.201.492.112 yang harus dicapai tahun 2014.

#### 29. Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Jumlah Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 39.510.412.564.842 dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp53.233.894.787.247 artinya pencapaiannya sebesar 134,73 % atau sudah melebihi target tahun 2014 sebesar Rp.13.723.482.222.405.

#### X. SASARAN STRATEGIS ( 10 )

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	1 (100 %) 8 (100 %) 2 (100 %)	3 (100 %) - -	

#### 30. Jumlah penyelesaian regulasi

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian regulasi pada tahun 2012-2014 meliputi RPP sebanyak 7 (tujuh), RPM 21 (duapuluhan satu) dan Keputusan Dirjen 10 (sepuluh) dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 meliputi RPP sebanyak 4 (empat), RPM 8 (delapan) dan Keputusan Dirjen 3 (tiga) artinya pencapaian



sampai dengan saat ini meliputi RPP sebesar 42,86 % atau masih terdapat 3 RPP yang harus dicapai, pencapaian RPM sebesar 61,906 % atau masih terdapat 8 RPM yang harus dicapai dan pencapaian keputusan Dirjen sebesar 70 % atau masih terdapat 3 keputusan Dirjen yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

## IX. SASARAN 6

Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim  
Sasaran Strategis ( 11 )

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,102 Mega Ton (21,00 %)	0,3939 Mega Ton	

### 31. Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut:

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut pada tahun 2012-2014 sebesar 0,5650 mega ton dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebesar 0,3939 mega ton artinya pencapaian sampai dengan saat ini masih sebesar 69,72 % atau masih terdapat sebesar 0,1711 mega ton yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

## XII. SASARAN STRATEGIS ( 12 )

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KET
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan (100 %)	13 Pelabuhan (108,33 %)	Naik 8,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	972 Sertifikat (95,20 %)	1.196 Sertifikat (106,50 %)	Naik 11,30 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.332 Sertifikat (87,23 %)	1.514 Sertifikat (90,17 %)	Naik 2,94 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	107 Sertifikat (79,85 %)	156 Sertifikat (102,63 %)	Naik 22,78 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	305 Sertifikat (80,33 %)	403 Sertifikat (149,26 %)	Naik 68,93 %

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan);

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port pada tahun 2012-2014 banyak 28 Pelabuhan dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 13 Pelabuhan artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 46,43 % atau masih terdapat 15 (lima belas) pelabuhan yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



33. Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention);

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP pada tahun 2012-2014 banyak 3.491 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 2.168 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 62,10 % atau masih terdapat 1.323 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

34. Jumlah Pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat SNPP pada tahun 2012-2014 sebanyak 5.052 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 2.846 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 56,33 % atau masih terdapat 2.206 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

35. Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun pada tahun 2012-2014 sebanyak 451 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 263 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 58,31 % atau masih terdapat 188 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.

36. Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP pada tahun 2012-2014 banyak 815 sertifikat dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 sebanyak 708 sertifikat artinya pencapaian sampai dengan saat ini sebesar 86,87 % atau masih terdapat 107 sertifikat yang harus dipenuhi pada tahun 2014.





## BAB IV P E N U T U P

### 4.1 Kesimpulan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mencapai beberapa keberhasilan pada tahun 2013, antara lain turunnya jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia dan meningkatnya jumlah dan share muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketidakberhasilan.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2013 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Kementerian Perhubungan secara umum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya. Selain itu, dukungan kemampuan SDM yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2013 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

#### a. Jumlah Kejadian Kecelakaan

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2013 pada Sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal". Jumlah kejadian kecelakaan

yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2013 sebanyak 24 kejadian kecelakaan sedangkan target sebanyak 31 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 129,17%, apabila dibanding dengan tahun 2012 jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia mempunyai jumlah kejadian yang sama yaitu sebanyak 24 kejadian kecelakaan. Hal ini dapat tercapai dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang semakin ketat dan juga dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait serta kepada para pihak yang bertanggungjawab kepada kecelakaan kapal yaitu Nakhoda Kapal, Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan Penerbit Sertifikat.

- b. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain; Terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain yaitu yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya muatan kapal yang jatuh dan mengakibatkan kecelakaan.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami penurunan sebanyak 15 kejadian kecelakaan atau 29,41 % dimana pada tahun 2012 terdapat 66 kejadian kecelakaan sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 51 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain.

Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2013 sebesar 94,12 % dimana target sebanyak 48 kejadian kecelakaan sedangkan realisasi sebanyak 51 kejadian kecelakaan.

- c. Pelayanan Kinerja Operasional di Pelabuhan

Beberapa data kinerja yang berpengaruh terhadap Pencapaian Turn-Around Time (TRT) meliputi yaitu data Kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET) dan Berthing Time (BT), namun



perhitungan Turn-Around Time (TRT) Pada tahun 2013 menggunakan data kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time (ET) Pencapain kinerja penurunan Turn-Around Time (TRT) pada tahun 2013 sebesar 173,33% artinya dari target Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan sebesar 104 menit terdapat realisasi sebesar 60 menit.

Pencapain kinerja tahun 2013 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena data yang ada pada tahun 2012 Turn-Around Time (TRT) secara total atau bukan data penurunan, dan data TRT yg tersedia hanya pada 5 (lima) pelabuhan dan mempunyai rata-rata sebesar 87,94 Jam/Kapal.

d. Penurunan Emisi Gas Buang (CO<sub>2</sub>)

Pada tahun 2013 Ditjen Hubla hanya mampu menurunkan emisi gas buang (CO<sub>2</sub>) dari kapal-kapal yang beroperasional sebesar 0,3939 mega ton dari target penurunan sebesar 0,525 mega ton sehingga pencapaiannya hanya sebesar 75,00%. Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain pengehematan penggunaan BBM dan penerbitan sertifikasi kapal melalui dikeluarkannya sertifikat International Air Pollution Prevencen (IAPP) sedangkan target yang belum tercapai sebesar 25 % adalah bersumber dari faktor pendukung yaitu implementasi Ecoport di Pelabuhan karena sampai saat ini Ditjen Hubla belum dapat menentukan berapa besar penurunan emisi yang diakibatkan dari pelaksanaan Ecoport di pelabuhan.

Hal ini diatur dalam Konvensi MARPOL 73/78 Anex ke VI yang terkait dengan bahan bakar yang digunakan. Sertifikat IAPP merupakan sertifikat yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari operasional kapal.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III-IV MARPOL dengan Perpres No. 29 Tahun 2012 Jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib). Pada saat ini telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan



Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Jumlah kepemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2013 sebanyak 1.196 sertifikat dengan target sebanyak 10.208 kapal yang harus disertifikasi.

e. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih memiliki keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim baik kwalitas maupun kwantitas. Adapun beberapa tenaga yang masih sangat diperlukan antara lain tenaga Marine Inspector, penyelam, tenaga penanggulangan pencemaran dan tenaga penangulangan kebakaran. Utuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut telah dialokasikan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat namun dengan adanya penghematan maka alokasi anggaran menjadi tidak ada.

#### 4.2 Langkah ke depan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari jajaran seluruh unit kerja yang ada. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan atau untuk mewujudkan Zero Accident, Ditjen Hubla telah menyusun Road Map to Zero Accident. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
  - a. Regulasi
  - b. Kelembagaan
  - c. Prasarana
  - d. Sarana
  - e. Sumberdaya Manusia
  - f. Operator
  - g. Masyarakat
  - h. Penegakan Hukum



2. Pada Tinjau Ulang RENSTRA Ditjen Hubla tahun 2010-2014 terdapat target Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian regulasi pada tahun 2012-2014 meliputi RPP sebanyak 7 (tujuh), RPM 21 (duapuluhan satu) dan Keputusan Dirjen 10 (sepuluh) dan realisasi pencapaian 2012 sampai dengan 2013 meliputi RPP sebanyak 4 (empat), RPM 8 (delapan) dan Keputusan Dirjen 3 (tiga) artinya pencapaian sampai dengan saat ini meliputi RPP sebesar 42,86 % atau masih terdapat 3 RPP yang harus dicapai, pencapaian RPM sebesar 61,906 % atau masih terdapat 8 RPM yang harus dicapai dan pencapaian keputusan Dirjen sebesar 70 % atau masih terdapat 3 keputusan Dirjen yang harus dipenuhi pada tahun 2014.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	I - 1
1.1 Latar Belakang .....	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	I - 3
1.3 Ruang Lingkup .....	I - 4
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditjen Hubla .....	I - 4
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2013 .....	II - 1
2.1 Perencanaan Stategis .....	II - 1
2.1.1 Review Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010 –2014 .....	II - 1
2.1.2 Review Renstra Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 .....	II - 11
2.2 Perencanaan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013 .....	II - 16
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	II - 17
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013 .....	II - 23
2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Hubla Tahun 2013 .....	II - 23

2.2.2 Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Hubla Tahun	
2013 .....	II - 29
2.4 APBN Ditjen Hubla Tahun 2013 .....	II - 37
2.6 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-Masing Kegiatan	
Tahun 2013 .....	II - 42
2.7 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2013	II - 43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN HUBLA	
TAHUN 2013 .....	III - 1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	III - 1
BAB IV PENUTUP .....	
4.1 Kesimpulan .....	IV - 1
4.2 Langkah Kedepan .....	IV - 4

Lampiran

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **Review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mereview Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Adapun perubahan pokok yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla adalah sesuai dengan perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yaitu Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun Review Rencana Strategis senantiasa berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2013 dan 2014. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah memperhitungkan tingkat kebutuhan, kecukupan, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul serta tetap mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014.

#### **1) Visi dan Misi**

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah : "Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional yang Efektif, Efisien dan Berdaya Saing serta Memberikan Nilai Tambah sebagai Infrastruktur dan Tulang Punggung Kehidupan Berbangsa dan Bernegara".

- 2) Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan menjadi 5 (lima) misi utama pembangunan yang harus ditempuh sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
  - b. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
  - c. Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan;
  - d. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
  - e. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan;

3) Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka dirumuskan tujuan Ditjen Hubla sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
- b. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme) serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan penegakan hukum;
- e. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran

4) Review Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Ditjen Hubla dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
- c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi laut;
- d. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi laut sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi laut;
- e. Peningkatan kualitas SDM transportasi laut dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
- f. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi laut yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

5) Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

#### a. Jumlah Kejadian Kecelakaan

Faktor penyebab kejadian kecelakaan yang paling dominan adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alam dan teknis. Adapun jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 11 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 31 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 24 kejadian kecelakaan.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 18 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 48 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66 kejadian kecelakaan.

Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja tahun 2012 pencapaiannya sebesar 72,73 % dimana tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain sebanyak 48 kejadian kecelakaan namun realisasi di atas target yang diperhitungkan yaitu sebanyak 66 kejadian kecelakaan, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih mempunyai kinerja yang kurang baik karena belum berhasil menurunkan tingkat kecelakaan.

Ditjen Hubla telah mengambil kebijakan dengan meningkatkan pengawasan dan menyampaikan kepada para penanggungjawab keselamatan pelayaran di pelabuhan untuk segera mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia. Sedangkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dengan menata penempatan atau pengoperasian kapal sesuai dengan kondisi perairan serta mengevaluasi banyaknya kapak-kapal yang sudah berumur tua serta meningkatkan dan menata jadwal pemeliharaan atau docking kapal.

b. Pelayanan Kinerja Operasional di Pelabuhan

Terdapat beberapa pelabuhan komersial yang telah mencapai Waiting Time (WT), Approach Time (AT) dan Waktu Efektif diatas standard kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut Ditjen Hubla sebagai regulator akan berkoordinasi dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan komersial (operator) untuk meningkatkan kinerjanya dimana salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana operasional di pelabuhan.

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengambil beberapa kebijakan dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan komersial (operator) untuk meningkatkan kinerjanya dimana salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana operasional di pelabuhan.

Ditjen Hubla juga akan melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Dirjen Hubla No. UM.002/38/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

c. Penurunan Emisi Gas Buang (CO<sub>2</sub>)

Ditjen Hubla belum mampu menurunkan Emisi Gas Buang (CO<sub>2</sub>) sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini karena jumlah kapal yang sudah memiliki sertifikat IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2012 masih terbatas yaitu sebesar 3,22 %. Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kapal yang memiliki sertifikat IAPP adalah telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Peraturan ini bertujuan agar kapal-kapal yang beroperasional di dalam negeri akan diwajibkan (mandatory) untuk memiliki sertifikat IAPP sehingga tidak bersifat voluntary (tidak wajib)

d. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih memiliki keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim baik kwalitas maupun kwantitas. Adapun beberapa tenaga yang masih sangat diperlukan antara lain tenaga Marine Inspector, penyelam, tenaga penanggulangan pencemaran dan tenaga penanggulangan kebakaran. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut telah dialokasikan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat namun dengan adanya penghematan maka alokasi anggaran menjadi tidak ada.

6) Langkah ke depan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari jajaran seluruh unit kerja yang ada. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan atau untuk mewujudkan Zero Accident, Ditjen Hubla telah menyusun Road Map to Zero Accident. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
  - Regulasi
  - Kelembagaan
  - Prasarana
  - Sarana
  - Sumberdaya Manusia
  - Operator
  - Masyarakat
  - Penegakan Hukum

- b. Untuk meningkatkan pelayanan kinerja operasional di pelabuhan maka telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Dirjen No : UM.002/38/18/DJPL-11 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Standar kinerja pelayanan digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terutama untuk tenaga penanggulangan pencemaran, kebakaran dan penyelam maka perlu diprioritaskan pelaksanaan diklat pada tahun selanjutnya. Dan diharapkan dapat dilakukan koordinasi yang intensif dengan BPSDM Kementerian Perhubungan agar dapat terpenuhi kebutuhan SDM baik kwalitas maupun kwantitas.
- d. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala akan menjadi prioritas pada tahun yang akan datang.
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan diklat dan pembinaan kepada aparat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait keselamatan pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim serta kompetensi lain yang dapat mendukung pencapaian tarket kinerja yang telah ditetapkan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N ( I )</b>				
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 1 )</b>				
Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	51 Kejadian Kecelakaan	94,12 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 2 )</b>				
Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat	9.794 Sertifikat	124,76 %
<b>S A S A R A N ( II )</b>				
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 3 )</b>				
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	79 Rute Perintis	98,75 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan	379 Pelabuhan	98,19 %

### SASARAN (III)

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut

#### SASARAN STRATEGIS (4)

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional

6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang	6,092,501 Orang	91,47 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang	563,727 Orang	88,92 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton	368,297,016 Ton	108,00 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %	99,68 %	100,79 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton	67,511,610 Ton	106,82 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %	10,91 %	105,61 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 5 )</b>				
Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang				
12	Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	60 menit	104 menit	173,33 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 6 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belakut terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	37 Pelabuhan	77,08 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	26 Pelabuhan	54,17 %

#### S A S A R A N ( IV )

Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi

#### SASARAN STRATEGIS ( 7 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut  - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2	2	100 %
----	---	---	---	-------

#### S A S A R A N ( V )

Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 8 )</b>				
Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	60 Orang	100,00 %
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang	427 Orang	100,00 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang	30 Orang	150,00%
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang	50 Orang	250,00%
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	30 Orang	150,00%
<b>SASARAN STRATEGIS ( 9 )</b>				
Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00	80,26	97,88 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000	Rp. 642.438.699.393	207,89 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000	Rp. 9.943.176.487.000	103,54 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824	Rp. 27.992.287.146.185	84,54 %

#### SASARAN STRATEGIS ( 10 )

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	3	3	100,00 %
----	--	---	---	----------

#### S A S A R A N ( 6 )

Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

#### SASARAN STRATEGIS ( 11 )

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,5252 Mega Ton	0,3939 Mega Ton	75 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 12 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan	13 Pelabuhan	108,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention)	1,123 Sertifikat	1,196 Sertifikat	106,50 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1,679 Sertifikat	1,514 Sertifikat	90,17 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat	156 Sertifikat	102,63 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat	403 Sertifikat	149,26 %

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2013 ini, dimaksudkan sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2013. Disamping itu sebagai salah satu

perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam tahun 2013 dan sebagai gambaran dan penilaian secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013 ini, diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Jakarta,

2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Capt. BOBBY R. MAMAHIT  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19560912 198503 1 002

*BAB I*

*PENDAHULUAN*

# *BAB II*

## *PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2012*

# *BAB III*

## *AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2012*

*BAB IV*

*PENU TUP*

# *LAMPIRAN*

# *DAFTAR ISI*

*KATA  
PENGANTAR*

# *IKHTISAR EKSEKUTIF*



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



**DRAFT  
LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2013**



**DIREKTORAT JENERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**TAHUN 2013**

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
Tahun : 2013

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
S A S A R A N ( I )				
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
SASARAN STRATEGIS ( 1 )				
Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	51 Kejadian Kecelakaan	94,12 %
SASARAN STRATEGIS ( 2 )				
Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.850 Sertifikat	9.794 Sertifikat	124,76 %
S A S A R A N ( II )				
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>SASARAN STRATEGIS ( 3 )</b>				
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	79 Rute Perintis	98,75 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	386 Pelabuhan	379 Pelabuhan	98,19 %
<b>S A S A R A N ( III )</b>				
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 4 )</b>				
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Transportasi Laut Nasional				
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	6,660,000 Orang	6,092,501 Orang	91,47 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	634.000 Orang	563,727 Orang	88,92 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	341.000.000 Ton	368,297,016 Ton	108,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,90 %	99,68 %	100,79 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	63.200.000 Ton	67.511.610 Ton	106,82 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,33 %	10,91 %	105,61 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 5 )</b>				
Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang				
12	Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	60 menit	104 menit	173,33 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 6 )</b>				
Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	37 Pelabuhan	77,08 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	26 Pelabuhan	54,17 %

#### S A S A R A N ( IV )

Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi

#### SASARAN STRATEGIS ( 7 )

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan	2	2	100 %
----	---	---	---	-------

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan</li> <li>- Konstruksi</li> <li>- Operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
<b>S A S A R A N ( V )</b>				
Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi				
<b>SASARAN STRATEGIS ( 8 )</b>				
Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	60 Orang	100,00 %
20	Jumlah tenaga PPNS	427 Orang	427 Orang	100,00 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang	30 Orang	150,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang	50 Orang	250,00%
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang	30 Orang	150,00%
<b>SASARAN STRATEGIS ( 9 )</b>				
Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,00	80,26	97,88 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 309.026.100.000	Rp. 642.438.699.393	207,89 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 9.603.042.171.000	Rp. 9.943.176.487.000	103,54 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 33.110.421.564.824	Rp. 27.992.287.146.185	84,54 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 10 )</b>				
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	3 - -	3 - -	100,00 % - -

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
<b>S A S A R A N ( 6 )</b>				
Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,5252 Mega Ton	0,3939 Mega Ton	75 %
<b>SASARAN STRATEGIS ( 11 )</b>				
Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	12 Pelabuhan	13 Pelabuhan	108,33 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention)	1,123 Sertifikat	1,196 Sertifikat	106,50 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1,679 Sertifikat	1,514 Sertifikat	90,17 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	152 Sertifikat	156 Sertifikat	102,63 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	270 Sertifikat	403 Sertifikat	149,26 %